KEDIRI BERBUDAYA BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pemerintah
Kabupaten Kediri



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pemerintah Kabupaten Kediri

2024

Panduan Umum

Untuk diperhatikan petunjuk dalam membaca laporan ini, 'Pemerintah Kabupaten', 'Pemkab', dan 'Pemkab Kediri' mengacu pada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai Instansi Pemerintah. 'Pemerintah' secara umum mengacu pada Pemerintahan yang umum (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota) yang menunjang pencapaian kinerja.

Sangkalan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi pernyataan-pernyataan yang beberapa diantaranya dapat dianggap sebagai pandangan masa depan dengan prospek resiko dan ketidakpastian dengan kenyataan yang mungkin terjadi di masa hadapan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan secara terbatas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 53 Tahun 2014.

Korespondensi

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi korespondensi melalui;

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
Jalan Soekarno Hatta nomor 1, Katang, Ngasem, Kabupaten Kediri
Email: bagian_umum@kedirikab.go.id, bagian_organisasi@kedirikab.go.id
Website: kedirikab.go.id

Laporan dan Sambutan
Bupati Kediri



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Masyarakat Kabupaten Kediri dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati, Perkenankanlah saya menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2024 yang berakhir waktu kinerjanya pada 31 Desember 2024.

Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia, Kekuatan dan Kesehatan serta Keselamatan yang diberikan-Nya kepada Kita, dimana kita hingga saat ini masih dapat merasakan nikmat Sehat dan nikmat Selamat untuk terus melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Kediri dengan baik.

Dalam kondisi yang sulit terutama selepas Covid-19, kami sangat berterima kasih dengan kesungguhan dan semangat masyarakat Kabupaten Kediri untuk terus berkembang dan bangkit dari keterpurukan. Kesungguhan dan semangat masyarakat secara langsung menjadi cambuk dan pelecut bagi kami untuk tetap melanjutkan program-program yang telah kami rencanakan.

Terdapat 1 Visi, 9 Misi, 11 Tujuan dan 20 Sasaran yang telah diperjanjikan. Dalam Tujuan dan Sasaran tersebut terdapat target-target pencapaian kinerja yang secara umum telah tercapai dengan baik. Pada Tahun 2024, beberapa capaian-capaian penting telah berhasil dicapai dengan baik. Seperti contohnya Persentase Angka Kemiskinan yang menurun, Angka Stunting yang menurun, dan Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat.

Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri, secara umum dan dengan sehati-hati mungkin telah kami gunakan sebagaimana mestinya. Kami berusaha untuk tidak gegabah, kami berusaha untuk menimbulkan *output* dan *outcome* yang berpihak kepada masyarakat secara umum.

Namun begitu, kami tetap bertekad untuk tetap bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami terus bertekad melanjutkan pembangunan 9 misi yang telah kami tetapkan dalam rangka membangun Kabupaten Kediri, terutama di masa-masa bangkit bersama seperti sekarang ini.

Kinerja yang telah kami laksanakan, dengan hormat kami laporkan secara terang dan akuntabel. Kedepannya, pemerintahan yang berorientasi hasil menjadi tujuan dan prioritas kami. *Concern* dalam upaya mengadopsi sistem manajemen mutu dalam pemerintahan. Sebagaimana komitmen kami, bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi agenda wajib Pemerintah Kabupaten Kediri.

Oleh karena demikian, dalam menyongsong tahun 2025 kedepan Pemerintah Kabupaten Kediri tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antar sektor semakin diperlukan. Terutama antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku-pemangku kepentingan terkait. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri secara jelas dan gamblang.

Masyarakat Kabupaten Kediri dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Laporan ini bukan dimaksudkan untuk memamerkan hasil-hasil capaian yang telah kami laksanakan selama tahun 2024. Namun sebaliknya, laporan ini kami sampaikan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kami agar menjadi pembelajaran dan diperbaiki kedepannya. Kami akan menggali saran dan masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum untuk perbaikan di Pemerintah Kabupaten Kediri secara berkelanjutan.

Tidak lupa, ucapan terimakasih saya haturkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, masyarakat umum serta ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kediri. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat atas kepercayaan dan komitmen bersama dalam pembangunan. Oleh karena demikian, Mari bersama-sama kita bangun Kabupaten Kediri tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk, perlindungan, dan curahan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya kepada kita semua seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Kediri. Agar senantiasa tetap bersinergi, meningkat, bertumbuh, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk Kabupaten Kediri menjadi daerah yang raharja, mukti, dan berbudaya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ringkasan Eksekutif

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri

Dalam rangka pencapaian Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”, Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sebagai Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dimaktubkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Kediri dengan 11 Tujuan dan 20 Sasaran Strategis dengan ringkasan hasil sebagai berikut;

Tabel 1 Ringkasan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Keterangan**	**Rujukan Data**
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	74.68	75.18	100.67%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	5.1	98.00%	Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.63	100.07%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
	Rata-rata Lama Sekolah	8.24	8.26	100.24%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74.85	75.07	100.29%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1	71.31	100.30%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024
Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	9.8	9.95	98.47%	Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 1/07/3506/Th.V 29 Juli 2024 sebagaimana termaktub dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri Tahun 2024 hal 63
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	Sangat Baik	Data Hasil Survei Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusifitas Daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	77.86	79	101.46%	Sangat Baik	Laporan Akhir Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Kediri
Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat konduktivitas daerah	100%	100%	100.00%	Sangat Baik	Rekapitulasi Kondusivitas Daerah Kabupaten Kediri

Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Keterangan**	**Rujukan Data**
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	77	85.99*	111.68%	Sangat Baik	Surat Menteri PANRB tanggal 26 Februari 2025 nomor B/43/RB.04/2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024 Hasil Evaluasi Sementara Indeks RB Tahun 2024
Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	75	67.11	89.48%	Baik	Surat Menteri PANRB tanggal 3 September 2024 nomor B/284/AA.05/2024
	IKM	86.35	88.74	102.77%	Sangat Baik	Surat Kabupaten Kediri Nomor 000.8.3.4/267/418.07/2024 Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100.00%	Sangat Baik	LHP BPK sebagaimana data disampaikan oleh BPKAD
	Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.74	3.85	102.94%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik nomor No. 53/07/Th. XXVII, 15 Juli 2024
Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	Sangat Baik	Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya tanggal 9 Oktober 2024 Nomor /B-AK.04/SD/KR.II/2024
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.3	4.62	107.44%	Sangat Baik	Keputusan MenPANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kediri Tahun 2024
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	4.8	4.95	103.13%	Baik	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 640
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7%	29.99%	428.43%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2024 Kabupaten Kediri
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,145,155	1,032,333	90.15%	Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	3.03	-1.73	-57.10%	Kurang Baik	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 639
Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146.1	146.44	100.23%	Sangat Baik	Data Ketersediaan Pangan Beras Tahun 2024
Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Nilai Tukar Petani	104.44	104.69	100.24%	Sangat Baik	Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kediri
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	68.1	69.84	102.56%	Sangat Baik	Laporan Akhir Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Keterangan**	**Rujukan Data**
Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	80.50%	87.00%	108.07%	Sangat Baik	Data Survei Kondisi Jalan dari Bidang PT
	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	70.50%	80.79%	114.60%	Sangat Baik	Data dari Bidang OPD SDA
	Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%	100.00%	133.33%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Data dari Bidang Penataan Ruang
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%	86.08%	100.09%	Sangat Baik	Hasil data diolah Dinas Perkim
	Persentase Rumah Layak Huni	49.67%	53.55%	107.81%	Sangat Baik	Hasil data diolah Dinas Perkim
Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86.59	87.44	100.98%	Sangat Baik	Hasil Perolehan Aplikasi e-Sukma Jatim (Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dishub 2024)
Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	9.79	9.7	99.08%	Baik	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 639
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10.95%	219.00%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Data Rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	64.42	70.49	109.42%	Sangat Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2024
Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	62.97	62.97	100.00%	Sangat Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2025
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86.12	94.31	109.51%	Sangat Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2026
	Indeks Kualitas Lahan(IKL)	40.49	39.34	97.16%	Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2027
Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	97.59	97.89	99.69%	Sangat Baik	Surat BPBD Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2025 nomor 360/0312/208.2/2025
Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	98.11%	98.21%	100.10%	Sangat Baik	Data Rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89	60	67.42%	Cukup Baik	Data Kelompok Olahraga dan Kelompok Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kediri
Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	35.68%	56.65%	158.77%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Data Rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Keterangan**	**Rujukan Data**
Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	90%	65.28%	72.53%	Cukup Baik	Data Prestasi Atlit Kabupaten Kediri Tahun 2024
Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	0.75	0.78	104.00%	Sangat Baik	Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2025
Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84.55%	94.46%	111.72%	Sangat Baik	Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2025

*) Angka Sementara

Upaya Perbaikan Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam upaya memperbaiki kualitas pelaporan kinerja berikut disampaikan upaya-upaya perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini.

Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Kediri tanggal 25 Maret 2024 nomor 700.1.2.1_050/418.11/2024 perihal Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kediri Tahun 2023 serta Surat Kementerian PANRB tanggal 3 September 2024 nomor B/284/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 , berikut ditampilkan matriks upaya perbaikan atas rekomendasi sebagai berikut;

Tabel 2 Matrikulasi Upaya Perbaikan Laporan Kinerja

Rekomendasi	Upaya Perbaikan
Surat Inspektur 700.1.2.1_050/418.11/2024 perihal Hasil Reviu LKjIP Kabupaten Kediri Tahun 2023	
Menyajikan Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kediri pada BAB I (Pendahuluan);	Permasalahan Utama disajikan pada BAB I LKjIP Tahun 2024
Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan prestasi-prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2023;	1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 ditampilkan dalam BAB 2 dan Lampiran. 2. Capaian Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2024 ditampilkan BAB 3 dan Lampiran
Agar lebih cermat dalam menghitung persentase capaian kinerja agar lebih selaras dengan RPJMD periode tahun 2021-2026 dan melakukan perbaikan atas kesalahan perhitungan capaian kinerja tersebut;	Perhitungan capaian kinerja ditampilkan dengan formulasi, cara perhitungan, sumber data dan beberapa data mentah yang menjadi dasar perhitungan.
Surat Menteri PANRB Nomor perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024	
Melakukan penyebarluasan informasi terkait capaian kinerja tahun 2023 baik pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah melalui *website* resmi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Perangkat Daerah;	Informasi capaian kinerja disebarluaskan melalui *website* resmi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kediri maupun Perangkat Daerah;
Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta merencanakan strategi/upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja organisasi;	Informasi dalam Laporan Kinerja telah mengeksplorasi dan menganalisa pendukung, penghambat, dan solusi yang akan dilaksanakan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iv
Upaya Perbaikan Penyusunan Laporan Kinerja	viii
Bab I Pendahuluan	**13**
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Profil Kabupaten Kediri	14
1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	18
1.4 Permasalahan Strategis	21
1.5 Perencanaan Strategis	23
1.6 Pedoman dan Dasar Hukum Pelaporan	23
1.7 Sistematika Penyusunan Pelaporan	24
Bab II Perencanaan Kinerja	**26**
2.1 Perencanaan Jangka Menengah	27
2.2 Penyusunan dan Strategi Perencanaan	30
2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	31
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	34
Bab III Akuntabilitas Kinerja	**46**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	48
3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	54
3.3 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah	59
3.4 Analisa Efisiensi	65
3.5 Benchmarking	70
3.6 Analis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	77
3.7 Analisa Kinerja	
Bab IV Penutup	**241**
Lampiran	**243**

Daftar Tabel

Tabel 1	Ringkasan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024	**iv**
Tabel 2	Matrikulasi Upaya Perbaikan Laporan Kinerja	**viii**
Tabel 3	Postur Kesejahteraan Kabupaten Kediri	**3**
Tabel 4	Postur PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2024	**4**
Tabel 5	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	**14**
Tabel 6	Rekomendasi dan Upaya Tindak Lanjut atas LHE AKIP	**20**
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2024	**25**
Tabel 8	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024	**35**
Tabel 9	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	**41**
Tabel 10	Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD	**47**
Tabel 11	Analisa Efisiensi Sumber Daya	**33**
Tabel 12	Benchmarking Data Kinerja Tahun 2024	**57**
Tabel 13	Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Tahun 2024	**64**

Daftar Grafik/Peraga

Peraga 1	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri	**7**
Peraga 2	Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri	**18**

Daftar Gambar

Gambar 1	Bupati Kediri Menyerahkan SK Perpanjangan Jabatan kepada Ketua BPD	**1**
Gambar 2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kediri	**5**
Gambar 3	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030	**5**
Gambar 4	Lambang Pemerintah Kabupaten Kediri	**6**
Gambar 5	Bupati Kediri meninjau Pembangunan Gelora Dhaha Jayati	**13**
Gambar 6	Bupati Kediri bersama dengan Gubernur dan Pimpinan Daerah sekitar meninjau kesiapan Bandara Dhoho	**33**
Gambar 7	Bupati Kediri bercengkrama bersama murid SMP	**62**
Gambar 8	Rilis Grafis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024	**83**
Gambar 9	Rilis Grafis BPS pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri Tahun 2024	**83**
Gambar 10	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur	**84**
Gambar 11	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur	**84**
Gambar 12	Bupati Kediri Mas Dhito bersama dengan siswa-siswi dari SMPN Pare	**85**
Gambar 13	Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024	**87**
Gambar 14	Bupati Kediri meninjau persiapan Mobil Medis EMAS dari RSUD SLG	**91**
Gambar 15	Rilis BPS pada Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kediri Tahun 2024	**95**
Gambar 16	Job Fair di Convention Center Kabupaten Kediri	**99**
Gambar 17	Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024	**101**
Gambar 18	Bupati Kediri bertegur sapa dan mengobrol dengan masyarakat	**104**
Gambar 19	Rilis Indikator Angka Kemiskinan dari BPS	**105**
Gambar 20	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2003-2024	**106**
Gambar 21	Wakil Bupati Kediri dengan Ketua TP PKK membuka acara PKK	**108**
Gambar 22	Wakil Bupati Kediri dengan Ketua TP PKK membuka acara PKK	**113**
Gambar 23	Bupati Kediri memimpin Rapat bersama Sekretaris Daerah	**132**
Gambar 24	Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024	**133**



Gambar 1 Bupati Kediri Menyerahkan SK Perpanjangan Jabatan kepada Ketua BPD (Sumber Dinas Kominfo)

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Profil Kabupaten Kediri
1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
1.4 Permasalahan Strategis
1.5 Perencanaan Strategis
1.6 Pedoman dan Dasar Hukum Pelaporan
1.7 Sistematika Penyusunan Pelaporan

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan implementasi Pemerintahan yang baik di Kabupaten Kediri.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun menggunakan prinsip penyampaian data secara objektif dan berorientasi perbaikan kedepan. Senada dengan adagium masyarakat Jawa Mataraman yakni *sing elek didandani, sing apik dikembangne,* (yang jelek diperbaiki dan yang bagus dikembangkan). Hal tersebut menjadi dasar dalam menetapkan informasi-informasi tersebut secara akurat, bertanggung-jelas, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam pelaporan ini, dilaporkan hasil kinerja dalam rentang waktu 1 tahun yakni mulai 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2023.

1.2 Profil dan Karakteristik Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri adalah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang membentang antara 1110 47’ 05” s/d 1120 18’ 20” Bujur Timur dan 70 36’ 12” s/d 80 0’ 32” Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.563,42 Km2 atau 153.642 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, dengan 344 kelurahan/desa. Topografi wilayah yang cukup beragam dengan rata-rata ketinggian tanah di antara 0 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Wilayah bagian utara-selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 200 meter dpl, sementara pada wilayah bagian barat-timur merupakan wilayah perbukitan dan bergelombang.

Kabupaten Kediri memiliki Sungai Brantas yang membelah wilayahnya dan bahkan menjadi faktor klasifikasi karakteristik geologis wilayahnya. Menurut ini karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;
- Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri;
- Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang serta sebelah barat adalah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Wilayah Kabupaten Kediri yang berdekatan dengan kawasan gunung berapi dan pegunungan lain, memiliki potensi bencana cukup tinggi. Di Kabupaten Kediri, sedikitnya terdapat empat kecamatan dari 26 yang masuk kawasan bahaya gunung berapi. Keempat kecamatan itu yakni, Kecamatan Ngancar, Puncu, Kepung dan Kecamatan Wates. Di wilayah barat sungai Brantas yang merupakan wilayah pegunungan, memiliki potensi bencana longsor. Untuk Gunung Kelud sebagai gunung berapi aktif, berpotensi untuk terjadi erupsi kembali. Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah dengan menyusun dokumen perencanaan strategis mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat terhadap tanggap bencana, dan ini sosialisasi dan internalisasi rencana pengetahuan tanggap bencana bagi siswa-siswa sekolah menjadi salah satu materi bahan muatan lokal kurikulum pendidikan

Postur Kesejahteraan Kabupaten Kediri

Sesuai dengan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Nomor rilis *35060.2336* tentang Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 3 Postur Kesejahteraan Kabupaten Kediri

Sektor Kesejahteraan	Realisasi	Keterangan
Usia Harapan Hidup	75.09	Data 2024
Angka Kesakitan	15.16	Data 2023
Persentase Persalinan yang ditolong Dokter Kandungan	53.77	Data 2023
Rata-rata Pendidikan	8.26	Data 2023
Rasio Murid terhadap Guru	14-16	Data 2023
Kemampuan Baca Tulis	94.37%	Data 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	5.10%	Data 2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.31%	Data 2024
Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih 2023	Rp. 2.090.060,-	Data 2023
Perumahan Milik Sendiri	88.75%	Data 2023
Sumber Penerangan Listrik	100%	Data 2023
Pembuangan Akhir Tangki Septik	89.50%	Data 2023
Persentase Angka Kemiskinan	9.95%	Data 2024

Postur Kependudukan Kabupaten Kediri

Berdasarkan data konsolidasi bersih kependudukan Kabupaten Kediri Tahun 2023 postur kependudukan Kabupaten Kediri adalah sebagaimana berikut;

Jenis Kelamin	Penduduk	%
Laki-laki	847.485	50,47%
Perempuan	831.494	49,53%
Total Penduduk	**1.679.039**	**100%**

Kelompok Umur	Persentase
0-19	27,49%
20-59	55,79%
60>	16,72%

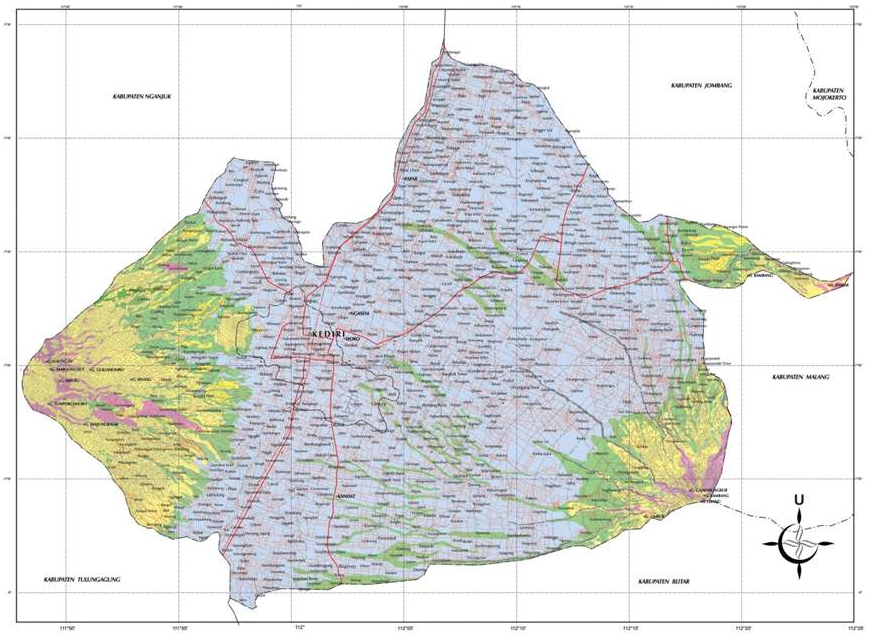
Postur Perekonomian Kabupaten Kediri

Pada tahun 2024 ini, Realisasi Perekonomian di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebesar 4.95% dengan rincian lapangan usaha sebagai berikut;

Tabel 4 Postur PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2024

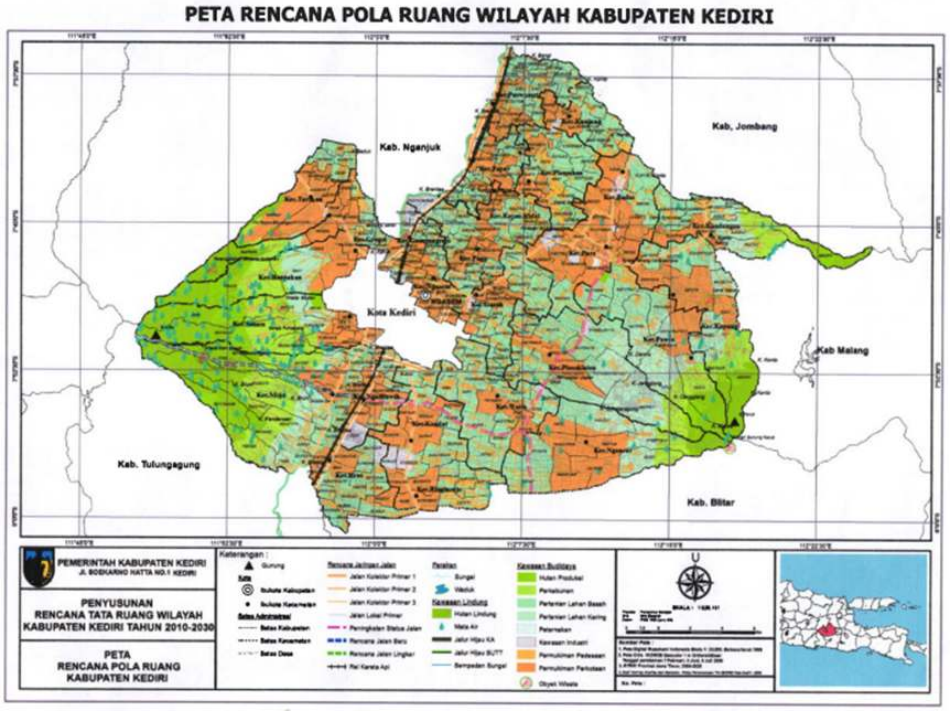
Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB ADHK Tahun 2023	PDRB ADHK Tahun 2024	Pertumbuhan	Komposisi Atas Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.317,80	6.208,51	-1,73	21,33
Pertambangan dan Penggalian	422,20	447,21	5,92	1,47
Industri Pengolahan	6.895,45	7.436,96	7,85	23,06
Pengadaan Listrik dan Gas	26,86	28,09	4,59	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,00	21,40	7,02	0,05
Konstruksi	3.076,29	3.294,09	7,08	8,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.744,47	7.077,62	4,94	20,16
Transportasi dan Pergudangan	779,59	882,25	13,17	2,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	482,83	529,67	9,70	1,77
Informasi dan Komunikasi	2.558,71	2.704,57	5,70	5,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	560,55	584,33	4,24	1,72
Real Estate	690,06	704,77	2,13	1,92
Jasa Perusahaan	94,62	99,97	5,66	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.017,91	1.094,45	7,52	3,41
Jasa Pendidikan	1.602,41	1.714,59	7,00	4,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	288,66	304,57	5,51	0,89
Jasa lainnya	617,10	654,60	6,08	1,87
PDRB	32.195,50	33.787,64	4,95	100,00
PDRB Non Migas	32.195,50	33.787,64	4,95	100,00

Gambar 2 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kediri



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

Gambar 3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri



Gambar 4 Lambang Pemerintah Kabupaten Kediri

A. Kedudukan

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 BAB VI Pasal 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang diatur secara adil dan selaras.

B. Wewenang

Sebagaimana tertuang dalam Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang bersangkutan.

C. Tugas Pokok

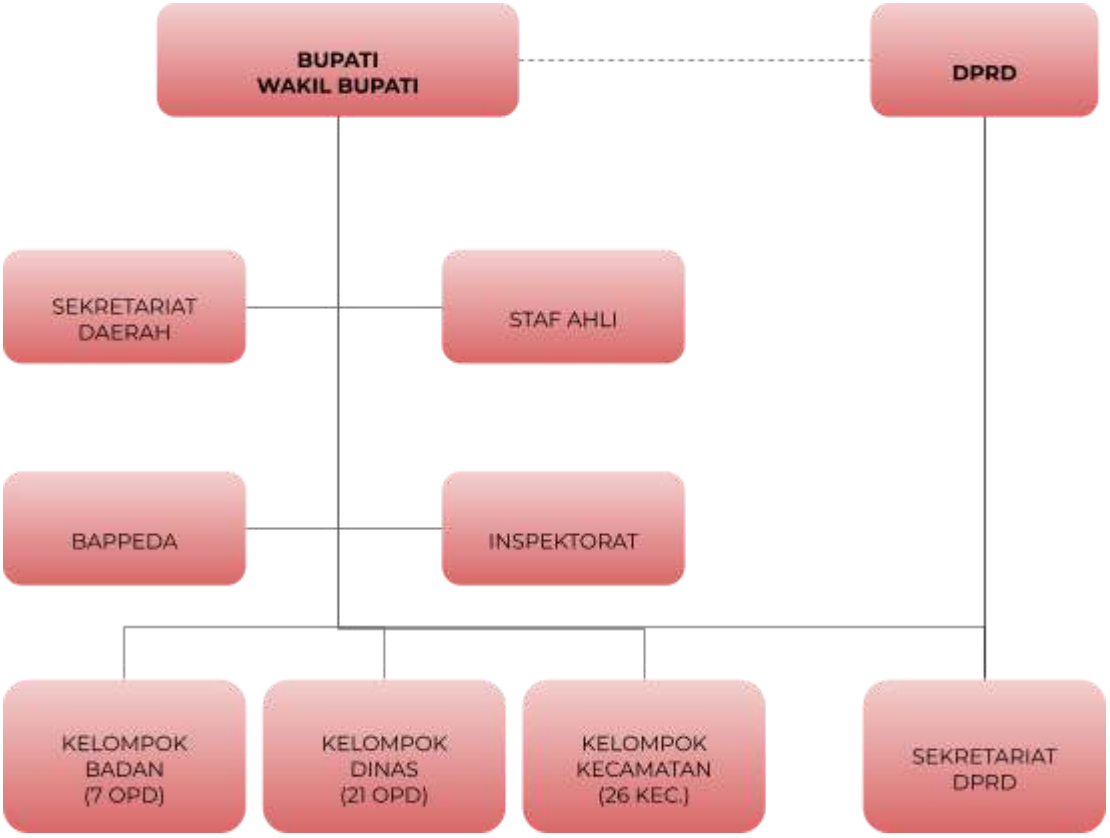
Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
b. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang;
c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum;
e. Penanganan Bidang Kesehatan;
f. Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Penanggulangan Masalah Sosial;
h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
j. Pengendalian Lingkungan Hidup;
k. Pelayanan Pertanahan;
l. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
o. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar lainnya Urusan Wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan;

D. Struktur Organisasi

Pada bagian ini dijelaskan tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

Peraga 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri



Sumber: (diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)

Daftar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Sosial
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

19. Dinas Perdagangan
20. Dinas Tenaga Kerja
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. Dinas Perhubungan
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
27. Dinas Pertanian dan Perkebunan
28. Dinas Perikanan
29. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30. Sekretariat DPRD
31. Satuan Polisi Pamong Praja
32. Kecamatan Semen
33. Kecamatan Mojo
34. Kecamatan Kras
35. Kecamatan Ngadiluwih
36. Kecamatan Kandat
37. Kecamatan Wates
38. Kecamatan Ngancar
39. Kecamatan Puncu
40. Kecamatan Plosoklaten
41. Kecamatan Gurah
42. Kecamatan Pagu
43. Kecamatan Gampengrejo
44. Kecamatan Grogol
45. Kecamatan Papar
46. Kecamatan Purwoasri
47. Kecamatan Plemahan
48. Kecamatan Pare
49. Kecamatan Kepung
50. Kecamatan Kandangan
51. Kecamatan Tarokan
52. Kecamatan Kunjang
53. Kecamatan Banyakan
54. Kecamatan Ringinrejo
55. Kecamatan Kayen kidul
56. Kecamatan Ngasem
57. Kecamatan Badas

1.4 Permasalahan Strategis

Merujuk pada BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026, permasalahan-permasalahan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

1. Pentingnya akses dan daya dukung sistem pendidikan sebagai upaya menjamin hak dasar masyarakat Kabupaten Kediri dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang inklusif.
2. Pentingnya integrasi kebutuhan sektor tenaga kerja terhadap kualitas pendidikan sebagai upaya menciptakan SDM masyarakat Kabupaten Kediri yang berdaya saing
3. Peningkatan kualitas pendampingan ibu hamil, menyusui dan balita.
4. Perlunya meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan penanggungan premi pada masyarakat miskin oleh pemerintah daerah.
5. Kesadaran masyarakat terhadap tindakan preventif ancaman penyebaran penyakit menular
6. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tanggap bencana berbasis kearifan lokal dalam kemajemukan kultur budaya masyarakat. Kearifan lokal terkait dengan kondisi lingkungan sekitar dan mengembangkan adaptasinya.
7. Pentingnya meningkatkan cakupan penerima jaminan sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan PMKS.
8. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
9. Pentingnya kepatuhan terhadap penegakan regulasi penggunaan lahan dalam menciptakan tatanan ruang publik yang berkelanjutan yang mendukung kualitas lingkungan hidup.
10. Kebutuhan terhadap pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah sebagai upaya mereduksi pencemaran dan memberikan alternatif penghidupan masyarakat sehingga menciptakan masyarakat peduli lingkungan
11. Meningkatkan jumlah rumah layak huni masyarakat dan kesadaran untuk hidup bersih
12. Tuntutan pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan pusat perekonomian baru dalam menangkap peluang dibukanya bandara internasional Kabupaten Kedir
13. Penguatan PDRB sektor perdagangan melalui optimalisasi ekspor daerah khususnya pada sektor industri kertas.
14. Kinerja tim pengendali inflasi masih perlu ditingkatkan khususnya pada upaya preventif
15. Perlunya peningkatan kondusivitas iklim investasi.
16. Perlunya penertiban terhadap perusahaan yang belum memfasilitasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada karyawannya.
17. Perlunya peningkatan kinerja koperasi
18. Pusat pertumbuhan (Contoh: pasar, tempat wisata, dll) dan event/acara yang dapat menjadi pusat keramaian untuk berjualan masih minim
19. Perlunya pemutakhiran data perindustrian untuk mengawal pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri.
20. Perlunya peningkatan produksi, produktivitas serta integrasi produk hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan sektor industri pengolahan dan jasa.
21. Perlunya integrasi produk hasil pertanian dengan sektor industri pengolahan
22. Perlunya peningkatan produktivitas perikanan khususnya budidaya baik ikan konsumsi maupun ikan hias, yang melayani pasar domestik maupun ekspor.
23. Pengembangan sistem pertanian terpadu sehingga petani menghasilkan *multi revenue* seperti melalui minapadi
24. Meningkatkan efisiensi distribusi air pada sistem irigasi dan reservoir/waduk-waduk penampungan air untuk pertanian.
25. Kemudahan akses dan bantuan modal pelaku usaha perikanan dan meningkatkan kualitas produksi perikanan
26. Perlunya pembuatan peta pengembangan SDM yang mengakomodir tantangan pembangunan 20 tahun ke depan.

27. Perlunya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
28. Perlunya pemutakhiran infrastruktur IT;
29. Pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pada setiap desa.
30. Penataan alokasi anggaran yang lebih memperhatikan belanja yang berpengaruh pada kinerja program.;
31. Optimalisasi pendanaan dari sumber keuangan baik dari daerah maupun provinsi/pusat.

1.5 Perencanaan Strategis

Merujuk pada BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026, perencanaan-perencanaan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kediri telah disusun dasar tema-tema perencanaan sebagai berikut;

1. Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan;
3. Ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan potensi daerah;
4. Pencapaian ketahanan pangan yang mandiri;
5. Pembangunan infrastruktur yang merata dan partisipatif;
6. Pariwisata berkelanjutan yang menjunjung kearifan lokal;
7. Kesadaran menjaga lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana;
8. Masyarakat berbudaya dan inovatif;
9. Kemandirian Desa;
10. Penanganan Pandemi COVID-19;

1.6 Dasar Hukum dan Panduan Penyusunan Laporan

Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri didasari atas dasar hukum sebagai berikut:

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Kediri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;

16. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, pedoman yang digunakan adalah pedoman Sistematika penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 54 Tahun 2014 dan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kedua peraturan tersebut digunakan sebagai *guidance* (penuntun) dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan satu rangkaian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertanggung-jelas, bertanggung-jawab, untuk menuju penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) di masa yang akan datang.

1.7 Sistematika Penyusunan Laporan

Penyusunan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

1. Capaian Kerja Organisasi
2. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
3. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
4. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
5. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
6. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
7. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
9. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
11. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN
Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.



Gambar 5 Bupati Kediri meninjau Pembangunan Gelora Dhaha Jayati (Sumber Dinas Kominfo)

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Jangka Menengah
2.2 Penyusunan dan Strategi Perencanaan
2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

2.1 Perencanaan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kediri telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan visi dan misi sebagai berikut;

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Misi

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan, Sasaran dan Target Akhir Jangka Menengah

Dalam upaya mencapai Target Pembangunan jangka menengah dalam kondisi yang baik, maka ditetapkan target akhir, tujuan dan sasaran serta target Akhir RPJMD sebagai berikut:

Tabel 5 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	75.65
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4.60
		Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.63
			Harapan Lama Sekolah	8.30
		Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72.87
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.50
	Menurunkan angka kemiskinan		Persentase Angka Kemiskinan	8.04
		Meningkatnya	Persentase Keluarga	71.50

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD
		kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Sejahtera	
	Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusifitas Daerah		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	70
		Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat konduktivitas daerah	73.11
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	82
			IKM	86
			Opini BPK terhadap LKPD	100
			Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.80
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	5
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	6.22
		Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	9
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1393270
Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.44
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	149.04
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Nilai Tukar Petani	105
Peningkatan Infrastruktur dan	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69.30

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD
Konektivitas antar Wilayah		Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	89.69
			Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	100
			Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang	71.42
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	93.15
			Persentase Rumah Layak Huni	82.51
		Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	85
Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah		Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	5.04
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9
Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	65
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	62.97
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	77.68
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	37.42
		Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	90
Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas	Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah		Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	90

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD
Pemuda			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	99
		Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	10
		Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	100
Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa		Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	68.80

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri 2021-2026

2.2 Penyusunan Strategi Perencanaan

Perkembangan kinerja dalam pencapaian target akhir RPJMD tahun tersebut, maka diperlukan strategi-strategi pencapaian perencanaan. Dalam hal ini, strategi pencapaian perencanaan adalah sebagai berikut;

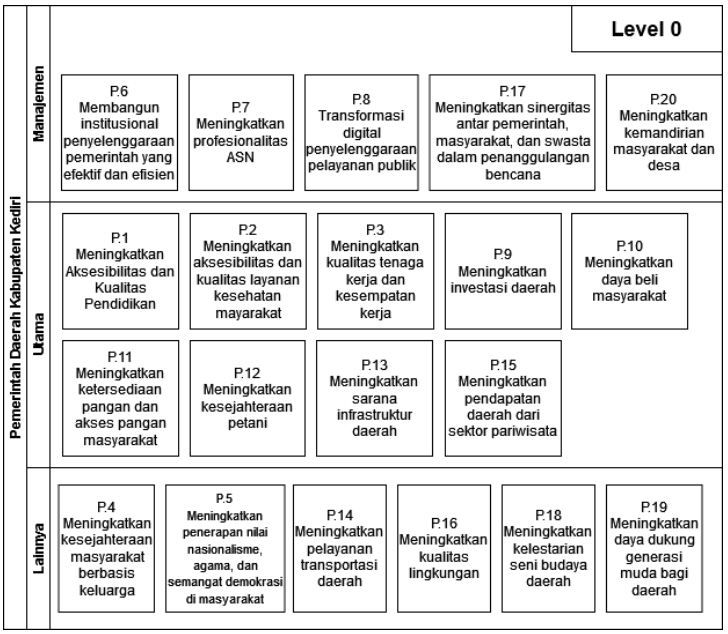
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan pada Tahun 2024 sebagaimana tertulis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;
"Kediri Berdikari dan Menyatu: Akselerasi Pembangunan dan Kondusifitas Sosio-Politik Masyarakat" dengan Strategi:

a. Akselerasi Industrialisasi dan Peningkatan nilai tambah hasil produksi;
b. Keamanan dan kondusifitas politik saat Pilpres dan Pileg.

Proses Bisnis Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024

Peraga 2 Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri



Sumber: Laporan Akhir Peta Proses Bisnis dan Sistem Monev Renstra 2021-2026

Koordinasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/135/418.08/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Kediri disampaikan Koordinasi sebagai berikut;

Pengarah : Bupati Kediri
Koordinator : Sekretaris Daerah
Wakil Koord. I : Asisten Administrasi Umum
Wakil Koord. II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Koord. III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris I : Inspektur
Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Anggota :

1. Kepala BPKAD/BKAD
2. Kepala BKD/BKPSDM
3. Kepala Bidang P4EP Bappeda
4. Inspektur Pembantu Inspektorat
5. Sub-Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi

Penyelarasan Manajemen Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Manajemen lainnya sebagai berikut;

1. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB);
2. Manajemen Risiko dan Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan (SPIP) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3. Monitoring Center for Prevention dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
5. Manajemen Kinerja dan Manajemen Talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Perbaikan Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya untuk memperbaiki Manajemen Akuntabilitas Kinerja dapat disampaikan sebagai berikut;

1. Konsultasi dan Koordinasi dengan Evaluator dari Kementerian PANRB;
2. Konsultasi dan Koordinasi dengan Evaluator dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Biro Organisasi dan Bappeda);
3. Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
4. Konsultasi dan Koordinasi Implementasi SAKIP dengan Akademisi dari Universitas Brawijaya Malang;
5. Menyusun Peta Penjenjangan Kinerja atas Urusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
6. Diklat Peningkatan Kualitas Evaluasi Internal dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Yogyakarta;

Dalam hal tersebut, proses manajemen akuntabilitas kinerja dilaporkan dengan beberapa upaya perbaikan sesuai dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 1 Maret 2024 nomor 000.8.6.3/102/418.07/2024 perihal Penyampaian Data Dukung dan Matriks Tindak Lanjut AKIP Tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 6 Rekomendasi dan Upaya Tindak Lanjut atas LHE AKIP

Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
Mendorong seluruh PD agar menyelaraskan antara perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) dengan perencanaan tahunan (perjanjian kinerja) dengan memanfaatkan Arsitektur Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri dan juga mereviu kembali penetapan target kinerja agar lebih menggambarkan peningkatan/perbaikan capaian kinerja	Mengidentifikasi Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Menyesuaikannya.
Memastikan juga indikator kinerja yang dimiliki sebagian PD agar memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (SMART) serta cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja;	Indikator Kinerja PD telah dievaluasi secara berkala untuk menggambarkan ketercapaian kinerja.
Memastikan kembali penyusunan pohon kinerja pada level PD dan perangkat daerah telah menjabarkan kinerja antar level berdasarkan critical success factor sehingga pohon kinerja yang disusun lebih logis dan menimbulkan hubungan kausalitas antar level kinerja;	Melakukan bimtek dan pendampingan penyusunan Pohon Kinerja
Mendorong adanya refocusing penetapan kinerja program dan kegiatan yang ada agar dapat mengungkit pencapaian kinerja strategis sehingga penggunaan anggaran daerah dapat lebih efektif dan efisien;	Mengarahkan refocusing penetapan kinerja program dan kegiatan agar dapat memenuhi pencapaian kinerja strategis.
Mendorong peningkatan keandalan data kinerja dengan cara memastikan setiap indikator kinerja yang dimiliki didukung dengan formulasi perhitungan yang relevan untuk menggambarkan cara pengukuran keberhasilan indikator kinerja tersebut;	Mendorong PD untuk melakukan/memastikan pengukuran indikator kinerja untuk menggambarkan keberhasilan indikator kinerja.
Mendorong komitmen pada seluruh PD untuk memanfaatkan aplikasi SAKIP dan Kinerja secara optimal dengan menyampaikan update pencapaian kinerja secara berkala dan juga memastikan seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan feedback perbaikan terhadap seluruh capaian kinerja yang ditetapkan;	Mendorong PD untuk melakukan/memastikan pengukuran indikator kinerja untuk menggambarkan keberhasilan indikator kinerja.
Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja individu pada kinerja.kedirikab.go.id sehingga dapat mengidentifikasi hasil kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja di level atasnya dan level organisasi;	1. Identifikasi Permasalahan Penginputan data dalam Aplikasi e-sakip.kedirikab.go.id 2. Menggunakan Aplikasi eSAKIP sebagai Instrument Evaluasi Internal
Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar melakukan perubahan aktivitas dan besaran anggaran sehingga pencapaian realisasi target kinerja bisa terkontrol dengan tepat;	1. Melakukan identifikasi Permasalahan aplikasi kinerja.kedirikab.go.id 2. Menyesuaikan sistem penyusunan SKP individu dengan intervensi SKP atasan 3. Menyesuaikan sistem kinerja dalam aplikasi kinerja.kedirikab.go.id sesuai dengan Matriks Peran Hasil (MPH) yang telah disusun

Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
Menyempurnakan laporan kinerja PD untuk mengungkapkan seluruh informasi pencapaian kinerja yang dimiliki, khususnya terkait analisis keberhasilan dan kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan dan upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan;	Capaian indikator kinerja menjadi dasar perencanaan periode berikutnya
Mengoptimalkan Pemanfaatan Laporan Kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja	1. Rapat Perubahan Target Kinerja yang telah melampaui target akhir RPJMD 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan target yang sudah disesuaikan
Menyempurnakan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP internal dengan mencantumkan temuan temuan permasalahan yang konkret dan memberikan rekomendasi yang tepat sehingga LHE AKIP internal dapat menjadi bahan untuk perbaikan implementasi SAKIP PD ke depan;	Dilakukan rapat koordinasi internal dan membahas temuan temuan hasil evaluasi
Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas yang berikan kepada PD guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan.	Dilakukan monitoring TL pada OPD terkait LHE dengan menggunakan tabel tindak lanjut secara berkala tiap semester

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri disusun dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut;

1. Penyesuaian dan Penentuan Target Ulang apabila Realisasi Tahun 2023 telah melebihi target Tahun 2024;
2. Penyesuaian atas Keuangan Tahun 2024 setelah Perubahan Anggaran;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024 telah dibubuhkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana sub-bab selanjutnya.

2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Kediri tanggal 6 September 2024 (sebagaimana terlampir dalam lampiran) disampaikan target-target Perjanjian Kinerja sebagai berikut;

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.

Jabatan : Bupati Kediri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bupati Kediri,

H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri *0*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	74,68
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0
		Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,62
			Harapan Lama Sekolah	8,24
		Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,85
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,1
	Menurunkan angka kemiskinan		Persentase Angka Kemiskinan	9,8
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86
		Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat konduktivitas daerah	100%
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	75
			IKM	86.35
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP
			Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.74
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.30
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan	Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4,80

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
Investasi Daerah		Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1145155
Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3,03
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,10
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Nilai Tukar Petani	104,44
Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80,23 (68.10)
		Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	80,53
			Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,50%
			Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%
			Persentase Rumah Layak Huni	49,67%
		Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86,59
Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah		Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	9,79
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%
Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	64,42

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
Alam dan Mitigasi Bencana				
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	62.97
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,12
			Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	40,49
		Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	83
Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah		Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98,11
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89
		Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	35,86%
		Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	90%
Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa		Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,75
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84,55%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri

Rencana Kerja Anggaran - Perubahan

Program	Anggaran	
DINAS PENDIDIKAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	6.713.062.351,00
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	311.631.153.200,00
Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	322.850.600,00
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	23.489.956.800,00
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp.	33.129.800,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	80.009.900,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	1.411.914.300,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**343.682.076.951,00**
DINAS KESEHATAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	100.936.675.581,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	208.167.999.380,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	2.194.316.400,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kasehatan dan Makanan Minuman	Rp.	656.119.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.245.123.100,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**313.200.233.461,00**
RSUD KABUPATEN KEDIRI		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	306.600.000.000,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	7.730.751.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**314.330.751.000,00**
RSUD SLG		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	104.664.461.387,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	1.400.000.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp .**	**106.064.461.387,00**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.191.118.900,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	110.193.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	2.813.948.940,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	22.070.590.483,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	57.930.400,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	269.537.000,00
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp.	10.061.600,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	219.208.300,00
	Rp.	43.798.000,00

Program	Anggaran	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	111.440.200,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	13.535.972.355,00
Program Pengelolaan Persampahan		
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**41.433.799.178,00**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp.	4.740.395.775,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	25.366.418.024,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	112.204.982.111,00
Program Penyelenggaraan Penantaan Ruang	Rp.	1.199.674.300,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**143.511.470.210,00**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.966.256.079,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	360.000.000,00
Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	431.391.600,00
Program pelayanan Penanaman Modal	Rp.	781.411.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	669.598.300,00
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	193.108.400,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**4.401.765.379,00**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.275.751.900,00
Program Penataan Desa	Rp.	19.115.800,00
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	34.108.300,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	8.475.423.600,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	2.801.756.400,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**12.606.156.000,00**
DP2KBP3A		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	2.213.972.755,00
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	29.508.000,00
Program Perlindungan Perempuan	Rp.	8.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	145.492.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	115.999.600,00
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	261.500.000,00
Program Perlindungan Penduduk	Rp.	1.675.897.450,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	15.158.129.950,00
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	9.200.914.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**28.809.913.755,00**
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.825.661.739,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp.	12.720.000,00

Program	Anggaran	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	2.371.745.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	34.454.800,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	171.297.600,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	13.029.056.700,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	109.620.310,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	1.274.859.800,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	90.944.600,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**18.920.360.549,00**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.458.616.400,00
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	7.730.469.100,00
Program Aplikasi Informatika	Rp.	5.187.306.000,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	494.139.700,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	719.000.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**17.589.531.200,00**
DINAS SOSIAL		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.878.622.498,00
Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	1.557.972.800,00
Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	2.832.936.342,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	27.592.448.900,00
Program Penanganan Bencana	Rp.	393.636.200,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	233.171.400,00
Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	6.130.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**34.494.918.140,00**
DINAS TENAGA KERJA		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	866.146.255,00
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.	62.541.500,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	10.692.349.179,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	969.819.600,00
Program Hubungan Industrial	Rp.	553.699.400,00
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	55.196.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**13.199.751.934,00**
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.496.342.868,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	12.348.115.112,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	11.069.655.000,00
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	540.361.700,00
Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.801.958.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**28.256.432.680,00**
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

Program	Anggaran	
Program Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	4.908.562.765,00
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	31.359.130,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	6.420.810.725,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	17.493.148.696,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.169.140.370,00
Program Kawasan Permukiman	Rp.	2.914.850.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	48.330.663.214,00
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp.	7.500.000,00
Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp.	289.000.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**88.565.034.900,00**
DINAS PERIKANAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.212.213.300,00
Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Rp.	2.053.516.200,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	23.989.000,00
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	292.044.800,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**3.581.763.300,00**
DINAS PERHUBUNGAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	556.251.200,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp.	12.537.857.984,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**13.094.109.184,00**
DINAS PERDAGANGAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.970.266.025,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	5.041.847.765,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	338.188.664,00
Program Pengembangan Ekspor	Rp.	694.630.000,00
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	113.711.528,00
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp.	0,00
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	1.488.085.448,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	16.520.000,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**10.663.249.430,00**
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.315.906.224,00
Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	2.940.000.000,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	4.672.563.175,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	482.746.000,00
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	3.907.772.500,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	1.131.272.833,00
Program Pembinaan Sejarah	Rp.	580.070.000,00
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	1.089.452.500,00
Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	235.000.000,00

Program	Anggaran	
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**22.354.783.232,00**
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	498.533.600,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	871.206.660,00
Program Pengelolaan Arsip	Rp.	475.350.007,00
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp.	24.173.300,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**1.869.263.567,00**
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.270.021.042,00
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	151.469.200,00
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	20.213.400,00
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	112.800.300,00
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	1.330.224.646,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2.414.674.900,00
Program Pengembangan UMKM	Rp.	1.976.355.600,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**11.275.759.088,00**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.177.632.439,00
Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	2.483.674.560,00
Program Pencatatan Sipil	Rp.	823.275.000,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	796.175.000,00
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	8.500.200,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**7.289.257.199,00**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	810.277.500,00
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	9.188.762.600,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non-Kebakaran	Rp.	1.372.066.000,00
	Rp.	**11.371.106.100,00**
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.766.684.996,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	703.376.410.657,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah Program	Rp.	7.463.766.900,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**713.606.862.553,00**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.114.016.927,00
Program Penanggulangan Bencana	Rp.	2.224.014.400,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**5.338.031.327,00**

Program	Anggaran	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. Rp. Rp.	2.152.425.231,00 2.171.291.400,00 2.222.671.650,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**6.546.388.281,00**
BADAN PENDAPATAN DAERAH		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. Rp.	3.638.051.904,00 6.298.229.881,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**9.936.281.785,00**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. Rp.	395.127.200,00 1.479.494.800,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**1.874.622.000,00**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	980.740 200,00 1.575.041.700,00 10.101.980.000,00 1.574.557.700,00 66.152.935.800,00 967.063.900,00
INSPEKTORAT		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. Rp. Rp.	3.042.707.000,00 186.698.000,00 1.394.856.400,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**4.624.261.400,00**
SEKRETARIAT DPRD		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. Rp.	8.650.730.020,00 35.311.508.700,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**43.962.238.720,00**
SEKRETARIAT DAERAH		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan Perbatasan	Rp. Rp. Rp. Rp.	62.354.647.326,00 40.636.923.431,00 18.883.113.275,00 31.576.000,00

Program	Anggaran	
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**121.906.260.032,00**
KECAMATAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.546.405.448,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	248.310.698,00
Program Pemberdayaaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	2.389.568.674,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	83.740.368,00
Program Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	1.296.879.100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp.	998.646815,00
Jumlah Anggaran	**Rp.**	**10.563.551.103,00**
Total Anggaran	**Rp.**	**2.595.088.075.471,00**



Gambar 6 Bupati Kediri bersama dengan Gubernur dan Pimpinan Daerah sekitar meninjau kesiapan Bandara Dhoho (Sumber Dinas Kominfo)

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
3.3 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah
3.4 Analisa Efisiensi
3.5 Benchmarking
3.6 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
3.7 Analisa Kinerja
   a. Latar Belakang
   b. Upaya Pencapaian Kinerja
   c. Hasil Kinerja
   d. Pihak yang Terlibat
   e. Faktor-faktor Pendukung
   f. Faktor-faktor Penghambat
   g. Rencana Tindak Lanjut

Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2023. Hasil kinerja ini akan diperbandingkan, dianalisa, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah disusun dan dilampirkan dalam bab sebelumnya. Dalam mengukur persentase capaian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Persentase capaian meningkat (positif)
   Rumus persentase capaian positif digunakan untuk mengukur target yang meningkat adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

2. Persentase capaian menurun (negatif)
   Rumus persentase capaian negatif digunakan untuk mengukur target yang menurun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target}\ x\ 100$$

Dalam menentukan keberhasilan capaian kinerja dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri, skala kategori capaian yang digunakan sebagai berikut:

No	Rentang Capaian (%)	Kategori
1	≥ 100	Sangat Baik
2	80 ≤ x < 100	Baik
3	60 ≤ x ≤ 80	Cukup Baik
4	60 <	Kurang Baik

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

Tabel 8 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori	Rujukan Data
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**							
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74.68	75.18	100.67%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
			Tingkat Pengangguran Terbuka (Perhitungan Menurun)	5	5.1	98.00%	Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.63	100.07%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
			Rata-rata lama sekolah	8.24	8.26	100.24%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	74.85	75.07	100.29%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1	71.31	100.30%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori	Rujukan Data
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (Perhitungan Menurun)	9.8	9.95	98.47%	Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 1/07/3506/Th.V 29 Juli 2024 sebagaimana termaktub dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri Tahun 2024 hal 63
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	Sangat Baik	Data Hasil Survei Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86	79	101.46%	Sangat Baik	Laporan Akhir Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Kediri
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100.00%	Sangat Baik	Rekapitulasi Kondusivitas Daerah Kabupaten Kediri
	Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik							
4	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77	85.99*	111.68%	Sangat Baik	Surat Menteri PANRB tanggal 26 Februari 2025 nomor B/43/RB.04/2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024 Hasil Evaluasi Sementara Indeks RB Tahun 2024
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	75	67.11	89.48%	Baik	Surat Menteri PANRB tanggal 3 September 2024 nomor B/284/AA.05/2024

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori	Rujukan Data
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86.35	88.74	102.77%	Sangat Baik	Surat Kabupaten Kediri Nomor 000.8.3.4/267/418.07/2024 Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024
			Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Sangat Baik	LHP BPK melalui data yang disampaikan BPKAD Kabupaten Kediri
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.74	3.85	102.94%	Sangat Baik	Berita Resmi Statistik nomor No. 53/07/Th. XXVII, 15 Juli 2024
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	Sangat Baik	Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya tanggal 9 Oktober 2024 Nomor /B-AK.04/SD/KR.II/2024
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.3	4.62	107.44%	Sangat Baik	Keputusan MenPANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kediri Tahun 2024
	Misi 3 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah							
5	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.8	4.95	103.13%	Baik	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 640
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7%	29.99%	428.43%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2024 Kabupaten Kediri
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,145,155	1,032,333	90.15%	Baik	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori	Rujukan Data
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**							
6	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3.03	-1.73	-57.10%	Kurang Baik	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 639
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146.1	146.44	100.23%	Sangat Baik	Data Ketersediaan Pangan Beras Tahun 2024
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104.44	104.69	100.24%	Sangat Baik	Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kediri
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**							
7	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68.1	69.84	102.56%	Sangat Baik	Laporan Akhir Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80.50%	87.00%	108.07%	Sangat Baik	Data Survei Kondisi Jalan dari Bidang PT
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	70.50%	80.79%	114.60%	Sangat Baik	Data dari Bidang OPD SDA
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%	100.00%	133.33%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Data dari Bidang Penataan Ruang
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	86%	86.08%	100.09%	Sangat Baik	Hasil data diolah Dinas Perkim
			Persentase Rumah Layak Huni	49.67%	53.55%	107.81%	Sangat Baik	Hasil data diolah Dinas Perkim
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.59	87.44	100.98%	Sangat Baik	Hasil Perolehan Aplikasi e-Sukma Jatim (Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dishub 2024)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori	Rujukan Data
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**							
8	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9.79	9.7	99.08%	Baik	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 639
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10.95%	219.00%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Data Rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**							
9	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.42	70.49	109.42%	Sangat Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2024
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	62.97	100.00%	Sangat Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2025
			IKU	86.12	94.31	109.51%	Sangat Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2026
			IKL	40.49	39.34	97.16%	Baik	Profil Indeks Kualitas Hidup kabupaten Kediri 2027
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (Perhitungan Menurun)	97.59	97.89	99.69%	Baik	Surat BPBD Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2025 nomor 360/0312/208.2/2025
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**							
10	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89	60	67.42%	Cukup Baik	Data Kelompok Olahraga dan Kelompok Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kediri

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Kategori	Rujukan Data
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98.11%	98.21%	100.10%	Sangat Baik	Data Rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	90%	65.28%	72.53%	Cukup Baik	Data Prestasi Atlit Kabupaten Kediri Tahun 2024
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35.68%	56.65%	158.77%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)	Data Rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**							
11	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75	0.78	104.00%	Sangat Baik	Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2025
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	84.55%	94.46%	111.72%	Sangat Baik	Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2025

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**											
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,358	73,46	100,14%	73.46	74.68	101.66%	74.68	75.18	100.67%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5	6,83	136,6 %	4.95	5.79	83.03%	5	5.1	98.00%
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,25	13,61	102,72%	13.61	13.62	100.07%	13.62	13.63	100.07%
			Rata-rata lama sekolah	8,10	8,23	101,60%	8.23	8.24	100.12%	8.24	8.26	100.24%
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72,61	72,97	100,4%	72.97	74.85	102.58%	74.85	75.07	100.29%
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,9%	68,73%	96,93%	71	68.74	96.82%	71.1	71.31	100.30%
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9,832	10,65	91,68%	9.385	10.72	85.78%	9.8	9.95	98.47%
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	71,11%	70,8%	99,56%	71.61	84.78	118.39%	84.78%	90.05%	106.22%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	60%	76,71	127,68%	76.61	77.86	101.63%	77.86	79	101.46%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68	65,66	96,55%	72	77	106.94%	77	85.99*	111.68%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	69,5	68,33	98,3%	70.5	68.21	96.75%	75	67.11	89.48%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,77	102,10%	85.77	86.35	100.68%	86.35	88.74	102.77%
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100%	WTP	WTP*	100.00%	WTP	WTP*	100.00%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,49	94,32%	3.72	3.49	93.82%	3.74	3.85	102.94%
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	60	54,91	91,5%	63	70.1	111.27%	70.1	81.62	116.43%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.04	2.61	64,60%	4.28	4.27	99.77%	4.3	4.62	107.44%
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	2.34	4.9	209,40%	4.9	4.53	92.45%	4.8	4.95	103.13%
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	5%	28,48%	569,6%	28%	26.16%	93.43%	7%	29.99%	428.43%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.062.451	963.75	90.71%	1.145.155	996	86.98%	1,145,155	1,032,333	90.15%
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.43	0.02	4,65%	0.43	3.03	704.65%	3.03	-1.73	-57.10%
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	143,22	117.48	82.03%	144.65	128.08	88.54%	146.1	146.44	100.23%
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103	103.5	100.40%	103.5	104.44	100.91%	104.44	104.69	100.24%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**											
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,90	66,82	99%	67.5	66.9	99.11%	68.1	69.84	102.56%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	88,17	87,99	99,79%	88.91%	79.08%	88.94%	80.50%	87.00%	108.07%
			Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	77,12	74,68	96,83%	81.10%	69.18%	85.30%	70.50%	80.79%	114.60%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	62,50	50	80%	62.50%	62.50%	100%	75%	100.00%	133.33%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	78,28%	85,23%	108,87%	82%	86%	104.88%	86%	86.08%	100.09%
			Persentase Rumah Layak Huni	16,48%	29,95%	181,72%	29.95%	41.14%	137.36%	49.67%	53.55%	107.81%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	65	86	132,30%	86	86.59	100.69%	86.59	87.44	100.98%
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	1.41	14.52	1029,78%	12.4	9.79	78.95%	9.79	9.7	99.08%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	1%	94,59%	9459,00%	95%	70.74%	74.50%	5%	10.95%	219.00%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53	64.79	122,2%	64.79	67.42	104.06%	64.42	70.49	109.42%
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,77	62,22	99,12%	62.82	62.97	100.24%	62.97	62.97	100.00%
			IKU	77,5	80,94	104,43%	80.94	86.12	106.40%	86.12	94.31	109.51%
			IKL	37,42	39,34	105,13%	39.34	40.49	102.92%	40.49	39.34	97.16%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	123,59	112,47	109,00%	112.47	104.53	107.06%	97.59	97.89	99.69%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	79,00	73,96	93,62	83,00	57.3	69.04%	89	60	67.42%
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	82%	37,65%	45,91%	84%	98.11	116.79%	98.11%	98.21%	100.10%

No		Keterangan	Indikator	Capaian 2022			Capaian 2023			Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	6%	25,57%	426,16%	85%	59.50%	70.00%	90%	65.28%	72.53%
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	80,00%	58,26%	72,83%	25.57%	35.86%	140.24%	35.68%	56.65%	158.77%
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**											
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,71	0,73	102,81%	0.73	0.75	103%	0.75	0.78	104.00%
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	40,82	63,56	155,70%	63.56	84.55	133%	84.55%	94.46%	111.72%

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET AKHIR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tabel 10 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD

No		Keterangan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	75.65	75.18	99.38%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4.6	5.1	89.13%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.65	13.63	99.85%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Rata-rata lama sekolah	8.3	8.26	99.52%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	72.87	75.07	103.02%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.5	71.31	99.73%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
2	**Tujuan:**	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	8.04	9.95	76.24%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	73.11%	90.05%	123.17%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
3	**Tujuan:**	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	70	79	112.86%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

No		Keterangan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian	Keterangan
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85.99*	107.49%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	82	67.11	81.84%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88.74	103.19%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
			Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.8	3.85	101.32%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71	81.62	114.96%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	5	4.62	92.40%	Target Akhir RPJMD belum Terlampaui
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6.22	4.95	79.58%	Target Akhir RPJMD belum Terlampaui
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	9%	29.99%	333.22%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,393,267	1,032,333	74.09%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

No		Keterangan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian	Keterangan
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.44	-1.73	-393.18%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	149.04	146.44	98.26%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	104.69	99.70%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**						
1	**Tujuan:**	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69.3	69.84	100.78%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	89.69%	87.00%	97.00%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	100.00%	80.79%	80.79%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	71.42%	100.00%	140.02%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	93.15%	86.08%	92.41%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Persentase Rumah Layak Huni	82.51%	53.55%	64.90%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.25	87.44	101.38%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	5.04	9.7	192.46%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

No		Keterangan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian	Keterangan
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9%	10.95%	121.67%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65	70.49	108.45%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	62.97	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai
			IKU	77.68	94.31	121.41%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
			IKL	37.42	39.34	105.13%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	116.32	97.89	115.84%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**						
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	99	60	60.61%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	90%	98.21%	109.12%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	100%	65.28%	65.28%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	10%	56.65%	566.50%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

No		Keterangan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian	Keterangan
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**						
1	**Tujuan:**	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75	0.78	104.00%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	68.80%	94.46%	137.30%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

3.4 Analisa Efisiensi Sumber Daya

Analisa efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan cara dalam mencapai target dalam menjalankan sesuatu dengan memperhatikan waktu, tenaga, biaya. Analisa dalam hal ini menggunakan pendekatan perbandingan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Hasil perbandingan tersebut dikategorisasikan menggunakan pendekatan jika perhitungan efisiensi menghasilkan angka lebih dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut efisien. Namun jika perhitungan yang dihasilkan kurang dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut tidak efisien.

Efisiensi merupakan hal penting untuk meninjau proses yang telah dilaksanakan. Dari analisa efisiensi tersebut menggambarkan ketepatan dalam sisi manajemen waktu, tenaga yang terfokus, dan penggunaan biaya yang sesuai. Apabila hasil analisa masuk kedalam kategori efisien, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kinerja tersebut memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi, ketepatan tenaga, dan ketepatan alokasi biaya yang tinggi. Namun, apabila hasil analisa masuk kedalam kategori tidak efisien maka didapati adanya proses pelaksanaan kinerja yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang rendah, ketepatan tenaga yang rendah, serta ketepatan alokasi biaya yang rendah.

Kendati demikian, tidak mengesampingkan pula terdapatnya faktor-faktor eksternal yang berdampak besar terhadap pencapaian kinerja. Baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif, diluar proses internal yang telah dilaksanakan. Oleh karena demikian, faktor-faktor eksternal tersebut turut dijadikan variabel pencapaian kinerja disamping faktor-faktor proses pelaksanaan kinerja secara internal. Faktor penunjang dan penghambat tersebut dijelaskan dalam penjelasan pelaksanaan sasaran strategis.

Analisa efisiensi Sumber Daya diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

Rentang kategorisasi yang digunakan adalah apabila hasil analisa ≥ 0 maka dapat dikategorikan efisien dengan syarat capaian kinerja harus minimal 100% atau harus efektif, apabila hasil analisa ≥ 0 namun capaian kinerja kurang dari 100%, maka masuk kategori tidak efektif. Apabila hasil analisa berada ≤ 0 maka masuk kategori tidak efisien.

Dalam penentuan efisiensi, terdapat prasyarat yakni dengan capaian kinerja minimal atau lebih dari 100%, jika capaian kinerja kurang dari 100% maka capaian tersebut dianggap tidak efektif dan tidak dapat diukur dalam perhitungan efisiensi kinerja.

Analisa efisiensi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 terdapat dalam tabel dalam matrikulasi berikut:

ANALISA EFISIENSI
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tabel 11 Analisa Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**									
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.63	100.07%	312,211,153,200.00	301,318,175,007.00	96.51%	3.56%	Efisien
		Rata-rata lama Sekolah	8.24	8.26	100.24%					
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74.85	75.07	100.29%	186,687,674,880.00	175,148,128,063.00	93.82%	6.48%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1	71.31	100.30%	16,458,146,234.00	16,193,289,855.00	98.39%	1.90%	Efisien
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	30,604,155,552.00	28,166,617,946.00	92.04%	14.18%	Efisien
5	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100.00%	10,101,980,000	10,092,850,434	99.91%	0.09%	Efisien
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**									
6	Membangun Institusional Pemerintahan	Nilai SAKIP	75	67.11	89.48%	740,395,029,749.00	729,180,657,640.00	98.49%	0.31%	Tidak Efektif (<100%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86.35	88.74	102.77%					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	yang Efektif dan Bersih	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100.00%					
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.74	3.85	102.94%					
7	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	12,338,157,561.00	11,288,326,422.00	91.49%	24.94%	Efisien
8	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.52	4.62	102.21%	5,187,306,000.00	5,079,466,720.00	98%	4.29%	Efisien
	Misi 3 **Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**									
9	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan investasi daerah	7%	29.78%	425.45%	7,869,748,279.00	7,417,337,605.00	94.25%	331.20%	Efisien (Diatas Ekspektasi)
10	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,227,859	1,032,333	84.08%	26,221,565,498.00	25,440,326,428.00	97.02%	-12.94%	Tidak Efisien
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**									
11	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146.1	146.44	100.23%	4,090,217,400.00	4,071,769,350.00	99.55%	0.68%	Efisien
12	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104	104.65	100.62%	66,375,730,892.00	64,616,329,418.00	97.35%	3.27%	Efisien
	Misi 5 **Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**									

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
13	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80.50% (PK) / 89.16%	87.00%	97.58%	97,901,983,165.00	94,277,649,241.00	96.30%	4.90%	Efisien
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	70.50% (PK) / 86.01%	80.79%	93.93%					
		Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75% (PK) / 100%	100.00%	100.00%					
		Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%	86%	100.10%					
		Persentase Rumah Layak Huni	49.67%	53.55%	114.74%					
14	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86.59 (PK)/86.70	87.44	100.85%	855,134,124.00	841,095,680.00	98.36%	2.49%	Efisien
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**									
15	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10.95%	219.00%	15,789,352,019.00	15,362,048,485.00	97.29%	121.71%	Efisien (Diatas Ekspektasi)
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**									

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
16	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.87	62.97	100.16%	39,242,680,278.00	34,686,776,701.00	88.39%	13.89%	Efisien
		IKU	86.12	94.31	109.51%					
		IKL	40.49	39.34	97.16%					
17	Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	97.59	97.89	99.69%	5,338,031,327.00	4,119,363,699.00	77.17%	22.52%	Tidak Efektif
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**									
18	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	90%	65.28%	72.53%	1,491,924,200.00	1,336,260,550.00	89.57%	-17.03%	Tidak Efektif
19	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35.68%	56.65%	158.77%	6,943,567,833.00	6,877,835,399.00	99.05%	59.72%	Efisien (Diatas Ekspektasi)
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**									
20	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84.55%	94.46%	111.72%	17,012,033,080.00	16,137,059,528.00	94.86%	16.86%	Efisien

PERBANDINGAN DATA KINERJA (*BENCHMARKING*) TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tabel 12 Benchmarking Data Kinerja Tahun 2024

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**							
1	**Tujuan:**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	75.18	74.09	74.20	BPS https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html	Provinsi (+) Nasional (+)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5.1	4.19	4.91	BPS https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.63	13.43	13.2	BPS dalam Penyamapaian Dinas Pendidikan	Provinsi (+) Nasional (+)
			Rata-rata lama sekolah	8.26	8.28	8.85	BPS dalam Penyampaian Dinas Pendidikan	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75.07	72.35	72.39	BPS dalam Penyamapaian Dinas Kesehatan https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0IzI=/-metode-baru--umur-harapan-hidup-saat-lahir--uhh-.html	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.31	73.45	71.1	BPS dalam Penyampaian Dinas Tenaga Kerja	Provinsi (-) Nasional (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
2	**Tujuan:**	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9.95	9.79	8.75	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-kabupaten-kota.html https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	90.05	90.21	90.97	Data diolah DP2KBP3A	Provinsi (-) Nasional (-)
3	**Tujuan:**	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	82.01*	79.51*	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	No Data	No Data	-	Provinsi (=)
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**							
4	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	85.99	No Data	No Data	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	67.81	A	No Data	Kementerian PAN & RB dalam Penyampaian Bagian Organisasi	Provinsi (-)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88.74	88.42	No Data	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyampaian Bagian Organisasi	Provinsi (+) Nasional (-)
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	No Data	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Penyampaian BPKAD	Provinsi (=)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.85	No Data	3.85	BPS dalam Penyampaian Inspektorat	Nasional (=)
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81.62	89.59	No Data	BKN dalam Penyampaian BKD	Provinsi (-)
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.62	4.43	4.75	Kementerian PAN & RB dalam Penyampaian Dinas Kominfo	Provinsi (+) Nasional (-)
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**							
5	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.95	4.93	5.03	BPS dalam Kabupaten Kediri dalam Angka, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 12/02/35/Th. XXIII, 5 Februari 2025, Berita Resmi Statistik Nasional No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29.78%	1.52%	20.81%	Kementerian Investasi/BKPM dalam Penyampaian DPMPTSP	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,032,333.00	1,071,000.00	1,028,417.00	BPS dalam Penyampaian Dinas Perdagangan	Provinsi (-) Nasional (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**							
6	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	-1.73	0.07	0.67	BPS dalam Kabupaten Kediri dalam Angka, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 12/02/35/Th. XXIII, 5 Februari 2025, Berita Resmi Statistik Nasional No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146.44	129.14	108.33	Data Pengolahan DKPP Kabupaten Kediri dengan Asumsi Data Produksi Pangan Utama dibagi Jumlah Penduduk	Provinsi (+) Nasional (+)
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104.65	111.96	116.79	BPS dalam Penyampaian Dinas Pertanian dan Perkebunan	Provinsi (-) Nasional (-)
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**							
7	**Tujuan:**	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69.84	No Data	No Data		
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87.00%	56.68*	39.38*	https://indonesiabaik.id/infografis/seberapa-panjang-jalan-nasional-kita https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/775470452/bps-kondisi-kemantapan-jalan-nasional-di-provinsi-jatim-sangat-baik	Provinsi (+) Nasional (+)
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80.79%	68.95%*	-	LKJIP 2023 DPUSDA Prov Jatim dalam https://dpuair.jatimprov.go.id/asset/dokumen/wny9D-LKjIP%202023%20Dinas%20PUSDA.pdf - Hal 26	Provinsi (+)
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100.00%	No Data	No Data	-	

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86.08%	96.93%	91.72%	Dinas PRKPCK Jawa Timur dan Kementerian PUPR dalam Penyampaian Dinas Perkim	Provinsi (-) Nasional (-)
			Persentase Rumah Layak Huni	65.25%	73.40%	65.25%	Dinas PRKPCK Jawa Timur dan Kementerian PUPR dalam Penyampaian Dinas Perkim	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87.44	91.46	No Data	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur dalam Ekspose Nilai IKM melalui https://sukma.jatimprov.go.id/fe/pd?tahun=2024	Provinsi (-)
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**							
8	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.7	6.98	8.56	BPS dalam Kabupaten Kediri dalam Angka, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 12/02/35/Th. XXIII, 5 Februari 2025, Berita Resmi Statistik Nasional No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025	Provinsi (+) Nasional (+)
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10.95%	No Data	No Data	-	
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**							
9	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	70.49	71.14	73.55	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	54.75	54.75	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (+) Nasional (+)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
			IKU	94.31	88.09	90.18	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (+) Nasional (+)
			IKL	39.34	49.3	62.01	Kementerian LHK dalam Penyampaian DLH	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	97.89	95.75	No Data	BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam Penyampaian BPBD	Provinsi (+)
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**							
10	**Tujuan:**	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	60	No Data	No Data	-	
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98.21%	No Data	No Data	-	
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65.28%	No Data	No Data	-	
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	56.65%	No Data	No Data	-	
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**							
11	**Tujuan:**	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.78	No Data	No Data	Kementerian Desa & PTT dalam Penyampaian DPMPD Kabupaten Kediri	

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Rujukan Data	Keterangan
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94.46%	89.92%	53.50%	Kementerian Desa & PTT dalam Penyampaian DPMPD Kabupaten Kediri	Provinsi (+) Nasional (+)

ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tabel 13 Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**								
1	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Sangat Baik	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	40,00%	16,31%	40,78%	Kurang Mendukung
					Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	55,00%	58,59%	106,53%	Sangat Mendukung
					Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	57,00%	84,34%	147,96%	Sangat Mendukung
					Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,00%	78,68%	224,80%	Sangat Mendukung
					Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	20,00%	83,02%	415,10%	Sangat Mendukung
					Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	55,00%	97,37%	177,04%	Sangat Mendukung
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	40,00%	61,29%	153,23%	Sangat Mendukung
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1:16	1:17	98,70%	Mendukung
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Sangat Baik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	35%	35.00%	Kurang Mendukung
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. ALKES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	100%	133.33%	Sangat Mendukung
					PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	75%	100%	133.00%	Sangat Mendukung
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	68%	41%	60.29%	Cukup Mendukung
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	87%	87%	100.00%	Sangat Mendukung
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Sangat Baik	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	59%	83.23%	141.07%	Sangat Mendukung
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	14%	15.53%	110.93%	Sangat Mendukung
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	95%	91.43%	96.24%	Mendukung
				Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	9%	5.29%	58.78%	Kurang Mendukung
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	14.29%	142.90%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Sangat Baik	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi masyarakat yang diberdayakan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran korban kekerasan yang ditangani	100%	9%	9%	Kurang Mendukung
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang direhabilitasi	100%	96%	96%	Mendukung
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	98%	98%	Mendukung
				Program Penanganan Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100%	87%	87%	Mendukung
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	98%	98%	Mendukung
				Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet need	10.29	7.9	76.77%	Cukup Mendukung
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 32.98% BKR 28.26% BKL 36.32%	BKB 35.87% BKR 30.15% BKL 37.09%	105.85%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Sangat Baik	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85%	100%	118%	Sangat Mendukung
				Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	90%	90%	Mendukung
				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	80%	98%	123%	Sangat Mendukung
				Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	80%	87%	109%	Sangat Mendukung
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	90%	100%	111%	Sangat Mendukung
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**								
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota					

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan tahunan daerah	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
				Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan analissi data dan informasi daerah	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
				Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah bahan kebijakan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100.00%	Sangat Mendukung
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	100%	113.09%	113.09%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100%	237.65%	237.65%	Sangat Mendukung
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100%	242.22%	242.22%	Sangat Mendukung
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	300.00%	300.00%	Sangat Mendukung
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	4.17%	4.17%	Mendukung
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang tersusun	100%	94.59%	94.59%	Mendukung
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	53%	53.00%	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%	71%	71.00%	

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Sangat Baik	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29.82	30.47	102.18%	Sangat Mendukung
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	36.18	51.65	142.76%	Sangat Mendukung
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Sangat Baik	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	4.5	4.62	102.67%	Sangat Mendukung
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	2.5	125.00%	Sangat Mendukung
				Program Penyeenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3	3.1	103.33%	Sangat Mendukung
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	4	4.2	105.00%	Sangat Mendukung
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**								
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Sangat Baik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100%	Sangat Mendukung
				Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	82%	122.15%	149%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Baik	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	17.36%	13.37%	77%	Cukup Mendukung
				program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	1.71%	1.15%	67%	Cukup Mendukung
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	0.20%	0.16%	80%	Mendukung
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	33.67%	34.49%	102%	Sangat Mendukung
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	26.02%	24.41%	94%	Mendukung
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	9.87%	8.42%	85.31%	Mendukung
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	50%	100.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	90%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	90%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.93%	1.93%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	15%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%	100.00%	Sangat Mendukung
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**								
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Sangat Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	100.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
					Skor Pola Pangan Harapan	95	91.2	96.00%	Mendukung
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan desa rentan pangan	1 Peta	1 Peta	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	79%	100%	126.58%	Sangat Mendukung
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Sangat Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok tani yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
					Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	82.21%	82.21%	100%	Sangat Mendukung
					Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	60	60	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jaringan Irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik	74%	74%	100%	Sangat Mendukung
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulagngan bencana pertanian (Serangan OPT)	100%	98%	98%	Sangat Mendukung
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembesaran (ton)	24565	24687	100.50%	Sangat Mendukung
					Ikan Hias (ribu ekor)	387636	388412	100.20%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
					Benih (juta ekor)	21437	21544	100.50%	Sangat Mendukung
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	47	47	100.00%	Sangat Mendukung
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**								
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Sangat Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1,091.50	1,065.01	97.57%	Mendukung
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	150,370.42	141,246.12	93.93%	Mendukung
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diselesaikan	3	3	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	86%	86.06%	100.07%	Sangat Mendukung
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	72.22%	72.22%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	18.67	41.11	220.19%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin	49.67%	53.55%	107.81%	Sangat Mendukung
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Sangat Baik	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan PKB	21	21	100.00%	Sangat Mendukung
	Misi 6 Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal								
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Sangat Baik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	10%	10.46%	104.60%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	0.08	2.752	3440.00%	Sangat Mendukung
				Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1	1	100.00%	Sangat Mendukung
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**								
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Sangat Baik	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	83%	83.33%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	78.57%	66.67%	84.85%	Mendukung
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	0.045	0.0364	80.89%	Sangat Mendukung
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	274	274	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	72%	88.89%	123.46%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	50%	0	0	Kurang Mendukung
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	24.02%	71.13%	296.13%	Sangat Mendukung
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	4	1	25.00%	Kurang Mendukung
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	87.50%	100%	296.13%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	75.67%	31.67%	25.00%	Kurang Mendukung
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulanga n Bencana	Baik	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	100%	97.22%	97.22%	Mendukung
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**								

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Cukup Baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	53,00%	60,00%	113,21%	Sangat Mendukung
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	70,00%	68,00%	97,14%	Mendukung
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Sangat Baik	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan grup kesenian yang diberdayakan	20%	82.82%	414.10%	Sangat Mendukung
				Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	36%	21.73%	60.36%	Cukup Mendukung
					Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	20%	50%	250.00%	Sangat Mendukung
				Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarpras museum yang dipelihara	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**								
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Sangat Baik	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan anar desa dan pihak ketiga	343	343	100.00%	Sangat Mendukung

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam menjalankan manajermen pemerintahan	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	343	343	100.00%	Sangat Mendukung



Analisa Kinerja

a) Latar Belakang
b) Upaya Pencapaian Kinerja
c) Hasil Kinerja
d) Pihak yang Terlibat
e) Faktor-faktor Pendukung
f) Faktor-faktor Penghambat
g) Rencana Tindak Lanjut



Gambar 7 Bupati Kediri bercengkrama bersama murid SMP (Sumber Diskominfo)

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Pada tahun 2020-2024 status pembangunan manusia Kabupaten Kediri sudah berada di level "tinggi". Selama tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Kediri rata-rata meningkat sebesar 0,81 persen per tahun, dari 72,80 pada tahun 2020 menjadi 75,18 pada tahun 2024. Perkembangan IPM Kabupaten Kediri selama tahun 2020–2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPPBB) pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia (LPM) setiap tahunnya. IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	74.68	75.18	100.67%	Sangat Baik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	5.1	98.00%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Indeks Pembangunan Manusia	Diukur oleh BPS	75.18	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Tingkat Pengangguran Terbuka	Diukur oleh BPS	5.1	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri

Dalam Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri dijelaskan sebagai berikut Pembangunan manusia di Kabupaten Kediri terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020-2024 status pembangunan manusia Kabupaten Kediri sudah berada di level “tinggi”. Selama tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Kediri rata-rata meningkat sebesar 0,81 persen per tahun, dari 72,80 pada tahun 2020 menjadi 75,18 pada tahun 2024. Perkembangan IPM Kabupaten Kediri selama tahun 2020–2024

Gambar8 Rilis Grafis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

Pada Agustus 2024, TPT di Kabupaten Kediri mengalami penurunan 0,69 persen poin dibandingkan dengan TPT kondisi Agustus 2023 yang sebesar 5,79 persen. Penurunan ini merupakan salah satu manfaat dari program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai contoh penyelesaian pembangunan Bandara Dhoho yang mulai aktif beroperasi 5 April 2024, Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Mikro dalam Manajemen Keuangan dan Pemasaran Online, Job Fair, Bursa Kerja Khusus (BKK), Beasiswa Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kediri, Bantuan untuk pengembangan usaha PKL, Garasi UMKM, Pendampingan UMKM, Bazar UMKM, Festival Budaya Kuno Kini, Jambore Durian, Kediri Fashion Batik Festival, Investasi yang semakin bermunculan dengan adanya Bandara Dhoho, dan lain sebagainya.

Gambar 9 Rilis Grafis BPS pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri Tahun 2024



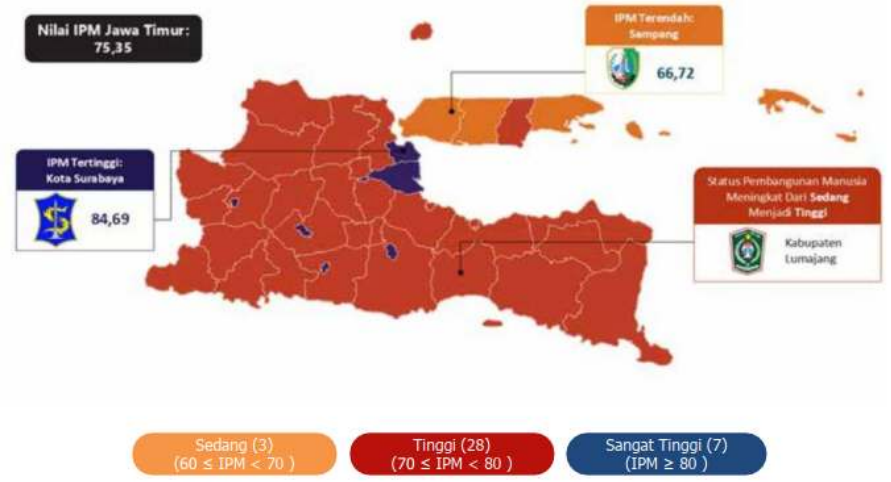
Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Benchmarking

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia Jawa Timur masih berkategori "tinggi", dengan capaian IPM 75,35. Pada tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Lumajang meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM sebesar 70,31. Wilayah dengan status pembangunan manusia "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) menjadi sebanyak 28, berstatus "sedang" (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 3, dan tidak ada wilayah berstatus "rendah" (IPM < 60). Sementara itu, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar menjadi wilayah dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80)

.

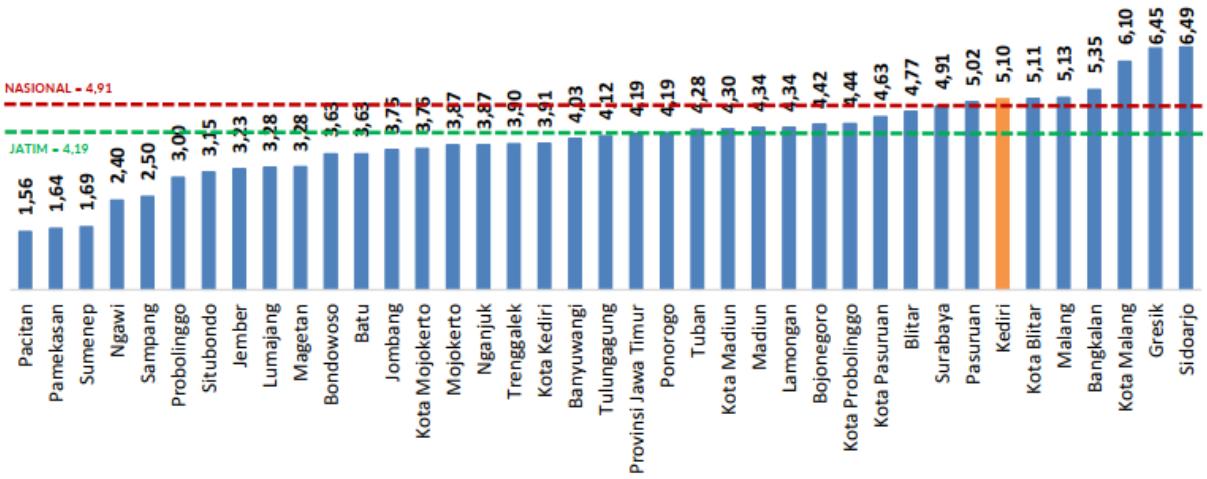
Gambar 10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

Sesuai dengan penjelasan dari BPS, pada Agustus 2024 ini, TPT di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. TPT tertinggi tercatat pada Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 6,49 persen sedangkan TPT terendah tercatat di Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 1,56 peren. Sementara itu, TPT Kabupaten Kediri masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional.

Gambar 11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024



Gambar 12 Bupati Kediri Mas Dhito bersama dengan siswa-siswi dari SMPN Pare (sumber: Dinas Kominfo Kab. Kediri)

Sasaran 1

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Pada Tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, HLS Kabupaten Kediri rata-rata meningkat 0,90 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,74 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 1,18 persen. Sementara itu,RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun atau 0,24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,91 persen per tahun.

Sasaran kinerja dalam bidang pendidikan sering kali diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Di Kabupaten Kediri, kedua indikator ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan perkiraan jumlah tahun yang akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah dalam sistem pendidikan formal. Kedua indikator ini mencerminkan akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah.

Meskipun Kabupaten Kediri telah mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan, tantangan masih ada, seperti kesenjangan akses pendidikan di daerah pedesaan, angka putus sekolah, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, program dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas, serta pemerataan pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja yang lebih baik di masa depan.

Dalam mempersiapkan masyarakat Kabupaten Kediri yang baik dan berdaya saing di masa depan, pendidikan memiliki peran dan fungsi utama dalam pembangunan. Dalam upayanya mencapai Indonesia emas tahun 2045, anak-anak di masa sekarang harus mendapatkan pendidikan yang layak dengan keilmuan yang baik. Urgensi untuk aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang meningkat terlihat dari prediksi perekonomian dari banyak lembaga penelitian internasional seperti WEF (World Economics Forum) dan World Bank, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju nomor 4 di dunia pada tahun 2045 dengan syarat mayoritas masyarakatnya mengenyam pendidikan lebih dari 12 tahun.

Meninjau teori Human Capital (Sumber Daya Manusia) Menurut Todaro (2015) menyatakan bahwa konsep dari sebuah Human Capital dapat dilihat melalui yang investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Investasi dalam Human Capital berupa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri permasalahan dalam menghadapi kondisi yang cukup unik dalam indikator pendidikan, di mana Harapan Lama Sekolah (HLS) telah melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Timur, tetapi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih tertinggal di bawah angka nasional dan provinsi.

1. **Kesenjangan Antara Harapan dan Realisasi Pendidikan**
   Tingginya HLS menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Kediri memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun, rendahnya RLS mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, kemungkinan karena faktor historis di mana akses dan kesadaran terhadap pendidikan sebelumnya masih terbatas.

2. **Angka Putus Sekolah yang Masih Tinggi**
   Salah satu penyebab RLS yang rendah adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di jenjang pendidikan menengah. Faktor ekonomi, keterbatasan akses di daerah pedesaan, serta kebutuhan untuk bekerja sejak usia muda menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan pendidikan.

3. **Disparitas Akses Pendidikan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan**
   Kabupaten Kediri memiliki wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam, termasuk daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Kesenjangan ini menyebabkan banyak anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.

4. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
   Meskipun program pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada tantangan dalam hal ketersediaan sekolah, tenaga pendidik berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini turut berdampak pada rendahnya angka RLS karena anak-anak di daerah tertentu sulit melanjutkan pendidikan mereka.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini target Harapan Lama Sekolah mengalami penajaman dari 13.40 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan ditingkatkan menjadi 13.62. Sedangkan target Rata-rata Lama Sekolah tidak mengalami penajaman yakni 8.24.

Upaya-upaya Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) agar melampaui target nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Beberapa upaya utama yang dilakukan meliputi:

1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) dan Rehabilitasi Sekolah;
2. Penyediaan Bajes bagi siswa yang bersekolah di kawasan Bandara;
3. Program Pendidikan Nonformal (Kejar Paket A,B dan C) berbasis Vokasi serta Wisuda Kesetaraan;
4. Program Beasiswa Kediri Berbudaya (Beasiswa Becak Kari, Beasiswa Sambut Bandara, Beasiswa Berani (atlet berprestasi), Beasiswa S-1 bagi Guru PAUD dan SMA Dharma Wanita Boarding School);

5. Program Bareng Masbup Ayo Sekolah sebagai upaya dalam mengajak anak usia sekolah untuk kembali ke bangku sekolah dan bagi warga belajar untuk ikut PKBM (Pendidikan Nonformal).

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

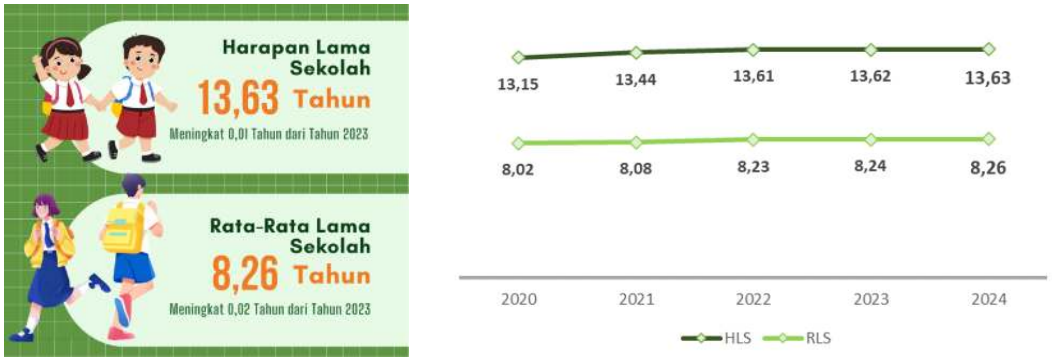
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.63	100.07%	Sangat Baik
	Rata-rata Lama Sekolah	8.24	8.26	100.24%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	13.63	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	8.26	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Dalam Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri dijelaskan sebagai berikut Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, HLS Kabupaten Kediri rata-rata meningkat 0,90 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,74 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 1,18 persen. Sementara itu,RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun atau 0,24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,91 persen per tahun.

Gambar 13 Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Pencapaian Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.65	13.63	99.85%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Rata-rata lama sekolah	8.3	8.26	99.52%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	312,211,153,200.00	301,318,175,007.00	96.51%	Zona Hijau
	Rata-rata lama sekolah				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	100.07%	96.51%	3.56%	Efisien
	Rata-rata lama sekolah	100.24%			

Benchmarking

Wilayah	HLS	RLS	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	13.2	8.85	HLS Kabupaten Kediri lebih baik, RLS Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	BPS via Disdik
Provinsi Jawa Timur	13.43	8.28	HLS Kabupaten Kediri lebih baik, RLS Lebih baik dari Kabupaten Kediri	BPS via Disdik
Kabupaten Kediri	13.63	8.26	-	-
Kabupaten Nganjuk	13,18	8,25	HLS Kabupaten Kediri lebih baik, RLS Kabupaten Kediri lebih baik	BPS via Disdik

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
   Menyusun kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten Kediri
2. Bappeda
   Mengalokasikan anggaran pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan daerah
3. PKBM
   Menydiakan program Kejar Paket A, B, dan C untuk meningkatkan RLS bagi penduduk yang belum menyeelsaikan pendidikan formal.
4. Komite Sekolah dan Orang tua murid
   Mendukung pendidikan anak melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah dan mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan
5. Sektor Swasta dan Badan Usaha

Bantuan CSR berupa peralatan TIK bagi sekolah.

Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial sangat penting dalam meningkatkan HLS dan RLS di Kabupaten Kediri. Keberlanjutan upaya ini membutuhkan sinergi yang erat agar pendidikan semakin inklusif, merata, dan berkualitas, sehingga generasi muda di Kabupaten Kediri dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	40,00%	16,31%	40,78%	Kurang Baik
	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	55,00%	58,59%	106,53%	Sangat Baik
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	57,00%	84,34%	147,96%	Sangat Baik
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,00%	78,68%	224,80%	Sangat Baik
	Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	20,00%	83,02%	415,10%	Sangat Baik
	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ kesetaraan	55,00%	97,37%	177,04%	Sangat Baik
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	40,00%	61,29%	153,23%	Sangat Baik
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1:16	1:17	98,70%	Baik

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut;

1. Bantuan Beasiswa Pendiidkan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu
2. Program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C) serta Wisuda Kesetaraan
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kediri
4. Program CSR dari Badan Usaha berupa Alat TIK untuk sekolah.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi
2. Beberapa siswa lebih memilih untuk bekerja dibanding melanjutkan pendidikan
3. Belum meratanya guru dan tenaga pendidikan yang kompeten di Kabupaten Kediri

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas program beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
2. Melaksanakan program Bareng Masbup Ayo Sekolah secara masif dengan melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk mengajak anak-anak ptuus sekolah kembali ke sekolah (untuk anak usia sekolah) dan ke PKBM / Pendidikan Nonformal bagi warga belajar
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru sehingga di masing-masing wilayah di Kabupaten Kediri memiliki guru dan tenaga pendidik yang berkompeten



Gambar 14 Bupati Kediri meninjau persiapan Mobil Medis EMAS dari RSUD SLG (Sumber Dinas Kominfo)

Sasaran 2

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,80 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Kediri adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,07 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun (0,29 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.

Merujuk pada penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan mengadakan penilaian teknologi kesehatan. Upaya ini diadakan bersama oleh tenaga kesehatan di bidang kedokteran dan bidang kesehatan. Peningkatan kualitas meliputi aspek promosi, preverensi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi serta perawatan jangka panjang. Penerapan penilaian teknologi kesehatan semakin dianjurkan seiring dengan peningkatan program jaminan kesehatan.

Aksesibilitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ketersediaan dan faktor penghalang. Faktor ketersediaan berkaitan dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. Aspek yang mempengaruhi ketersediaan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor penghalang merupakan faktor yang dapat menghalangi proses pelayanan kesehatan. Faktor ini meliputi permasalahan geografi seperti luasnya wilayah pelayanan, persebaran dan kepadatan penduduk serta ketersediaan alat transportasi. Faktor penghalang juga meliputi ketersediaan pembiayaan kesehatan dan kepemilikan asuransi jaminan kesehatan oleh masyarakat.

Beberapa permasalahan kesehatan menurut Kementerian Kesehatan masih perlu untuk ditindaklanjuti seperti Gizi Buruk dengan prevalensi Stunting dan Wasting yang cukup tinggi, upaya eradikasi TBC, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi penyakit menular, dan penyakit tidak menular, serta kesehatan mental. Perkembangan tersebut menjadi perlu untuk ditindaklanjuti dengan intervensi-intervensi spesifik yang bersifat medis maupun non-medis dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Namun demikian, merujuk pada dokumen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat selama ini lebih kepada pelayanan kesehatan. Padahal, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan bukan pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan promosi dan advokasi kesehatan.

Program atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa gerakan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat menjadi sebuah sebuah gerakan yang sukses dengan dukungan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri disampaikan sebagai berikut;

1. Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau
2. Semakin banyaknya sektor swasta yang berminat untuk mengembangkan bisnis di bidang pelayanan kesehatan rujukan (pendirian klinik utama dan rumah sakit baru)
3. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu masih belum terintegrasi dengan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah
4. Masih ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah
5. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM masih sangat diperlukan
6. Pengeluaran atau pembiayaan kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif
7. Belum optimalnya cakupan upaya pelayanan promotif dan preventif yang komprehensif
8. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan yang selalu tersedia, efektif dan efisien, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Universal Health Coverage)
9. Terbatasnya pelatihan bersertifikat terutama untuk program HIV
10. Capaian pemeriksaan triple eliminasi pada bumil yang belum maksimal
11. Masih banyak pasien HIV yang lolos follow up dalam menjalani pengobatan
12. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas memberi layanan HIV (Layanan PDP)
13. Masih adanya stigma tentang Tuberkulosis atau TB sehingga pasien enggan memeriksakan sakitnya
14. Capaian SPM dan indikator PTM prioritas belum maksimal
15. Kemauan dan pengetahuan masyarakat untuk menscreening kesehatanya masih rendah, Selain itu ada masyarakat yg sekolah di luar kabupaten atau yg bekerja di kab / kota lain atau propinsi lain sehingga belum bisa discreening
16. Sebagian masyarakat belum paham bahaya dari penyakit tidak menular (PTM) sehingga enggan untuk melalukan skrining PTM di posbindu /posyandu ILP / Puskesmas, Selain itu bagi yang sudah menderita mereka tidak datang ketempat pelayanan Kesehatan untuk penanganan lebih lanjut .karena merasa baik baik saja dan tidak ada keluhan.

Upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut;

1. Belanja jasa kalibrasi untuk peralatan di Puskesmas dan UPT Labkesda
2. Mengikuti pemantapan mutu eksternal (PME) untuk pemeriksaan laboratorium di UPT Labkesda yang diselenggarakan oleh BBLABKESMAS Surabaya

3. Rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas Adan-Adan, Pare, Sumberjo. Kepung
4. Pembangunan IGD Puskesmas Ngadiluwih
5. Pembangunan Pagar dan Gedung Relokasi Puskesmas Pranggang dan Ngadi
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Wates
7. Kanopi dan Paving Puskemas Kandangan, Gurah, Purwoasri, Bendo, paving Puskesmas Ngancar, Gudang dan Tempat limbah B3 Puskesmas Bangsongan, Pagar Pustu Ngreco Kandat.
8. Pengadaan genset untuk Puskesmas Puhjarak, Badas, Kunjang, Ngadiluwih, Puwoasri, Silir dan Keling
9. Pengadaan IPAL puskesmas Gampeng, Wonorejo dan Bendo
10. Pemenuhan BMHP TB berupa mesin TCM sebanyak 2 buah untuk puskesmas Ngadiluwih dan Tiron, Bio safety Cabinet sebanyak 3 buah untuk puskesmas Keling, Ngadiluwih, Tiron , modul TCM sebanyak 1 buah untuk RSUD SLG, cartridge TCM TB sebanyak 11.250 buah untuk 8 faskes yaitu Puskesmas Keling, Wates, RSUD SLG, RSKK, Puskesmas Mojo, Ngadiluwih, Tiron, Papar, cartridge XDR TB sebanyak 150 buah untuk RSKK dan Xpert check kit sebanyak 2 kit untuk Puskesmas Wates dan RSUD SLG.
11. Pemenuhan alat sebagai penunjang penanggulangan Dengue berupa mesin fogging sebanyak 4 buah untuk Puskesmas Kandangan, Tanon, Mojo, Bendo
12. Pengadaan RDT HIV-Sifilis untuk ibu hamil sebanyak 24.875 tes
13. Pengadaan BMHP sebagai penunjang pemeriksaan laboratorium P2PM seperti RDT HIV 1, RDT HIV2, RDT HIV 3, RDT sifilis, RDT Dengue, RDT Malaria, bahan pemeriksaan malaria, RPR, Tabung K3 EDTA, alcohol
14. Swab, vacuneedle, plesterin, handgloves, , tuberkulin, alcohol swab, dan pot sputum
15. Pengadaan alat fotometer sejumlah 8 (delapan) unit sebagai alat penunjang indikator deteksi dini stroke, yang dialokasikan untuk Puskesmas Ngasem, Tiron, Gampeng, Pagu, Sambi, Bangsongan, Mojo, Wates.
16. Pengadaan BMHP Reagen Strip Gula Darah (Strip Gula Darah, Alkohol Swab, Blood Lancet) sebagai penunjang tercapainya indikator SPM usia produktif 15 – 59 tahun, yang dialokasikan pada 37 Puskesmas.
17. Pengadaan BMHP reagen profil Lipid dan penunjangnya (Reagen HDL, Reagen Cholesterol Total, Reagen Trygliserida, Alkohol swab, Jarum Vacutainer, Tabung Vacutainer, Plester, Yellow Tip, Blue Tip) sebagai BMHP penunjang tercapainya indikator deteksi dini Penyakit stroke yang dialokasikan pada 31 Puskesmas yang memiliki alat Fotometer.
18. Pengadaan BMHP Kertas EKG dan Gel EKG (Kertas EKG dan Gel EKG) sebagai BMHP penu jang tercapainya indikator deteksi dini penyakit Jantung, yang dialokasikan pada 23 puskesmas yang memiliki alat EKG.
19. Pengadaan BMHP pemeriksaan IVA/ Inspeksi Vuisual asam Asetat (Kapas lidi, sarung tangan, desinfektan, asam asetat) sebagai penun jang tercapainya deteksi dini kanker servik (mulut rahim) yang dialokasikan pada 37 puskesmas .
20. Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara internal melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu (INM).
21. Peningkatan mutu pelayanan di fasyankes secara eksternal melalui akreditasi yang diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
22. *Universal Health Coverage* (UHC) untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat
23. Segera mengusulkan penetapan Perbup Pengangkatan tenaga Non ASN BLUD Puskesmas
24. Memfasiliatasi SDM Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Kediri untuk mengikuti pelatihan
25. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pengendalian PPOK dan Asthma dengan memberangkatkan 5 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Wates, Pagu, Sambi, Tanon dan Wonorejo di UPT Latkesmas Murnajati- Lawang-Malang.
26. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan petugas kesehatan dalam upaya implementasi dan layanan UBM di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan memberangkatkan 18 orang tenaga kesehatan dari puskesmas dan 2 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Munajati – Lawang – Malang.

27. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan memberangkatkan 3 orang tenaga kesehatan dari puskesmas Silir, Puhjarak dan Pranggang di UPT latkesmas Murnajati- Madiun.
28. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa dengan memberangkatkan tenaga kesehatan dari 16 orang puskesmas dan 1 orang tenaga kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten Kediri.
29. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker servik (mulut rahim) di fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi bidan dan dokter dengan memberangkatkan 10 dokter dari puskesmas Semen, Ngadiluwih, Wates, Grogol, Pare, Tarokan, Ngasem, Kandangan, Badas dan Gurah, serta 1 orang tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri di UPT Latkesmas Murnajati- Lawang- Malang.
30. Peningkatan kapasitas petugas Sanitasi Lingkungan untuk 25 puskesmas di Bapelkes Murnajati
31. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Workshop Penjaminan Mutu Labkesmas oleh ASLABKESDA Jawa Timur dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda ;
32. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Surveilans Berbasis Laboratorium Penyakit Dan Faktor Risiko Bagi Tenaga Laboratorium oleh BBPK Ciloto dengan memberangkatkan 2 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda; dan
33. Peningkatan Mutu SDM dengan mengikuti Pelatihan Refreshing Malaria oleh BBLABKESMAS Surabaya dengan memberangkatkan 1 orang tenaga kesehatan dari UPT Labkesda.
34. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan On the Job training kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS dengan memberangkatkan dokter, bidan dan perawat dilaksankan di RSUD Kabupaten Kediri peserta dari Puskesmas Adan-Adan, Pare, Puhjarak, Keling, Kayen Kidul, Puncu, Kepung, Wates, Pranggang, Bendo, Badas dan RSUD SLG dari Puskesmas Ngadiluwih, Kras, Mojo, Gurah, Tiron, Blabak, Ngadi, Semen, Silir, Ngasem, Gampeng, Wonorejo
35. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan dengan memberangkatkan bidan puskesmas dari Puskesmas Pagu, Pelas, Tarokan, Silir, Wates, Tanon, Kunjang, Ngadiluwih, Tiron, Mojo, Wonorejo, Pranggang, Semen, Sidorejo, Sumberjo, Kras, Bendo, Badas, Kandangan, Ngancar, Pare, Sambi dan Bangsongan
36. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan Pelatihan edukasi gizi pada 1000 hpk (hari pertama kehidupan) dengan metode emo demo bagi petugas kesehatan dengan memberangkatkan petugas gizi puskesmas dari Puskesmas Semen, Ngadi, Ngadiluwih, Wonorejo, Blabak, Silir, Ngancar, Gampeng, Tanon, Puhjarak, Pare, Kepung, Kandangan, Tarokan, Tiron, Sambi, Ngasem, Badas dan Dinkes
37. Pelatihan bagi Pelatih Ketrampilan Dasar Kader Posyandu, memberangkatkan 54 tenaga kesehatan dari 37 puskesmas ke Latkesmas Murnajati Kampus Malang
38. Melaksanakan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas
39. Pengelolaan data tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri melalui SISDMK
40. Monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri
41. Penerbitan SIP/SIK

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	74.85	75.07	100.29%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Indeks Kesehatan (UHH)	Diukur oleh BPS	75.07	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,80 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Kediri adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,07 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun (0,29 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.

Gambar 15 Rilis BPS pada Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Pencapaian Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	72.87	75.07	103.02%	Melampaui Target RPJMD

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	186,687,674,880.00	175,148,128,063.00	93.82%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	100.29%	93.82%	6.48%	Efisien

Benchmarking

Wilayah Lain	UHH	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	74,15	Kabupaten Kediri Lebih baik	https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTg0IzI=/usia-harapan-hidup-uhh-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia-uhh-dari-hasil-sp2020-long-form-.html
Provinsi Jawa Timur	75,07	Sama dengan Kabupaten Kediri	
Kota Malang	75,54	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	
Kota Kediri	75,74	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	https://lenteratoday.com/usia-harapan-hidup-kota-kediri-2024-ungguli-nasional-dan-jawa-timur/

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	35%	35.00%	Kurang Mendukung
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, To, Tk. Alkes Dan Optikal, Umot	75%	100%	133.33%	Sangat Mendukung
	Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat P-Irt	75%	100%	133.00%	Sangat Mendukung
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	68%	41%	60.29%	Cukup Mendukung
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG)	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa				
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	87%	87%	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Komitmen pimpinan yang besar terhadap berjalannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri menjadi faktor pendukung yang utama. Dengan komitmen dari pimpinan tersebut, proses perjalanan program dan kegiatan yang telah ditargetkan menjadi lebih solid dan kolaboratif terutama dari dinas-dinas terkait.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pasca Covid-19 menjadi hal yang juga mendukung kinerja di Kabupaten Kediri. Dengan hal tersebut, banyak masyarakat yang mulai aktif merawat kesehatannya, seperti berolahraga, bersepeda, menjalani work-life balance, yang memiliki dampak besar dalam perkembangan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Faktor-faktor Penghambat

1. Pemenuhan Sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kompetensi baik tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi umum masih sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan program.
2. Dasar hukum, peraturan dan kebijakan yang seringkali berubah
3. Komposisi kepesertaan JKN saat ini yaitu 67,59% adalah peserta PBI atau Penerima Bantuan Iuran (baik PBIN maupun PBID). Kesadaran masyarakat dan pihak swasta sebagai pemberi kerja masih kurang untuk mendaftarkan anggota keluarganya ataupun karyawannya dalam kepesertaan JKN non PBI (Penerima Bantuan Iuran).
4. Pentingnya updating (pemutakhiran) data kependudukan secara berkala belum menjadi perhatian masyarakat. sehingga setiap perubahan data kependudukan (kelahiran, kematian, pernikahan, pindah domisili dll) tidak terekam dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
5. Keberlanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kurang didukung dengan seringnya terjadi kendala pada aplikasi Keluarga Sehat sehingga menghambat tersedianya data yang mutakhir yang berdampak juga pada proses perencanaan dan pengambilan kebijakan digitalisasi sektor kesehatan

Rencana Tindak Lanjut

1. Komitmen semua pihak untuk mempertahankan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kediri perlu dijaga agar semua warga Kabupaten Kediri memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.
2. Perlu juga meluruskan kesalahpahaman dalam mengartikan UHC yang selama ini bahwa bila seluruh penduduk telah menjadi peserta JKN maka cakupan Kesehatan semesta dianggap tercapai. Padahal terdapat hal yang lebih kompleks dari sekedar kepesertaan jaminan pembiayaan Kesehatan, namun juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
3. Rencana tindak lanjut dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan UHC yaitu melalui pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan, ketersediaan obat, pemerataan distribusi SDM

Kesehatan di FKTP dan FKRTL, jaminan ketersediaan anggaran untuk pembayaran iuran peserta serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Kediri.

4. Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan. Upaya peningkatan kualitas kesehatan akan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang targetnya meningkat setiap tahunnya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Sistem Kesehatan Nasional.



Gambar 16 Job Fair di Convention Center Kabupaten Kediri (Sumber Dinas Kominfo)

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diambilkan dari Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024 disebutkan bahwa TPAK Kabupaten Kediri yakni 71,31. Berdasarkan data hasil realisasi kinerja Tahun 2024 ditargetkan TPAK sebesar 71,1 dan realisasi yang didapatkan sebesar 71,31 diperoleh capaian kinerja sebesar 100,30 %.

Tenaga kerja berarti penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Definisi lain tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk orang-orang yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.
Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia menurut Kementerian Tenaga Kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Aspek tersebut berkaitan dengan masalah produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi disrupsi teknologi seperti ini, perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia harus mendapatkan perhatian penuh terutama dalam upaya optimalisasi tenaga kerja di Indonesia.
Upaya untuk mencapai masyarakat yang optimal tersebut diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dapat mengukur partisipasi masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja untuk dapat berproduktif dalam perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengukur sampling dengan pendekatan masyarakat yang bekerja penuh dan masyarakat yang bekerja paruh waktu (dengan klasifikasi setengah penganggur dan pekerja paruh waktu).

Permasalahan
Merujuk data dari Dinas Tenaga Kerja disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

Permasalahan utama dalam dunia ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Pada dasarnya permasalahan tenaga kerja terkait dengan rendahnya kompetensi pencari kerja, minimnya kesempatan kerja, dan tingginya jumlah kasus hubungan industrial yang berpotensi menyebabkan PHK sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran. Adapun beberapa permasalahan yang umum dihadapi antara lain:

1. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah berdampak pada kualifikasi pekerjaan yang didapat. Kualitas SDM relatif masih rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat peluang kerja (penyerapan di pasar kerja tidak optimal);
2. Jumlah Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Di Indonesia, kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja;
3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Masih minimnya penyebarluasan serta kurangnya akses informasi pasar kerja, masyarakat masih belum terbiasa dengan informasi berbasis IT;
4. Faktor sosial budaya dan mindset masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan. Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha (entrepreneurship) untuk menciptakan lapangan kerja.

Merujuk Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Isu Ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri adalah Tingginya angka menganggur lulusan SMA Umum/Sederajat kemungkinan terjadi karena masalah *link and match* antara keterampilan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cenderung belum cukup terampil untuk terjun di pasar kerja, diperlukan pelatihan kompetensi untuk lulusan SMA yang belum cukup terampil untuk terjun di pasar kerja. Selain itu, perlunya peningkatan jangkauan beasiswa pendidikan tinggi terhadap lulusan SMA Umum/Sederajat yang memiliki masalah finansial.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam RPJMD adalah 71,1. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis industri;
2. Membuka lebih banyak lapangan kerja melalui kemitraan dengan industri maupun Lembaga Penempatan Kerja dan program padat karya serta meningkatkan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Meningkatkan layanan informasi pasar kerja, Job Fair Online maupun Offline, dan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial (perusahaan dan pekerja yang memahami dan menerapkan aturan hubungan industrial).

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diambilkan dari Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024 disebutkan bahwa TPAK Kabupaten Kediri yakni 71,31. Realisasi tersebut berada diatas target yang telah ditetapkan dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Berdasarkan data hasil realisasi kinerja Tahun 2024 ditargetkan TPAK sebesar 71,1 dan realisasi yang didapatkan sebesar 71,31 diperoleh capaian kinerja sebesar 100,30 %.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

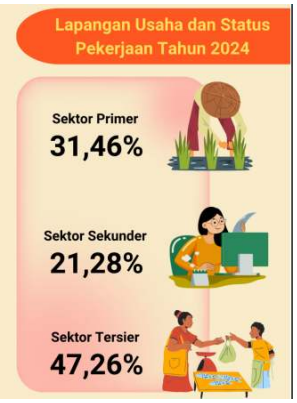
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1	71.31	100.30%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah Angka Angkatan kerja 15 tahun keatas/ Jumlah Penduduk usia kerja x 100%	Diukur oleh Badan Pusat Statistik	71.31	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Gambar 17 Rilis BPS pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri Tahun 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agustus 2023 – Agustus 2024	
	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	1.258.779	1.324.474	1.336.346	11.872	0,90
Angkatan Kerja	865.206	910.477	952.912	42.435	4,66
Bekerja	806.121	857.724	904.344	46.620	5,44
Penganggur	59.085	52.753	48.568	-4.185	-7,93
Bukan Angkatan Kerja	393.573	413.997	383.433	-30.564	-7,38
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,83	5,79	5,10	-0,69	
Laki-Laki	6,69	5,82	5,66	-0,16	
Perempuan	7,06	5,75	4,21	-1,54	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,73	68,74	71,31	2,57	
Laki-Laki	85,05	85,22	86,69	1,47	
Perempuan	52,41	52,08	55,76	3,68	



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.II, 12 Desember 2024

Pencapaian Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.65	13.63	99.85%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Rata-rata lama sekolah	8.3	8.26	99.52%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	312,211,153,200.00	301,318,175,007.00	96.51%	Zona Hijau
	Rata-rata lama sekolah				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	100.07%	96.51%	3.56%	Efisien
	Rata-rata lama sekolah	100.24%			

Benchmarking

Wilayah	TPAK	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	70.63	Kabupaten Kediri lebih baik	https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjc3IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-kabupaten-kota.html
Provinsi Jawa Timur	73,45	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Kediri	71.31		
Kabupaten Nganjuk	69,79	Kabupaten Kediri lebih baik	
Kabupaten Tulungagung	75,57	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yeng terlibat dari Internal Pemkab beserta perannya:

1. DPMPTSP, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja (penyiapan informasi bursa kerja);
2. Dinas Sosial, pemberdayaan dan penyiapan angkatan kerja PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Disparbud dan Dinas Pendidikan, peningkatan kapasitas angkatan kerja muda dan lulusan SMK (penyiapan angkatan kerja muda dan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK)
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pemberdayaan pada sektor usaha (penguatan dan peningkatan kewirausahaan)
5. Dinas Perdagangan, pemberdayaan pada sektor industri
6. Dinas Tenaga Kerja (pelaksana pelatihan kompetensi dan keterampilan)

Pihak-pihak yang terlibat dari eksternal Pemkab beserta perannya:

1. Perusahaan, penyedia informasi lowongan kerja dan lapangan kerja
2. Lembaga pelatihan / penempatan kerja, mitra kerja dengan Pemkab dalam membantu masyarakat mengembangkan keahlian khusus untuk bersaing di era global

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	59%	83.23%	141.07%	Sangat Mendukung
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	14%	15.53%	110.93%	Sangat Mendukung
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam	95%	91.43%	96.24%	Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	wilayah kabupaten/kota				
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	9%	5.29%	58.78%	Kurang Mendukung
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	14.29%	142.90%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kompetensi para pencari kerja dengan melakukan pelatihan berbasis kompetensi secara komprehensif dan berkelanjutan;
2. Melakukan pelayanan antar kerja yang tepat sasaran untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja;
3. Melakukan pembinaan dan kemitraan yang baik terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta guna meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
4. Melakukan pembinaan hubungan industrial guna menekan angka pemutusan hubungan kerja;
5. Menjalin kerjasama dengan baik dengan stakeholder melalui kolaborasi yang win-win solution;
6. Penggunaan anggaran untuk mendorong pencapaian target indikator kinerja utama perangkat daerah yaitu meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang pada akhirnya bertujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah dilakukan secara optimal.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut;

1. Minimnya jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit;
2. Belum maksimalnya pembinaan hubungan industrial, sehingga jumlah perusahaan dan pekerja yang memahami dan menerapkan aturan hubungan industrial masih minim;
3. Belum optimalnya komunikasi dan diskusi terkait hubungan industrial di perusahaan karena masih sering berjalan satu pihak.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan jumlah LKS Bipartit yang dibentuk;
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan yang baik dan bersifat mutualisme dengan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan;
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja, melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.



Gambar 18 Bupati Kediri bertegur sapa dan mengobrol dengan masyarakat (Sumber Dinas Kominfo)

Tujuan 2

Menurunkan Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024, Persentase Angka Kemiksinan mengalami penurunan menjadi 9,95 dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,72. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,22 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,52. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan derajat kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik karena rata-rata pengeluaran perkapitanya semakin mendekati garis kemiskinan.

Merujuk pada Wikipedia, Kemiskinan, kemelaratan, kefakiran, kepapaan, kekedanaan, kerudinan, kegembelan, kebansatan, atau prasejahtera adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Kediri secara umum Perhitungan kemiskinan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 ini ditetapkan oleh BPS garis kemiskinan sebesar Rp. 403.621,-

Permasalahan

Merujuk Laporan Akhir RPKD Kabupaten Kediri yang mengutip Rancangan Teknokratik RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri disebutkan beberapa permasalahan kemiskinan sebagai berikut;

1. Daya beli masyarakat yang menurun;
2. Ketidakmerataan sarana dan prasarana layanan dasar;
3. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan;
4. Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal;
5. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum ditanggulangi secara optimal;
6. Angka putus sekolah dapat berdampak pada tingkat pengangguran terbuka; serta
7. Ketidakcocokan antara kebutuhan pasar kerja dan kompetensi atau kualifikasi SDM.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini target Persentase Angka Kemiskinan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana dibubuhkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yakni 9.8%.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9.8	9.95	98.47	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Persentase Angka Kemiskinan	Diukur oleh BPS	9.95	Indikator Kesejahteraan Kabupaten Kediri 2024

Gambar 19 Rilis Indikator Angka Kemiskinan dari BPS

Tabel 7.1
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	179,93	184,49	169,46	171,18	159,27
Persentase Penduduk Miskin (P0)	11,40	11,64	10,65	10,72	9,95
Garis Kemiskinan (GK) Rp	324.215	335.990	353.990	385.874	403.621
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,55	1,35	1,67	1,52	1,22
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,33	0,25	0,41	0,34	0,24

Sumber: BRS Kemisikinan Kabupaten Kediri 2024



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri Tahun 2024

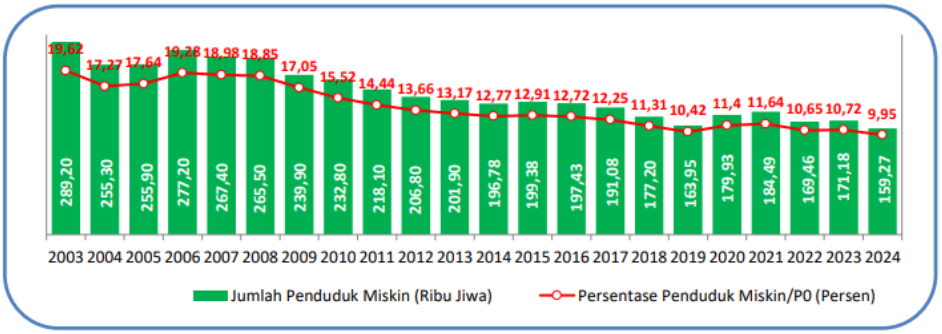
Merujuk penjelasan dari BPS, Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kediri pada tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin per kapita dari garis kemiskinan. Artinya semakin tinggi nilai P1, semakin miskin penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita dengan garis kemiskinan.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 1,22 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,52. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan derajat kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik karena rata-rata pengeluaran perkapitanya semakin mendekati garis kemiskinan. Untuk dapat menekan angka kemiskinan Kabupaten Kediri, Pemerintah perlu memastikan program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Ketepatan sasaran dan waktu penyaluran bantuan menjadi kunci efektivitas program dalam menanggulangi penurunan kesejahteraan rumah tangga.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri mengindikasikan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan telah tepat sasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kediri menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas. Program-program pengentasan kemiskinan diantaranya dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, pemberdayaan sanitasi total Berbasis Kemiskinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Beasiswa Pendidikan Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar, dan lain-lain. Dinas Sosial setiap tahunnya juga melakukan pemutakhiran database penduduk miskin agar program-program pengentasan kemiskinan tepat tujuan dan sasaran.

Benchmarking

Gambar 20 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2003-2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No.1/7/3506/Th.V 29 Juli 2024

Perbandingan dengan Daerah Lain

Wilayah Lain	TPAK	Keterangan	Rujukan Data
Provinsi Jawa Timur	9,79	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurutkabupaten-kota-di-jawa-timur.html
Kota Kediri	6,51	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Pacitan	13,08	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Kabupaten Tulungagung	6,28	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Trenggalek	10,50	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Nasional	9,03	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk pada penjelasan BPS, disebutkan beberapa faktor sebagai berikut;

1. Terkendalinya rata-rata kenaikan harga di Kabupaten Kediri pada periode pelaksanaan pendataan yaitu secara year on year sebesar 2,59 persen pada Februari 2024 serta secara year on year 2,67 persen pada Maret 2024.
2. Efektifitas berbagai program peningkatan kesejahteraan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri cukup efektif dalam intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada penjelasan BPS, disebutkan beberapa faktor sebagai berikut;

1. Peningkatan rata-rata harga beras dari kisaran Rp.12.000,00 per kilogram di tahun 2023 menjadi kisaran Rp.13.000,00 per kilogram di tahun 2023;
2. Rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Kediri, semakin tidak bervariasi;

Rencana Tindak Lanjut

Dalam Laporan Akhir RPKD Kabupaten Kediri tahun 2024-2029 terdapat Nawa Pratishtha atau Sembilan Jalan Kebangkitan sebagai berikut;

1. Pembangunan Rumah Data Terpadu;
2. Optimalisasi jaring pengaman sosial;
3. Pengendalian harga dan peningkatan akses kebutuhan pokok masyarakat miskin;
4. Pengembangan lapangan kerja sektor ekonomi berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
6. Peningkatan partisipasi dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin;
7. Peningkatan pemerataan akses infrastruktur dasar;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
9. Optimalisasi kawasan hijau untuk kemandirian pangan dan Penguatan Kapasitas Daerah.



Gambar 21 Wakil Bupati Kediri dengan Ketua TP PKK membuka acara PKK (Sumber Dinas Kominfo)

Sasaran 4

Meningkatnya Kesejahteraan Berbasis Keluarga

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100%.

Kesejahteraan berbasis keluarga adalah hal yang penting, menurut PBB keluarga adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam sistem keluarga, terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dsb. Dengan hal tersebut, didapati bahwa keluarga memiliki efek yang panjang terutama dalam bidang kesejahteraan manusia.

Menurut PBB keluarga adalah institusi pertama pembangunan manusia. Pembangunan manusia dalam keluarga berdampak pada banyak aspek mulai dari aspek rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, indeks konsumsi, kecukupan gizi, serta hal-hal lain yang menunjang pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga sejahtera akan memiliki kesempatan pembangunan manusia yang lebih baik daripada anak-anak yang tumbuh dari keluarga pra-sejahtera. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga memiliki delapan fungsi sebagai berikut: Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta kasih, Melindungi, Reproduksi, Sosialisasi dan pendidikan, Ekonomi, dan Pembinaan lingkungan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan basis keluarga. Upaya peningkatan berbasis keluarga ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Keluarga sejahtera telah melingkupi status sosial, status budaya, status gender, dan status perekonomian. Selain hal tersebut, Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Keluarga merupakan salah satu faktor pendukung utama misi Bupati Kediri adalah terwujudnya masyarakat sejahtera. Diperlukan data dan pendekatan berbasis keluarga untuk mencapai tujuan tersebut.

Permasalahan

Merujuk data dari DP2KBP3A disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Belum ada data mikro keluarga pra sejahtera untuk memberikan intervensi lebih tepat dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
2. Masih ada perkawinan anak yang bisa menjadi keluarga pra sejahtera;
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan kepala keluarga usia produktif;
4. Bonus demografi diperkirakan selesai tahun 2030.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Persentase Keluarga Sejahtera dalam RPJMD adalah 72,11. Target tersebut dirubah pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024 dikarenakan target tersebut sudah terlampaui pada tahun 2023 dengan realisasi 84,78. Penetapan target ulang pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 ditetapkan dengan asumsi mempertahankan realisasi yakni dengan target 84,78.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh DP2KBP3A bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya data mikro keluarga dalam aplikasi InKelud yang berisi data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
2. Kolaborasi dan koordinasi bersama lintas sektor terkait dalam memberikan solusi intervensi terhadap keluarga pra sejahtera termasuk kegiatan di Kampung KB
3. Memperbaiki sistem pelayanan pengajuan Dispen Nikah untuk menurunkan perkawinan anak
4. Optimalisasi peran Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dan DRPPA (Desa Ramah Perempuan Peduli Anak)

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100% dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Persentase Keluarga Sejahtera	= Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus / Jumlah Keluarga x 100%	454.395/504.603x100%= 90.05%	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INKelud

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78%	90.05%	106.22%	Sangat Baik

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	30.604.155.552	28.166.617.946	92,03%	Sangat Baik

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	106.22%	92,03%		Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
70.51	70.8	84.74	90.05

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh DP2KBP3A didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Wilayah Lain	TPAK	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	90,97	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	Data Kompilasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur	90,21	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kota Kediri	93,49	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Kabupaten Kediri	90,05	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Pihak-pihak yang Terkait

Dari data yang dihimpun oleh DP2KBP3A, pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut;

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlingudan Anak (PPPA)
3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4. Lintas Sektor dalam TKPK (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan)
5. Organisasi Wanita
6. Forum Anak
7. Insan GenRe

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program Kegiatan yang Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi masyarakat yang diberdayakan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran korban kekerasan yang ditangani	100%	9%	9%	Kurang Mendukung
Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang direhabilitasi	100%	96%	96%	Mendukung
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	98%	98%	Mendukung
Program Penanganan Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100%	87%	87%	Mendukung
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	98%	98%	Mendukung
Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet need	10.29	7.9	76.77%	Cukup Mendukung
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 32.98% BKR 28.26% BKL 36.32%	BKB 35.87% BKR 30.15% BKL 37.09%	105.85%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari DP2KBP3A faktor-faktor pendukung adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah
2. Kolaborasi anggaran dan kegiatan dengan OPD terkait dan Desa

Merujuk data dari LKjIP DP2KBP3A disebutkan sebagai berikut;

1. Adanya peran kader PPKBD dan Sub PPKBD serta PKB/PLKB di Kecamatan;
2. Adanya anggaran yang mendukung semua kegiatan;
3. Antusias yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan KB MKJP;
4. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
5. Dukungan anggaran dengan kolaborasi antar OPD;
6. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk hidup lebih baik.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari DP2KBP3A faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga dan pola pengasuhan kurang kuat karena faktor kesibukan ekonomi sehingga muncul masalah kerawanan sosial
2. Informasi melalui media sosial yang tanpa filter
3. Perempuan kepala keluarga lebih senang jenis pekerjaan yang langsung dapat uang pada hari yang sama.
4. Kepedulian terhadap isu kependudukan masih rendah

Merujuk data dari LKjIP DP2KBP3A disebutkan sebagai berikut;

1. Pemahaman Masyarakat tentang program Bangga Kencana masih kurang;
2. Tingginya kasus perkawinan anak;
3. Belum optimalnya peran kader perempuan di desa untuk mendukung program dari bawah;
4. SDM pengampu masih kurang.

Merujuk penjelasan dari Dinas Sosial disebutkan sebagai berikut:

1. Updating data tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial sendiri, namun dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga masih adanya data yang belum terupdate.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari DP2KBP3A rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan keluarga dan pola asuh melalui kelompok kegiatan di Kampung KB
2. Peningkatan pemberdayaan remaja dan perempuan kepala keluarga agar siap kerja dengan penghasilan yang lebih baik bersama OPD terkait
3. Penguatan data InKelud sebagai data base di desa
4. Mencegah dampak negatif dari medsos dengan penguatan parenting

Merujuk data dari LKjIP DP2KBP3A disebutkan sebagai berikut;

1. Penyebarluasan program Bangga Kencana;
2. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak;
3. Road Map Penyebaran Peran Kader Perempuan;
4. Optimalisasi Peran Penyuluh KB dan Kader.

Merujuk penjelasan dari Dinas Sosial disebutkan bahwa:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kementerian Sosial untuk *updating* data.

Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

Pada Tahun 2024 ini, Apresiasi dan Penghargaan Kinerja yang didapatkan merujuk data dari DP2KBP3A rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional Tahun 2024
2. KLA (Kabupaten Layak Anak) dari Kementerian PPPA
3. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian PPPA
4. Terbaik II PIK-R Percontohan Segmentasi Usia 15-19 Tahun oleh SMAN 1 Grogol



Gambar 22 Wakil Bupati Kediri dengan Ketua TP PKK membuka acara PKK (Sumber Dinas Kominfo)

Tujuan 3

Meningkatnya Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah

Pada Tahun 2024, Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Kediri mengalami peningkatan menjadi 79 dari 77.86 pada Tahun 2023. Peningkatan terjadi pada ketiga aspek yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi

Merujuk pada Penjelasan Umum KBBI,, Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.

Merujuk pada Victor Silaen yang dirujuk dari Balitbang Kementerian Dalam Negeri Institusionalisasi demokrasi di Indonesia menjadi salah satu agenda penting Reformasi yang gencar dilaksanakan pasca-tumbangnya Orde Baru pada 1998. Namun demikian, institusionalisasi ini nampaknya belum menghasilkan kestabilan dalam sistem perpolitikan hingga saat ini. Dalam mengevaluasi jalannya proses institusionalisasi yang telah dilakukan sejauh ini, beberapa persoalan mendasar mesti kita cermati, antara lain persoalan terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Terkait hal ini, penting juga untuk menelaah berbagai perubahan dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan menerapkan perspektif neo-institusionalisme dalam mendekati persoalan-persoalan tersebut, tulisan ini ditujukan untuk melakukan refleksi atas UUD, UU Pemda, dan UU Pilkada. Melalui refleksi ini akan dapat kita lihat bagaimana sebenarnya proses institusionalisasi demokrasi berlangsung di Indonesia hingga hari ini.

Permasalahan

Merujuk data dari Bakesbangpol Kabupaten Kediri terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Beberapa data indikator sulit didapat bahkan tidak ada di wilayah, misalnya indeks persaingan usaha;
2. Kesulitan minta data di BPS Kabupaten karena harus ijin BPS Provinsi;
3. Dari 38 Kab/Kota Se Jawa Timur hanya Kab. Kediri yang menyusun IDI Tingkat Kabupaten.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

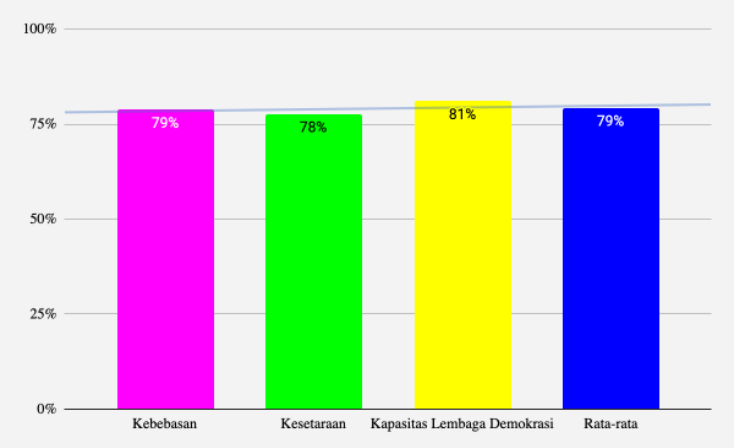
Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86	79	101.46%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan prioritas survei, FGD, dan Data Sekunder dari OPD dan Instansi Vertikal di Kabupaten Kediri	Sebagaimana terlampir dalam gambar dibawah	79	Laporan Akhir Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Kediri 2024

Gambar Penjelasan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia

Variabel	Aspek (Indikator)
1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Kebebasan (Dimensi Politik)
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Kebebasan (Dimensi Politik)
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Kebebasan (Dimensi Sosial)
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Kebebasan (Dimensi Politik)
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	Kebebasan (Dimensi Politik)
6. Pemenuhan hak-hak pekerja	Kebebasan (Dimensi Ekonomi)
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Kebebasan (Dimensi Politik, Ekonomi, Sosial)
8. Kesetaraan Gender	Kesetaraan (Dimensi Politik Ekonomi, Sosial)
9. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan public melalui lembaga perwakilan	Kesetaraan (Dimensi Politik)
10. Anti monopoli sumber daya ekonomi.	Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial.	Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
12. Kesetaraan Kesempatan kerja antar wilayah	Kesetaraan (Dimensi Ekonomi)
13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Kesetaraan (Dimensi Politik)
14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Kesetaraan (Dimensi Sosial)
15. Kinerja Lembaga Legislatif	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
17. Netralitas penyelenggara pemilu	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Sosial)
20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan public	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)
22. Pendidikan Politik pada kader partai politik	Kapasitas Lembaga Demokrasi (Dimensi Politik)



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Kediri 2024

Benchmarking

Wilayah Lain	IDI	Keterangan	Rujukan Data
Provinsi Jawa Timur	82.01	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html
Nasional	79.51	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk pada penjelasan Bakesbangpol, disebutkan beberapa faktor sebagai berikut;

1. Mengutamakan kinerja tim dalam pencapaian indikator kinerja;
2. Melakukan rapat koordinasi sebelum kegiatan dan melakukan evaluasi pasca kegiatan;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada penjelasan Bakesbangpol, disebutkan Kewajiban Menyusun IDI hanya di Tingkat Pusat dan Provinsi, sedang tingkat Kabupaten/Kota tidak ada kewajiban, sehingga dalam penggalian datanya ada kendala. Upaya untuk menindaklanjuti yang didasarkan pada data-data tersebut menjadi tidak optimal.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Bakesbangpol, Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah mengkaji ulang penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Kediri.



Sasaran 5

Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Kondusivitas Daerah tercapai sesuai target yaitu 100%. Tingkat Kondusivitas Daerah diukur dengan metode bahwa problem-problem yang ada di dalam masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten berhasil diselesaikan dalam skala Kabupaten atau tidak mengalami eskalasi pada level provinsi ataupun nasional.

Penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi ditinjau dari tingkat pemahaman elemen masyarakat mulai menurun baik dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter bangsa. Disamping itu, diwarnai dengan mulai memudarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan memelihara kondusifitas lingkungan dan kondusifitas wilayah/daerah. Sedangkan dari aspek tingkat partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif.

Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut;

1. Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan.
2. Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan dan Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara
3. Meningkatnya partisipasi demokrasi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula di Kabupaten Kediri.

Dengan semangat demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah berupaya untuk mengembalikan marwah demokrasi di Kabupaten Kediri. Demokrasi yang bertanggung-jawab dan saling mengawasi. Dengan semangat tersebut, diupayakan akan adanya rasa persatuan dan kesatuan dari masyarakat di Kabupaten Kediri.

Permasalahan

1. Aksi Demo Menuntut Dugaan Adanya pungutan liar program PTSL di Kab. Kediri
2. Aksi Demo Menuntut Tidak adanya transparan dalam ujian perangkat desa
3. Adanya Pertambangan ilegal

4. Aksi Spontanitas Warga Desa Tiron Kecamatan Banyakan terkait Permasalahan Dokumen Kependudukan
5. Aksi Demo Menuntut mengusulkan penolakan dan pembatalan Revisi undang - undang TNI, Polri dan Penyiaran dikarenakan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat dalam memutuskan produk hukum
6. Audiensi PSHT Pusat Madiun Bersama Bupati Kediri di Ruang Pamenang Pemkab Kediri terkait permasalahn yaitu, adanya SK Pengangkatan baru yang diterbitkan oleh IPSI, dalam hal ini SK tersebut atas nama PSHT yang berbeda dan Penerbitan SK tersebut disinyalir tidak melalui mekanisme persetujuan dari anggota IPSI Lainnya.
7. Audiensi terkait Banyaknya Kendaraan yang melebihi tonase (ODOL)
8. Aksi Demo dan Audiensi Gerakan Pemuda Nusantara Bersama Warga Satak Kec. Puncu di KPH Kediri (Sekar Perhutani)

Perencanaan

Target tahun ini sesuai dalam Perjanjian Kinerja Perubahan adalah 100% dan target akhir RPJMD 100% dengan Indikator Tingkat Kondusivitas Daerah (TKD). Tingkat Kondusivitas Daerah diukur dengan metode bahwa problem-problem yang ada di dalam masyarakat yang menjadi kewenangan daerah berhasil diselesaikan dalam skala daerah atau tidak mengalami eskalasi pada level provinsi ataupun nasional.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Mengoptimalkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Kondusivitas Daerah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusifitas Daerah	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Konflik Sosial/Konflik yang ditindaklanjuti x 100%	21 : 21 x 100%	100%	Data Rekapitulasi Penyelesaian Konflik Daerah

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Tingkat konduktivitas daerah	100%	100%	100%	Sasaran RPJMD tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Tingkat konduktifitas daerah	10.101.980.000	10.092.850.434	99,91	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Tingkat konduktifitas daerah	100%	99,91	0,09	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Tingkat Kondusivitas Daerah di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Pihak-pihak yang Terkait

Dari data yang dihimpun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pihak-pihak yang terkait adalah Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh adat, pendidik, Organisasi Kemsyarakatan, SKPD terkait.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85%	100%	118%	Sangat Mendukung
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	90%	90%	Mendukung
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	80%	98%	123%	Sangat Mendukung
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	80%	87%	109%	Sangat Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	90%	100%	111%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan Bakesbangpol disebutkan sebagai berikut; Pelaporan informasi yang di masing-masing wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pimpinan

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan Bakesbangpol disebutkan sebagai berikut; Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pada TKPD dan FKDM

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Bakesbangpol disebutkan sebagai berikut; Diadakan diklat bagi anggota TKPD dan FKDM serta peningkatan koordinasi dengan stakeholder.



Gambar 23 Bupati Kediri memimpin Rapat bersama Sekretaris Daerah (Sumber Dinas Kominfo)

Tujuan 4

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Merujuk Kementerian PANRB, Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan secara mendasar. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi juga harus dilakukan secara mendasar, komprehensif, dan sistematik.

Merujuk Kementerian PANRB, dijelaskan bahwa Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Tim Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023, permasalahan tentang Reformasi Birokrasi permasalahan terutama belum optimalnya koordinasi dengan OPD-OPD pengampu dan OPD strategis. Terutama koordinasi dengan Evaluator Meso sebagai komposit pengukur Indeks Reformasi Birokrasi.

Hasil Kinerja

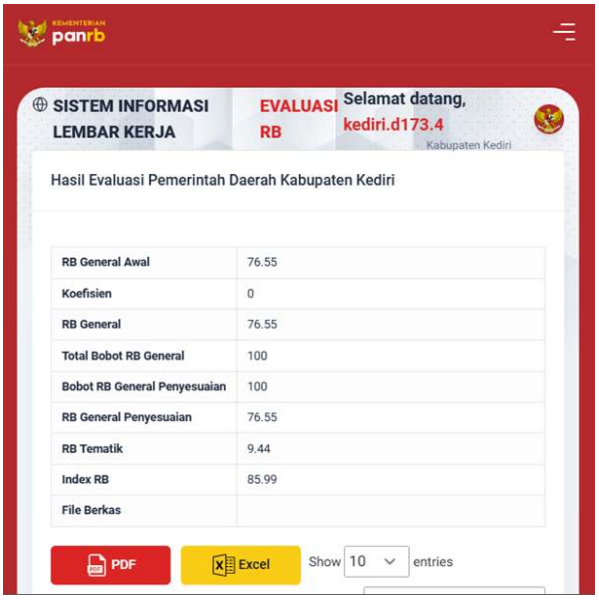
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77	85.99*	111.68%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023	Diukur oleh Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023	85.99*	Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Gambar 24 Hasil Evaluasi Sementara Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: portalrb.menpan.go.id dengan akun Pemerintah Kabupaten Kediri

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk pada penjelasan Tim Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Ex-Ante dan On-Going dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang menghambat implementasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut;

1. Tata Kelola (Manajemen) Implementasi Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik antara pihak Sekretariat STU (Strategic Transformational Unit) dari Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dengan Quality Assessor dari Inspektorat.
2. Kesadaran untuk meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dari masing-masing Pengampu berjalan dengan baik.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada penjelasan Tim Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Ex-Ante dan On-Going dari Inspektorat terdapat beberapa hal yang menghambat implementasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut;

1. Kausalitas dan Logis Pohon Kinerja Rencana Aksi belum optimal;
2.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada penjelasan Tim Reformasi Birokrasi, mengupayakan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi atas LHE RB Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024.



Sasaran 6

Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih

Pada tahun 2024 ini realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri adalah 67.11 mengalami penurunan dari 68.21 pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88.74 mengalami peningkatan dari 86.38 pada tahun 2023, realisasi Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah 3.85 mengalami peningkatan dari 3.66 pada tahun 2026, realisasi Opini BPK bertahan pada predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sasaran ini terbagi atas lima indikator yakni Nilai SAKIP, Nilai IKM, Opini BPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Dari keempat indikator tersebut diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih dapat dilaksanakan dengan baik. Karena dari ke-empat indikator tersebut dapat menggambarkan telah efektif dan bersihnya penyelenggaraan pemerintah.

Dalam mengukur sasaran ini, digunakan empat indikator utama dalam pelaksanaannya, yakni Nilai SAKIP untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja, IKM untuk mengukur kepuasan masyarakat, Opini BPK untuk mengukur kesehatan keuangan, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk mengukur tingkat persepsi anti korupsi pada tingkat masyarakat. Dalam laporan ini akan dimuat penjabaran kinerja atas masing-masing pencapaian indikator.

Dari penjabaran data diatas, terdapat stagnasi bahkan penurunan yang signifikan antara lain dalam bidang SAKIP yang tetap berada dalam predikat B selama 2018 - 2023 (dalam kurun waktu 6 tahun). Selain itu, nilai IKM juga mengalami fluktuasi penurunan pada tahun 2018 dan perlahan-lahan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Predikat Opini BPK tetap mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).



Penjelasan Kinerja **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus berjalan dengan pertanggungjawaban atas apa yang dilaksanakannya. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seluruh individu dalam satu organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pegawai terendah dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan akuntabilitas dengan prinsip transparancy, effectiveness, efficiency, dan strategic vision, karena terkait dengan aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut;

1. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas belum optimal;
2. Implementasi akuntabilitas bersifat *document based*;
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang belum dapat dilaksanakan oleh OPD;
4. Belum adanya satu pakem/panduan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja.

Hasil Kinerja

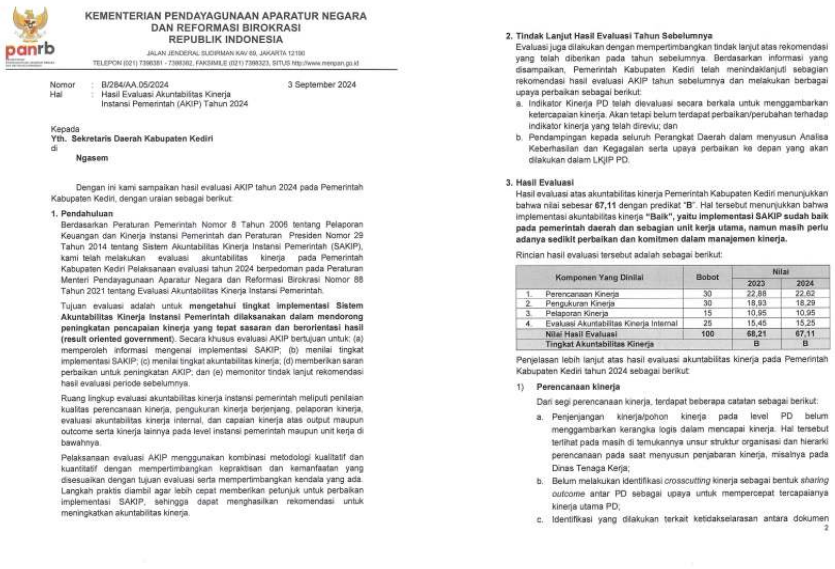
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	75	67.11		Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh Evaluator Kementerian PANRB sesuai dengan PermenPANRB 88/2021	Perencanaan Kinerja: 22,62 Pengukuran Kinerja: 18,29 Pelaporan Kinerja: 10,95 Evaluasi AKIP: 15,25	67,11	Surat KemenPANRB nomor B/284/AA.05/2024

Gambar Surat Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7399323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/2846/AA.05/2024 3 September 2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
di
Ngasem

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kediri Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja PD telah dievaluasi secara berkala untuk menggambarkan ketercapaian kinerja. Akan tetapi belum terdapat perbaikan/perubahan terhadap indikator kinerja yang telah direviu; dan
b. Pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Analisa Kebermasilan dan Kegagalan serta upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan dalam LKjIP PD.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa nilai sebesar **67,11** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	22,88	22,62
2. Pengukuran Kinerja	30	18,93	18,29
3. Pelaporan Kinerja	15	10,95	10,95
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,45	15,25
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**68,21**	**67,11**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Penjenjangan kinerja/pohon kinerja pada level PD belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja. Hal tersebut terlihat pada masih di temukannya unsur struktur organisasi dan hierarki perencanaan pada saat menyusun penjabaran kinerja, misalnya pada Dinas Tenaga Kerja;
b. Belum melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama PD;
c. Identifikasi yang dilakukan terkait ketidakselarasan antara dokumen

2

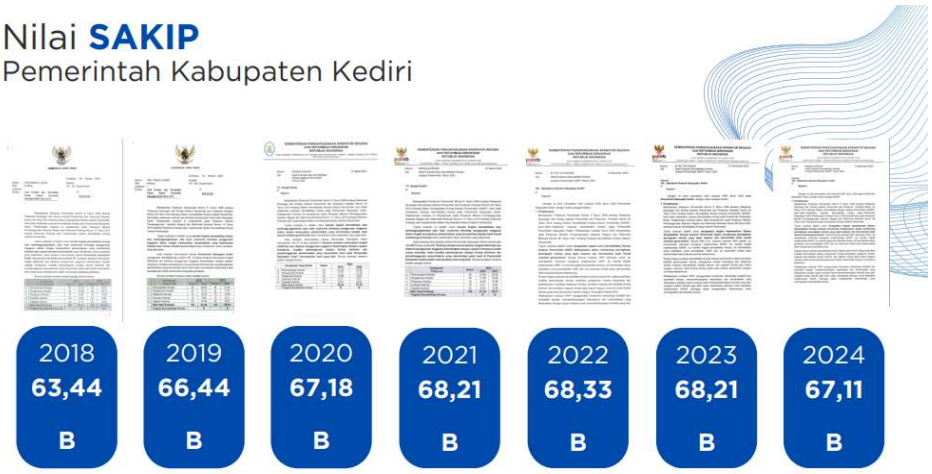
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah diambil melalui esr.menpan.go.id

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	82	67.11	81.84	Capaian masih berada di bawah target akhir RPJMD

Perbandingan dengan Nilai SAKIP Tahun sebelumnya

Gambar Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2018-2024



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (dimodifikasi)

Dari penjabaran data diatas, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi dan mengalami tren cenderung menurun pada dua tahun terakhir.

Benchmarking

Instansi Pemerintah	Nilai	Rujukan Data	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Kediri	67.11 (B)	Surat KemenPANRB nomor B/284/AA.05/2024	
Pemerintah Kota Blitar	80.06 (A)	https://lenteratoday.com/kota-blitar-satu-satunya-di-jawa-timur-dan-indonesia-raih-kenaikan-predikat-sakip-2024-dari-bb-menjadi-a/	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Blitar	B	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:11	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Pacitan	B	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:26	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kota Batu	B	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:26	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Jombang	BB	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:20	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	BB	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:20	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kota Kediri	BB	https://www.youtube.com/watch?v=_wmM35DEOPY menit 1:56:20	Lebih Tinggi dari Kabupaten Kediri

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP adalah sebagai berikut;

1. Adanya kesadaran dari masing-masing OPD untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Terselenggarakannya Diklat Akuntabilitas Kinerja kepada evaluator Inspektorat;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP adalah sebagai berikut;

1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP dari Kementerian PANRB belum optimal;
2. Komunikasi proses-proses perbaikan Akuntabilitas Kinerja dengan Evaluator Kementerian PANRB belum dapat berjalan optimal;
3. Adanya perubahan dan transisi periode pemerintahan;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Tim SAKIP adalah sebagai berikut;

1. Mengoptimalisasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Kementerian PANRB;
2. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan Evaluator Kementerian PANRB dalam optimalisasi perbaikan-perbaikan Akuntabilitas Kinerja;
3. Menyusun Arsitektur Kinerja/Penjenjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri menyusul perubahan dan transisi periode pemerintahan;



Penjelasan Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggara pelayanan public. Selain itu pula, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu ,data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Tim SKM Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Tindaklanjut atas Rencana Tindak Lanjut Laporan IKM tidak dapat optimal karena bersifat lintas sektor;
2. Penggunaan Aplikasi Sukma e-Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat) dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memerlukan adaptasi bagi penerima layanan sebagai responden.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.35	88.74	102.77%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;	Diukur dengan lokus Seluruh OPD Layanan dengan Sampel 66 UPP (Unit Pelayanan Publik) dengan metode Survei kepada masyarakat (penerima layanan) berdasarkan 9 unsur	88.74	Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

Gambar Penjelasan Mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,47	3,46	3,40	3,84	3,45	3,49	3,54	3,77	3,50
Kategori	B	B	B	A	B	B	A	A	B
IKM Unit Layanan	88,74 / A (Sangat Baik)								

Keterangan :			
Unsur 1	: Persyaratan	Unsur 6	: Kompetensi Pelaksana
Unsur 2	: Prosedur	Unsur 7	: Perilaku Pelaksana
Unsur 3	: Waktu Penyelesaian	Unsur 8	: Pengelolaan Pengaduan
Unsur 4	: Biaya/tarif	Unsur 9	: Sarana dan Prasarana
Unsur 5	: Kesesuaian Produk Layanan		

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

.

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88.74	103.19%	Sangat Baik

Benchmarking

Perbandingan dengan IKM Tahun sebelumnya

Gambar Perkembangan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kediri Tahun 2024

Perbandingan dengan Instansi Pemerintah lainnya

Instansi Pemerintah	Nilai	Rujukan Data	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Jombang	89.90	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Lebih baik dari Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Kediri	88.74	Laporan SKM Kabupaten Kediri Tahun 2024	-
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	87.51	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Kabupaten Kediri Lebih baik
Pemerintah Kabupaten Batu	84.09	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Kabupaten Kediri Lebih baik
Pemerintah Kabupaten Blitar	85.16	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/kabkot?tahun=2024	Kabupaten Kediri Lebih baik

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk penjelasan dari Tim SKM dalam hal ini Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut
;

1. Dukungan Pimpinan (Bupati Kediri) dalam meningkatkan pelayanan di Kabupaten Kediri;
2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan yang berjalan dengan baik di beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP);
3. Penyederhanaan SOP dan Digitalisasi layanan dengan Scan Barcode dan banyak hal.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Tim SKM dalam hal ini Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut;

1. Terdapat 6 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang tidak membuat Laporan SKM;
2. Terdapatnya Lintas Kewenangan yang bersifat usulan dalam implementasi tindak lanjut seperti penambahan SDM yang memerlukan koordinasi dengan BKD, penambahan dan renovasi tempat kerja

yang memerlukan koordinasi dengan Dinas Perkim, dan hal-hal lainnya yang mana belum tentu dilaksanakan, bergantung pada kesiapan OPD yang berwenang;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Tim SKM dalam hal ini Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut;

1. Mendorong penyusunan SKM pada seluruh UPP secara komperhensif;
2. Meningkatnya koordinasi lintas kewenangan atas perbaikan kinerja pelayanan publik.



Penjelasan Kinerja **Opini BPK Terhadap LKPD**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah istilah atau opini yang diberikan oleh Auditor kepada suatu entitas keuangan, khusus untuk pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik kepada Pemerintah Pusat berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Opini audit merupakan pernyataan dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit, kewajaran ini menyangkut hal-hal berkaitan materialitas, posisi keuangan, serta arus kas.

Permasalahan

Merujuk penjelasan yang disampaikan oleh BPKAD, potensi permasalahan general dalam proses pengelolaan keuangan daerah seringkali berasal dari beberapa aspek yang saling terkait, sebagai berikut :

1. Potensi perencanaan anggaran yang kurang relevan, di mana anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan;
2. Potensi keterlambatan proses penyusunan dan pengesahan anggaran, yang menghambat kelancaran operasional dan pelaksanaan program;
3. Potensi pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, dengan adanya pemborosan anggaran atau alokasi yang tidak tepat sasaran serta pencatatan aset daerah, di mana banyak aset yang tidak tercatat dengan baik atau tidak dikelola secara optimal;;
4. Potensi ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menyebabkan laporan keuangan daerah tidak memenuhi standar yang berlaku;
5. Potensi kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari internal maupun eksternal, yang membuka peluang untuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran;
6. Potensi keterbatasan sistem informasi dan teknologi, seperti kurangnya penggunaan sistem yang terintegrasi, membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efektif dan transparan, dan;

7. Potensi keterbatasan SDM yang kompeten, di mana masih terdapat pengelola keuangan yang kurang terlatih dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPK	Diukur oleh BPK	WTP	Opini atas LKPD

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai

Benchmarking

Instansi Pemerintah	Nilai	Rujukan Data	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Kediri	WTP	Diolah oleh BPKAD	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	WTP	Diolah oleh BPKAD	Sama dengan Kabupaten Kediri
Pemerintah Kota Kediri	WTP	Diolah oleh BPKAD	Sama dengan Kabupaten Kediri

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk data dari BPKAD disampaikan sebagai berikut:

1. Proses koordinasi dan komunikasi yang efektif antar bidang, pengelolaan dokumen yang rapi dan terstruktur, proses administratif yang efektif dan efisien;
2. Proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara realistis dan berbasis kebutuhan nyata melalui proses checking secara berlapis untuk meminimalisir kenaikan nilai SiLPA dikomparasikan dengan tahun sebelumnya sehingga gap antara anggaran dengan realisasi tidak terlalu tinggi;
3. Dukungan secara utuh melalui alokasi anggaran yang memadai untuk setiap program dan kegiatan;
4. Pengawasan pengelolaan kas dan arus kas yang efisien dan efektif;
5. Proses penerapan regulasi SAP secara konsisten dan kontinyu dalam setiap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

6. Proses pengadaan, penggunaan, pemanfataan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan telah terekam secara rinci melalui e-SIMBADA sehingga proses pencatatan aset menjadi terpadu, terintegrasi, dan real time;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan BPKAD adalah sebagai berikut:

1. Potensi keterlambatan penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Potensi keterlambatan proses pencairan dana, ketidaksinkronan dokumen pencairan dengan anggaran kas, dan keterlambatan pelaporan diakhir tahun;
3. Potensi keterlambatan laporan Barang Milik Daerah;
4. Belum sempurnanya proses integrasi data dengan sistem pada Aplikasi SIPD Kemendagri yang berimplikasi terhadap ketidaksesuaian antara informasi yang tercatat pada sistem dengan data rill yang terjadi;
5. Rendahnya tingkat pastisipatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assesment) yang sehingga berimplikasi terhadap keterlambatan proses penyusunan
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena tidak ada deteksi dini jika terjadi kekeliruan/data bias;
7. Keterbatasan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai terkait Informasi Teknologi (IT) dan pengelolaan keuangan daerah;

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan BPKAD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan cut off penyusunan dan reviu secara berkala terhadap rancangan KUA PPAS, KUPA PPAS, maupun Rancangan APBD;
2. Melakukan early warning H-1 bulan sebelum akhir tahun kepada setiap unit keungan SKPD, melakukan percepatan proses pengajuan dan verifikasi berkas, dan mengoptimal kan seluruh pegawai bidang pengampu dan keterlibatan secara sukarela pegawai bidang lain untuk saling membantu jika dibutuhkan;
3. Reviu berkala terhadap laporan Barang Milik Daerah (BMD);
4. Melakukakan rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assesment) rutin setiap bulan terhadap masing-masing unit keuangan SKPD mulai dari penerimaan, kas, aset, hingga akuntansi;
5. Membuat reward & punishment terhadap unit keuangan SKPD jika tidak ikut terlibat aktif dalam proses rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assesment) berupa tidak dicairkannya berkas SP2D (masih tahap short-term plan untuk tahun 2025);
6. Melakukan perekrutan pegawai baru yang memiliki kapasitas mumpuni dibidang Informasi Teknologi (IT) yang tersebar dalam setiap bidang teknis pengelola keuangan daerah, mengikuti kegiatan Free webinar yang sering diadakan oleh Kemendagri/Kemenkeu terkait penyusunan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom, diklat bersama dan bimbingan teknis menjadikan faktor yang urgensial dibutuhkan untuk setiap pegawai dalam rangka peningkatan kualitas SDM.



Penjelasan Kinerja **Indeks Persepsi Anti Korupsi**

Menurut BPS, berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption) masyarakat Indonesia.Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Data yang dikumpulkan melalui IPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan (extortion) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Inspektorat, dijelaskan sebagai berikut;

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah;
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum Optimal.

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.74	3.85	102.94%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	3.85	Berita Resmi Statistik

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institutional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.8	3.85	101.32%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk data dari Inspektorat, Faktor Pendukung dalam mencapai sasaran strategis yaitu Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Anggaran, Sarana dan Prasarana

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Darah belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja;
2. SDM APIP belum mampu menjadi role model bagi unit organisasi lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Perencanaan Pengawasan belum menggunakan profil risiko yang dimiliki seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kediri;
4. Belum melakukan evaluasi secara menyuluruh atas register risiko yang dimiliki seluruh OPD;
5. Belum melakukan Tindak Lanjut atas telaah sejawat eksternal secara berkelanjutan;
6. Peran reviu berjenjang atas setiap pengawasan belum optimal;
7. Kegiatan reviu internal antar irban untuk pelaksanaan Pengawasan Tahun 2023 dan 2024 belum dilaksanakan;
8. Laporan Ikhtisar hasil pengawasan kepada manajemen belum memuat isu strategis yang ada di daerah setiap semester;
9. Anggaran pengawasan Inspektorat belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023;
10. Evaluasi belum dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap pola koordinasi dan sistem koordinasi internal Inspektorat, partisipasi Inspektorat di dalam forum strategis pemerintah daerah, identifikasi terhadap area pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran pengawasan, serta kebijakan pelaporan;

11. Probity Audit atas proyek strategis Pemda dan menggugah dokumennya ke dalam aplikasi PK APIP belum dilakukan;
12. Audit ketaatan belum berdasarkan pada area yang berisiko tinggi terkait perijinan, rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai, perencanaan dan penganggaranAPBD, hibah, bansos dll; dan
13. Audit kinerja belum berdasarkan atas program strategis daerah yang mendukung sektor unggulan/perekonomian daerah lintas sektoral (cross cutting) seperti ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, kemiskinan ekstrim, stunting lintas sektoral serta belum melaksanakan pemantauan hasil audit kinerja agar ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Kediri melalui:
    a. Pemenuhan jumlah SDM Inspektorat Daerah agar dapat memenuhi perhitungan kebutuhan SDM; dan
    b. Pemenuhan alokasi anggaran guna mendukung pengawasan intern dan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Inspektorat Daerah sesuai dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beban kerja Inspektorat.
2. Inspektur Kabupaten Kediri menginstruksikan untuk:
    a. Mengimplementasikan seluruh infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 secara terus menerus sesuai dengan pedoman, sehingga menjadi sebuah budaya (culture) organisasi APIP untuk mencapai pada praktik-praktik profesional yang terbaik;
    b. Melakukan evaluasi secara terus menerus pada setiap topik dan elemen;
    c. Mendokumentasikan elemen menuju Level 4 serta mengimplementasikan infrastruktur untuk mencapai praktik praktik profesional yang terbaik;
    d. Melakukan PPM/PKS yang lebih intensif dengan materi audit kinerja, probity audit ataupun materi yang berkaitan dengan current issues;
    e. Melakukan tertib administrasi mengenai pemberian jasa konsultasi;
    f. Meningkatkan pengembangan SDM pada Inspektorat secara optimal dengan mengikuti pegawai mengikuti sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CRMO,SAAP,CRMP,QRMP dll);
    g. Memastikan tindak lanjut atas saran/rekomendasi hasil audit kinerja;
    h. Meningkatkan partisipasi aktif para pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kediri dalam Organisasi profesi;
    i. Melakukan assurance dan konsultasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri;
    j. Melakukan survey kepuasan pegawai dan stakeholder secara berkelanjutan dan;
    k. Menindaklanjuti atas Aol peningkatan Kapabilitas APIP yang perlu mendapatkan perbaikan.

Analisa Efisiensi

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	740,395,029,749.00	729,180,657,640.00	98.49%	Zona Hijau
	Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Opini BPK terhadap LKPD				
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	89.48%	98.49%	0.31%	Efisien
	Indeks Kepuasan Masyarakat	102.77%			
	Opini BPK terhadap LKPD	100.00%			
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	102.94%			



Sasaran 7

Meningkatkan Profesionalitas ASN

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan motor penggerak pelaksanaan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini pegawai ASN juga bertugas dalam melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku jabatan pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak pakar pemerintahan dan administrasi negara, berhasil atau tidaknya perjalanan pemerintahan ditentukan 'man behind the gun' jika dalam pemerintahan maka para ASN.

Maka diperlukan adanya pengukuran tingkat profesionalitas pada ASN itu sendiri. Pengukuran tersebut dilakukan melalui/diatur dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019-Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini sejatinya ditetapkan dalam tujuan melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas ASN juga memiliki standar dasar dengan kriteria yang digunakan dalam mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Terdapat instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN seperti bahan, alat, dan cara yang akan digunakan dalam mendapatkan data indeks profesional berupa dimensi, identitas dari pegawai ASN, dan deskripsi indikator.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai faktor utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) profesionalitas dan integritas menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Upaya peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, dan efisiensi birokrasi di tingkat lokal.

Permasalahan

Merujuk dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Berikut adalah beberapa latar belakang penting terkait upaya peningkatan profesionalitas ASN di Kabupaten Kediri

1. Tuntutan Reformasi Birokrasi
2. Penguatan Kapasitas ASN
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Mendorong Pemerataan Pembangunan Daerah
5. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
6. Tantangan SDM ASN di Daerah

Selain hal diatas, beberapa permasalahan terkait kepegawaian adalah sebagai berikut;

1. Beberapa ASN mengalami demotivasi untuk meningkatkan profesionalitas karena faktor rutinitas pekerjaan yang monoton;
2. Belum ada regulasi tentang pengembangan kompetensi ASN di daerah;
3. Belum ada standar kompetensi untuk semua jabatan sebagai dasar penyusunan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak dapat mengetahui secara akurat terkait kompetensi ASN yang mengakibatkan adanya gap kompetensi;
4. Belum terpenuhinya jumlah ASN sesuai kebutuhan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK);
5. Tantangan dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN;
6. Masih ditemukan pelanggaran disiplin PNS;
7. Belum terwujudnya satu data kepegawaian.

Perencanaan

Berdasarkan perencanaan dalam RKPD dan Perjanian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah 70,1. Namun target tersebut mengalami penajaman dan pencermatan ulang dari BKD Kabupaten Kediri untuk ditingkatkan targetnya menjadi 81.62.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Parade Webinar Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan capaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Kediri;
2. Menyelenggarakan diklat manajerial Kepala Puskesmas untuk menunjang pelayanan prima pada fasilitas kesehatan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 1 Angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 1 Angkatan, mengirim peserta 3 orang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) ke BPSDM Jawa Timur dan mengirim peserta 10 orang untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa level 1 di BPSDM Jawa Timur;
3. Menyelenggarakan program BKD Melekat (BKD Melayani Lebih Dekat) sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan public terdiri dari konsultasi tugas belajar, konsultasi kepegawaian berupa mutasi, kenaikan pangkat, penyusunan SKP dan PMM khusus guru dan sosialisasi disiplin ASN;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala;
5. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan disiplin dan monitoring evaluasi disiplin pegawai secara berkala.
6. Mengeluarkan Surat Edaran (SE) seperti netralitas ASN. Sejauh ini sampai dengan triwulan III tahun 2024 sudah terbit 3 Surat Edaran terkait dengan Netralitas ASN.

Hasil Kinerja

Hasil kinerja secara umum IP ASN pada Tahun 2023 telah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 71,00 tetapi masih dibawah IP ASN provinsi yaitu sebesar 89,59.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BKN	Diukur oleh BKN Berdasarkan 4 Komponen: 1. Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Disiplin	Kualifikasi 21,53 Kompetensi 30,12 Kinerja 24,97 Disiplin 5 Total IP ASN 81,62	Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya tanggal 9 Oktober 2024 Nomor /B-AK.04/SD/KR.II/2024



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL II

Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman No. 6 Waru -Sidoarjo
Telepon (031) 8533341 – 8531039
Laman: www.surabaya.bkn.go.id; Pos-el:kanreg2.surabaya@bkn.go.id

Nomor : 422/B-AK.04/SD/KR.II/2024 — Surabaya, 9 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN Surabaya

Kepada Yth.
Plh. Bupati Kediri
di
Kabupaten Kediri

Berkenaan dengan surat Direktur Jabatan ASN nomor: 310/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN, melalui surat ini kami menyampaikan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kediri. Adapun nilai terbagi menjadi IP PNS, IP PPPK, dan IP ASN sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara

Tembusan:
Yth. Kepala BKD Kabupaten Kediri

Lampiran Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya
Nomor : /B-AK.04/SD/KR.II/2024
Tanggal : 9 Oktober 2024

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Kediri

JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
PNS	6.760	20,95	31,83	24,97	5	82,76	Tinggi
PPPK	1.137	24,95	19,96	24,95	5	74,86	Sedang
ASN	7.897	21,53	30,12	24,97	5	81,62	Tinggi

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	81.62	116.43%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	12,338,157,561.00	11,288,326,422.00	91.49%	Zona Hijau

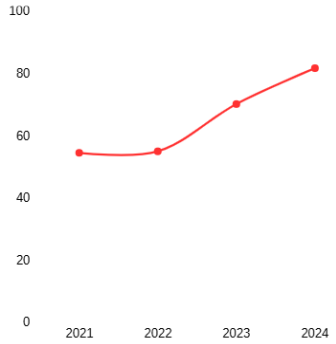
Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	116.43%	91.49%	24.94%	Efisien

Benchmarking

Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Kediri

Gambar Perkembangan Indeks Professionalitas ASN Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024



Sumber: LKjIP Kabupaten Kediri 2023 dan data BKPSDM Kabupaten Kediri Tahun 2024 (dimodifikasi)

Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN:

1. Provinsi : 89,59
2. Kabupaten Kediri : 81,62

Pihak-pihak yang terlibat

Merujuk data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Kementerian PAN RB
2. Badan Kepegawaian Negara
3. Lembaga Administrasi Negara
4. BKN Kanreg II Surabaya
5. BPSDM Jawa Timur
6. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
7. PT. Taspen
8. Perguruan Tinggi

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Kepegawaian	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29,82	30,47	102,18	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	36,18	51,65	142,76	Sangat Mendukung

Faktor-faktor pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan yang rutin dan terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan maupun tema—tema pengembangan kompetensi yang relevan dengan kondisi terkini membantu ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
2. Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, seperti teknologi sehingga ASN dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dari mana saja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala yakni setiap 3 bulan sekali sehingga kinerja ASN tetap terpantau dan jika terdapat masalah bisa segera diselesaikan sedini mungkin;

4. Layanan kepegawaian yang mudah dan tidak berbelit-belit dengan prosedur yang sederhana sehingga memudahkan pengguna layanan.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pegawai tentang pentingnya mengikuti pengembangan kompetensi untuk dapat menyesuaikan baik dari sisi keterampilan maupun pengetahuan dengan kondisi di era digital saat ini;
2. Belum optimal dalam mengelola beban kerja yang cukup tinggi sehingga waktu bekerja habis untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat administratif sehingga menyebabkan kurangnya motivasi pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi;
3. Seluruh pegawai belum sepenuhnya memahami tentang peraturan disiplin ASN;
4. Masih terdapat ASN yang belum melek teknologi.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program-program pengembangan kompetensi disesuaikan dengan isu-isu terkini dan relevan dengan kondisi kerja yang sebernarnya di instansi pemerintahan;
2. Mengupayakan dalam salah satu program pengembangan kompetensi (webinar/podcast) selalu memasukkan tema tentang manajemen stres dan/atau yang berhubungan dengan Kesehatan baik fisik maupun mental untuk dapat mendorong motivasi pegawai agar lebih produktif;
3. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan disiplin ASN, sosialisasi dilakukan baik secara offline maupun dilakukan secara online melalui media sosial BKD dan pop up yang muncul pada halaman depan aplikasi SIPRES, melakukan pendampingan kepada satuan kerja yang membutuhkan konsultasi terkait langkah preventif sebelum dijatuhi hukuman disiplin;
4. Menyelenggarakan pelatihan teknis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

Merujuk data yang disampaikan oleh BKPSDM adalah sebagai berikut:

1. Instansi Terbaik II Realisasi SK Kenaikan Pangkat Wilayah Kanreg II BKN Surabaya
2. Instansi Terbaik I Realisasi SK Pensiun Wilayah KANREG II BKN Surabaya
3. Penghargaan atas Sinergitas dan Dukungan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sertifikat Sebagai Mitra Penilaian Kompetensi dan Potensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



Sasaran 8

Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, transformasi digital menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Kediri, sebagai salah satu daerah yang terus berinovasi, menyadari pentingnya adaptasi teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan program "Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik" dengan tujuan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di mana memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan terpercaya. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.

Semakin tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan yang lebih cepat, dapat diandalkan, dan terpercaya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dapat memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Merujuk Kementerian PANRB, SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, pelaksanakan SPBE juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Permasalahan

Merujuk dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
   Kurangnya jumlah dan keterbatasan kompetensi SDM Informatika di Dinas Kominfo membuat implementasi transformasi digital menjadi kurang optimal.

2. Anggaran yang Terbatas:
   Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem digital, pelatihan SDM, pemeliharaan infrastruktur, dan pembaruan teknologi menjadi kendala dalam mempercepat transformasi digital.
3. Integrasi Sistem dan Data yang Belum Optimal:
   Adanya sistem yang masih terfragmentasi dan tidak terintegrasi antar OPD menyebabkan ketidakefisienan, serta data yang belum terpadu.
4. Resistensi terhadap Perubahan:
   Adanya resistensi dari sebagian aparatur pemerintah atau masyarakat terhadap perubahan dari sistem manual ke digital, baik karena ketidaksiapan maupun ketidaknyamanan dengan teknologi baru, menghambat proses transformasi.
5. Banyaknya ancaman serta serangan Siber terhadap sistem elektronik yang dikelola Pemerintah.

Perencanaan

Berdasarkan perencanaan dalam RKPD dan Perjanian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah 70,1. Namun target tersebut mengalami penajaman dan pencermatan ulang dari BKD Kabupaten Kediri untuk ditingkatkan targetnya menjadi 81.62.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disebutkan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan jumlah SDM TIK melalui pembukaan program PKL dan magang seluas-luasnya
2. Pengoptimalan aplikasi IOP untuk integrasi data dan aplikasi
3. Optimalisasi pengelolaan data melalui penjadwalan masing- masing OPD untuk piket di Ruang Command Center
4. Pengoptimalan aplikasi PESONA untuk pelayanan administrasi desa secara digital
5. Melakukan berbagai pelatihan pada OPD dan desa untuk pengoptimalan penggunaan aplikasi yang dikembangkan Kominfo
6. Optimalisasi kapasitas server yang terbatas melalui backup dan pemeliharaan secara rutin
7. Penggunaan firewall, antivirus, SSL, serta berbagai aplikasi yang bisa memberi perlindungan terhadap serangan siber
8. Penguatan manajemen akses yang ketat

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.3	4.62	107.44%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh KemenPANRB	Diukur oleh KemenPANRB	4.62	Keputusan MenPANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: LHE SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	5	4.62	92.40%	Target Akhir RPJMD belum Terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	5,187,306,000.00	5,079,466,720.00	98%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	102.21%	98%	4.29%	Efisien

Benchmarking

Wilayah Lain	Indeks SPBE	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	4.75	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	Data Kompilasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur	4.45	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Banyuwangi	4.77	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Kediri	4.62	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kota Kediri	3.89	Kabupaten Kediri lebih baik	
Kabupaten Nganjuk	3.84	Kabupaten Kediri lebih baik	
Kabupaten Tulungagung	3.78	Kabupaten Kediri lebih baik	

Pihak-pihak yang Terlibat

Internal pemkab:

1. Seluruh OPD
2. Seluruh Kecamatan dan Desa

Eksternal Pemkab (Pemerintah & Swasta)

1. Diskominfo Prov Jatim
2. BPS Kab Kediri
3. SMK disekitar Kediri
4. PTN dan PTS disekitar Kediri
5. PT. Telkom Indonesia
6. PT. LDP (Lintas Data Prima)
7. PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	4.5	4.62	102.67%	Sangat Mendukung
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	2.5	125.00%	Sangat Mendukung
Program Penyeenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3	3.1	103.33%	Sangat Mendukung
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	4	4.2	105.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Dukungan dari pimpinan baik dari sisi kebijakan maupun Anggaran
2. Kemampuan dari SDM Kominfo yang mampu beradaptasi terhadap keterbatasan yang ada
3. Sinergi yang baik antara Kominfo dengan OPD yang lain
4. Kompetensi yang mencukupi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan optimal

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur server yang dimiliki Dinas Kominfo dan mengelola berbagai aplikasi yang membutuhkan resource besar
2. Kurangnya jumlah SDM sehingga belum optimal dalam mengatasi masalah yang muncul
3. Kurangnya kompetensi terkait pengamanana sistem aplikasi dari berbagai serangan dan ancaman siber yang muncul
4. Rendahnya kesadaran terhadap praktik keamanan siber yang baik dari sebagaian besar ASN

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur server melalui pengadaan baru serta mulai meingkatkan penggunaan PDN
2. Meningkatkan jumlah SDM TIK berkualitas baik melalui PPPK maupun ASN tambahan
3. Mendorong SDM TIK di Kominfo untuk mengikuti berbagai pelatihan teknis TIK dengan biaya penuh dari Kominfo
4. Melakukan berbagai sosialisasi terkait kesadaran keamanan siber maupun kesadaran berselancar di dunia maya

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

1. Dhahanapura Award - peningkatan satu data kab kediri
2. Mas Dito Award – masyarakat digital online



Gambar: Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengunjungi Pabrik Roti Jordan (PT Jenggolo Maju Mapan) di Branggahan, Ngadiluwih (sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kediri)

Tujuan 5

Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah

Merujuk data Kementerian Keuangan, Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitatif change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan keluaran wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah makin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in population), dan kemajuan teknologi (technological progress).

Merujuk Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Daya saing daerah (IDSD) adalah ukuran kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain. IDSD juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Merujuk perkembangan Tujuan IDSD adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat daya saing daerah secara komprehensif
2. Merefleksikan tingkat produktivitas daerah
3. Menilai keberhasilan suatu daerah dalam bersaing dengan daerah lain
4. Mendukung daya saing nasional
5. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah
6. Aspek daya saing daerah
7. Kemampuan ekonomi daerah
8. Fasilitas wilayah atau infrastruktur
9. Iklim berinvestasi
10. Sumber daya manusia

11. Stabilitas pasar
12. Kapasitas tenaga kerja
13. Akses keuangan
14. Ukuran pasar
15. Peningkatan daya saing daerah
16. Pemerintah mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki stakeholder
17. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
18. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah
19. Mengoptimalkan ekosisten, potensi, dan berbagai hasil iptek dan inovasi

Hasil Kinerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.8	4.95	103.13%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	4.95	Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 Nomor Publikasi 35060.25002 Hal 640

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6.22	4.95	79.58%	Target Akhir RPJMD belum Terlampaui

Penjelasan Umum Kinerja

Melihat komposisi perekonomian Kabupaten Kediri pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 4.95. Dari data tersebut terjadi perubahan komposisi perekonomian di Kabupaten Kediri yang awalnya didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian sebesar 22.33% mengalami penurunan komposisi menjadi 21.33%. Kini komposisi terbesar perekonomian di Kabupaten Kediri adalah Industri Pengolahan yang awalnya 22.09% menjadi 23.06%.



Gambar: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Bandara Internasional Dhoho, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Sumber: Diskominfo Kab. Kediri)

Sasaran 9

Meningkatnya Investasi di Daerah

Pada tahun 2024, Realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah di Kabupaten Kediri adalah 27.99% dengan Nilai Realisasi 20.090.644.396.746,00 lebih tinggi dari Nilai Realisasi Tahun 2023 yakni 15.454.428.960.228,00.

Sebagian ahli ekonomi memandang investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut kajian dari Kementerian Sekretariat Negara, peningkatan investasi diyakini memberikan andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi, ditengah keterbatasan APBD dan APBN menjadi pilihan strategis yang tepat dalam membalikkan perlambatan ekonomi. Melalui optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan potensi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan realisasi investasi yang baik. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 direncanakan akan tumbuh sebesar 5%. Hal tersebut ditinjau dari ekspektasi pertumbuhan di sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peningkatan investasi di Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Persentase pertumbuhan investasi di daerah adalah prosentase kenaikan/ penurunan investasi yang masuk ke Kabupaten Kediri dalam periode tertentu.

Permasalahan

Merujuk data dari DPMPTSP disebutkan permasalahan-permasalahan Tren pertumbuhan investasi di daerah cenderung fluktuatif karena sebagian besar investasi yang masuk ke Kabupaten Kediri Tahun 2019–2023

bersumber dari investasi Bandara, sehingga ketika proyek Bandara selesai, ada kemungkinan penurunan investasi

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Pertumbuhan Investasi Daerah dalam RPJMD adalah 7,0. Target tersebut sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Pengawasan Penanaman Modal;
2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
3. Pelayanan Pendampingan Keliling dan Pelayanan Konsultasi/ Pendampingan di Kantor;
4. Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Usaha Berskala Menengah- Besar dan UMKM;
5. Penyusunan Investment Ready to Offer (I-PRO)
6. Promosi Langsung atas Potensi dan Peluang Investasi ke Pengusaha Luar Daerah.

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah yang diambilkan dari Rekapitulasi Investasi Daerah Kabupaten Kediri, disebutkan bahwa realisasi Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Kediri adalah 26.16%. Realisasi tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7.0%	29.99%	425.45%	Sangat Baik

Gambar Rekapitulasi Pengukuran Pertumbuhan Investasi Tahun 2023



URAIAN	2023	2024
A. Realisasi Investasi (Tahun n)	Rp. 3.204.083.366.778	Rp. 4.636.215.436.458
- PMA	Rp. 35.290.571.234	Rp. 33.673.500.000
- PMDN	Rp. 3.168.792.795.544	Rp. 4.602.541.936.458
B. Nilai Investasi (Akumulasi)/ (A (n)+B (n-1))	Rp. 15.454.428.960.288	Rp. 20.090.644.396.746

RUMUS PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI TAHUN 2023

Nilai Investasi Tahun 2024 - Nilai Investasi Tahun 2023 / Nilai Investasi Tahun 2023 x100%

Rp. 20.090.644.396.746 - Rp. 15.454.428.960.288 / Rp. 15.454.428.960.288 x100%

Rp. 4.636.215.436.458 / Rp. 15.454.428.960.288 x100%

30.00

Sumber : LKIIP DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2023-2024

29,999

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (diolah)

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Nilai Investasi Tahun n - Nilai Investasi Tahun n-1 / Nilai Investasi Tahun n-1 x 100%	(20.090.644.396.746-154.54.428.960.288)/ 15.454.428.960.288 x 100%	29.99%	Dokumen Rekapitulasi Realisasi Investasi

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	9%	29.78%	330.89%	Target RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	7,869,748,279.00	7,417,337,605.00	94.25%	331.20%

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	425.45%	94.25%	331.20%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

2021	2022	2023	2024
-	28.48%	26.16%	29.78%

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh DPMPTSP didapati data Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Perbandingan Pertumbuhan Investasi Daerah

Wilayah	Pertumbuhan Investasi	Keterangan	Rujukan Data
Kabupaten Kediri	29.78%	-	Data Rekapitulasi DPMPTSP Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur	1.52%	Kabupaten Kediri Lebih Baik	
Nasional	29.78%	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	

Pihak-pihak yang Terkait

DPMPTSP Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan OPD terkait berperan pada kegiatan pengawasan dan penyelesaian permasalahan dan hambatan penanaman modal serta fasilitasi kemitraan usaha;

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tabel Perbandingan Pertumbuhan Investasi Daerah

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100%	Sangat Mendukung
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	82%	122.15%	148.96%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari DPMPTSP, Ada pelaporan susulan investasi Bandara sehingga sebagian besar investasi yang masuk ke Kabupaten Kediri Tahun 2024 bersumber dari investasi Bandara

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari DPMPTSP, Ketika proyek Bandara selesai, ada kemungkinan penurunan investasi.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari DPMPTSP, Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang penanaman modal.

Apresiasi Kinerja

Merujuk data dari DPMPTSP, Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 **“Kategori Sangat Baik”**



Sasaran 10

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Kediri mencapai Rp 12,39 juta per tahun atau Rp. 1.032.333,00 . Capaian ini meningkat 436 ribu rupiah (3,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 2,81 persen per tahun.

Merujuk penjelasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, struktur industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan, hingga akses pasar baik pasar tradisional maupun pasar non tradisional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelemahan daya beli masyarakat pada masa pandemic covid-19 secara umum menyebabkan penurunan ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat turunnya kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Penyebab dari menurunnya kemampuan daya beli adalah tingginya angka PHK dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi daya beli masyarakat sebagai berikut;

1. Perubahan Harga
2. Inflasi
3. Pendapatan Riil Masyarakat
4. Nilai Tukar Mata Uang
5. Pajak
6. Lapangan Pekerjaan
7. Ketersediaan Kredit
8. Suku Bunga

Daya beli masyarakat secara umum dapat ditinjau sebagai faktor kunci dalam perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Secara langsung daya beli masyarakat memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat dapat diasumsikan pula semakin sejahtera masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi dan satuan komoditas. Semakin tinggi indeks pengeluaran masyarakat, semakin masyarakat dapat mengonsumsi apa yang mereka butuhkan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan sektor perdagangan adalah dengan acuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan terkait dengan meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Mikro (IKM) dengan pendekatan strategis yakni kestabilan harga dan jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dalam pasar ekonomi di Kabupaten Kediri.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum sesuai SNI
2. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3. Belum optimalnya kegiatan ekspor oleh pelaku usaha
4. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga
5. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri
6. Rendahnya produktivitas Industri
7. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan
8. Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industry

Merujuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data koperasi dan UMKM berbasis sistem informasi
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi pemasaran produk anggota koperasi dan UMKM
3. Peningkatan kapasitas, kapabilitas, inovasi koperasi dan UMKM
4. Kemudahan perizinan / legalitas untuk UMKM
5. Profesionalisme SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan
6. Kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dan UMKM dengan pengusaha besar
7. Digitalisasi dan modernisasi koperasi
8. Keberlanjutan / kontiunuitas produksi produk UMKM

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Indeks Pengeluaran sebesar Rp. 1.145.155,00 . Target tersebut sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

Merujuk penjelasan dari Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan Mengelola Sarana Distribusi Perdagangan
2. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3. Mengendalikan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
4. Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
5. Pengembangan Ekspor
6. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Menyusun, Menerapkan dan Mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
9. Menyediakan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Merujuk penjelasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data koperasi dan UMKM berbasis sistem informasi
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi pemasaran produk anggota koperasi dan UMKM
3. Peningkatan kapasitas, kapabilitas, inovasi koperasi dan UMKM
4. Kemudahan perizinan / legalitas untuk UMKM
5. Profesionalisme SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan
6. Kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dan UMKM dengan pengusaha besar
7. Digitalisasi dan modernisasi koperasi
8. Keberlanjutan / kontiunuitas produksi produk UMKM

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, sebagaimana penjelasan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

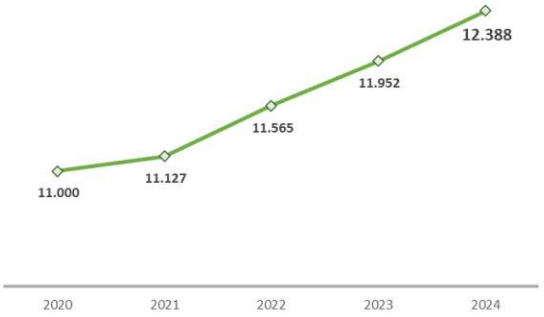
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,145,155	1,032,333	90.15%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Diukur oleh BPS	1,032,333	Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri No. 03/12/3506/Th.VI, 03 Desember 2024

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Kediri mencapai Rp 12,39 juta per tahun. Capaian ini meningkat 436 ribu rupiah (3,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 yang sebesar 2,81 persen per tahun.





Sumber: Berita Resmi Statistik Kabupaten Kediri 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,393,267	1,032,333	74.09%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	26,221,565,498.00	25,440,326,428.00	97.02%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran				

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan didapati data Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut; Untuk indeks pengeluaran Kabupaten Kediri lebih rendah di bandingkan dengan kota kediri dengan selisih sebesar -106.833 jika di bandingkan provinsi lebih rendah Kabupaten Kediri dengan selisih sebesar -38.667 dan jika di bandingkan nasional lebih tinggi Kabupaten kediri dengan selisih sebesar 3.916

Tabel Perbandingan Indeks Pengeluaran

Wilayah	Indeks Pengeluaran	Keterangan	Rujukan Data
Nasional	1,028,417.00	Kabupaten Kediri lebih baik	BPS diolah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Provinsi	1,071,000.00	Lebih baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Kediri	1,032,333.00	-	

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak – pihak yang terlibat antara lain instansi vertikal baik dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi serta dengan Kementrian Perdagangan, Kemenperin, instansi horizontal dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terkait serta dengan pihak eksternal antara lain perbankan untuk program e-retribusi

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	17.36%	13.37%	77%	Cukup Mendukung
program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	1.71%	1.15%	67%	Cukup Mendukung
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	0.20%	0.16%	80%	Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	33.67%	34.49%	102%	Sangat Mendukung
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	26.02%	24.41%	94%	Mendukung
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	9.87%	8.42%	85.31%	Mendukung
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	50%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	90%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	90%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.93%	1.93%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	15%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Pelaku Usaha (UMKM, Pedagang, Produsen): Mereka adalah ujung tombak perdagangan. Peningkatan kualitas produk, inovasi, dan strategi pemasaran yang efektif akan sangat mempengaruhi volume penjualan Dukungan masyarakat
2. Pemerintah Daerah: Memberikan dukungan melalui kebijakan yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan anggaran
3. Asosiasi dan Organisasi Perdagangan: Memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha, memberikan pelatihan, dan membantu dalam promosi produk
4. Pelaku IKM: Mereka adalah aktor utama dalam pertumbuhan IKM. Peningkatan kapasitas produksi, inovasi produk, dan manajemen usaha yang baik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan IKM
5. Pemerintah Daerah: Memberikan dukungan melalui kebijakan yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan anggaran Asosiasi dan Organisasi IKM: Memfasilitasi kerjasama antar pelaku IKM, memberikan pelatihan, dan membantu dalam promosi produk

Merujuk data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut;

Faktor Pendukung Internal:

1. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang mendukung perkembangan koperasi dan usaha mikro, seperti kemudahan perizinan berusaha serta fasilitasi perizinan berusaha ke desa/kecamatan untuk mempermudah akses usaha mikro terhadap layanan perizinan berusaha

2. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas usaha mikro dengan melaksanakan program kegiatan Pelatihan produksi dan restrukturisasi usaha bagi usaha mikro baik untuk peningkatan kualitas SDM usaha mikro atau pun produk usaha mikro serta pelatihan pembuatan produk untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru
3. Menyediakan atau memfasilitasi akses pembiayaan untuk koperasi dan usaha mikro, melalui Fasilitas Pembiayaan Mikro melalui kegiatan kemitraan usaha mikro dengan perbankan serta
4. pemberian bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan koperasi melalui mekanisme hibah
5. Sinkronisasi program kegiatan antar instansi dalam Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga program kegiatan dapat efektif.

Faktor Pendukung Eksternal:

1. Dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementrian Koperasi dan UKM RI) dan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan bantuan ingan dari pemerintah pusat berupa program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM, baik dalam bentuk pelatihan, bimtek, fasilitasi legalitas usaha
2. Kerja sama dengan dunia usaha atau sektor swasta seperti dengan bank jatim melalui CSR bantuan alat produksi bagi usaha mikro, dengan bank himbara melalui akses pembiayaan (kredit usaha) bagi usaha mikro dan koperasi serta bantuan bimtek/pelatihan dari pegadaian dan Bulog

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Tingkat ekspor yang bergantung terhadap pasar global, dimana sering terjadi fluktuasi kenaikan atau penurunan yang sangat signifikan. Sehingga nilai persentase ekspor tidak bisa diprediksi dengan baik dan selalu bergantung permintaan pasar global dalam suatu periode tertentu.
2. Pengusaha/perusahaan yang enggan melaporkan aktivitas ekspor impor mereka
3. Peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Kediri sering bergantung pada bahan baku produksi industri. Dimana keberlanjutan produksi produk daerah oleh IKM sering menjadi masalah, dan produksi terhenti karena kurangnya ketersediaan bahan baku.
4. Pelaku industri yang masih baru enggan mengurus ijin industri, meskipun saat ini sudah dipermudah dengan OSS

Merujuk data dari Dinas Kopusmik adalah sebagai berikut:

Faktor internal

1. Keterbatasan anggaran menjadikan program kegiatan pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro tidak dapat menyentuh seluruh koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Kediri
2. Kurangnya kapasitas pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terlatih dan berkompeten dalam menangani sektor koperasi dan usaha mikro mempengaruhi kualitas pelayanan kepada koperasi dan usaha mikro
3. Kurang optimalnya sinergi dari perangkat daerah pengampu sektor ekonomi jadi beberapa kegiatan masih ada yang tumpang tindih

Faktor eksternal

1. Adanya ketergantungan usaha mikro dan koperasi terhadap program dari Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga menghambat inovasi dan kemandirian usaha mikro dan koperasi
2. Keterbatasan dalam memahami teknologi baru dan menggunakan platform digital untuk pemasaran dan transaksi menjadi penghambat daya saing usaha mikro sehingga akses pasar usaha mikro terbatas

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Melakukan perhitungan potensi capaian ekspor berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya
2. Mengundang atau melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atau perusahaan agar bisa berpartisipasi dalam pelaporan aktivitas ekspor impornya
3. Melakukan pendampingan kepada IKM untuk menumbuhkan IK baru
4. Melakukan sosialisasi kepada IKM serta pendampingan ijin industri

Merujuk data dari Dinas Kopusmik adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, swasta dan perbankan untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro
2. Melakukan Analisa kebutuhan Pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk di usulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dengan OPD terkait sektor ekonomi
4. Meningkatkan motivasi kewirausahaan bagi usaha mikro serta memberikan fasilitasi pemasaran usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro dan anggota koperas
5. Memberikan pelatihan pemasaran digital kepada usaha mikro secara sederhana dan mudah sehingga Masyarakat dapat dengan mudah mengimplementasikannya.

Apresiasi Kinerja

Merujuk data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas Perdagangan disebutkan sebagai berikut;

1. Pasar Tertib Ukur Tahun 2024 dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
2. Juara 1 Stand Terbaik Pameran Kriya Indonesia di Yogyakarta oleh Dekranasda Provinsi Yogyakarta



Gambar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berkunjung ke Ladang Jagung siap panen (Sumber: Dinas Kominfo)

Tujuan 6

Meningkatnya Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah

Merujuk pada data Kementerian Pertanian Kemandirian pangan (bahasa Inggris: food resilience) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah "Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". Berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan, definisi kemandirian menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yaitu "Kemampuan untuk mencegah bencana dan krisis serta mengantisipasi, menyangga, menampung atau memulihkannya secara tepat waktu, efisien, dan berkelanjutan. Ini termasuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan sistem mata pencaharian dalam menghadapi ancaman yang berdampak pada pertanian, pemenuhan nutrisi, ketahanan pangan, dan keamanan pangan".

Kemandirian pangan berbeda dengan ketahanan pangan dalam hal sumber untuk mencukupi kebutuhan primer tersebut. Kemandirian pangan mensyaratkan kemampuan produksi dalam negeri, sedangkan ketahanan pangan tidak mempersoalkan sumber pasokan pangan; bisa berasal dari dalam negeri atau merupakan hasil impor. Berdasarkan definisi kemandirian pangan menurut UU Pangan, beberapa aspek yang terkait dengan usaha mencukupi kebutuhan pangan setiap warga negara secara bermartabat, yaitu kemampuan produksi pangan dalam negeri, keanekaragaman produk atau komoditas pangan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, termasuk kearifan lokal masyarakat.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3.03	-1.73	-57.10%	Kurang Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	-1.73	Berita Resmi Statistik

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.44	-1.73	-393.18%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Penjelasan Umum Kinerja

Perkembangan Pertanian di Kabupaten Kediri tidak dapat dilepaskan dari kondisi kewilayahan di Kabupaten Kediri yang mana disampaikan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Pada RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat 4 kawasan aglomerasi pertanian yakni:

1. Ngawasondat (Ngancar, Wates, Plosoklaten, dan Kandat) sebagai penghasil buah-buahan nanas;
2. Pakancupung (Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung) sebagai penghasil sayur-mayuran;
3. Palempari (Papar, Plemahan, Kayen Kidul, Pagu dan Purwoasri) sebagai penghasil padi dan jagung;
4. Segobatam (Semen, Grogol, Banyakan Tarokan) sebagai penghasil buah-buahan mangga podang.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian. Pada tahun 2022 realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian sebesar 0.02, pada tahun 2023 realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 3.03, dan pada tahun 2024 realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian sebesar -1.73. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri telah menyusutkan lahan pertanian terutama pada aglomerasi Segobatam. Pembangunan dengan harga USD 40.000 mengambil 457 hektar lahan, terutama lahan-lahan pertanian di kawasan aglomerasi Segobatam. Potensi panen mangga di kawasan pembangunan Bandara tersebut mengalami penurunan dan panen raya juga mengalami penurunan produksi.

Gambar Foto Pembangunan Bandara dan Masterplan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri





Namun demikian, didapati perkembangan data PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2020-2024 dari Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2024 sebesar pada 2024 adalah 6.208,51, pada 2023 adalah 6.317,80, pada 2022 adalah 6.131,98. Secara kuantitatif, ketercapaian target dalam RPJMD dapat diukur sebagai berikut;

Gambar Data PDRB Pertanian Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kediri



Tabel 12.2 **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020-2024**
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices of Kediri Regenc by Industry (billion rupiahs), 2020-2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	6.079,42	6.130,62	6.131,98	6.317,80	6.208,51

Tabel 12.4 **Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024**
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices of Kediri Regency by Industry (percent), 2020-2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	0,42	0,84	0,02	3,03	-1,73

Dari dua hal diatas, dapat dipetakan peta perencanaan dengan dua hal yakni melakukan pengukuran target pertumbuhan yang dihitungkan sekalian dengan target PDRB dengan data dasar PDRB Tahun 2021. Hal yang kedua adalah membandingkan perhitungan target PDRB dengan data dasar 2021 tersebut dengan realisasi PDRB Sektor Pertanian tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Metode 1 atas Perkembangan data PDRB Sektor Pertanian

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Target Pertumbuhan	0.42	0.43%	0.43%	0.43%	0.44%	0.44%
Target PDRB	6079.42	6105.56	6131.82	6158.18	6185.28	6212.49
Realisasi Pertumbuhan	0.42	0.84	0.02	3.03	-1.73	
Realisasi PDRB	6079.42	6160.62	6131.98	6317.8	6208.51	
Capaian Perbandingan atas PDRB	100.00%	100.90%	100.00%	102.59%	100.38%	

Sumber: Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 dimodifikasi

Melihat dari metode diatas, dapat diasumsikan bahwa pencapaian target PDRB Sektor pertanian tersebut masih berada diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian 100.38%. Dengan demikian secara PDRB Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian sudah tercapai, namun secara pertumbuhan yang diperbandingkan tahun sebelumnya, kinerja tidak dapat tercapai karena adanya penurunan Produktivitas Sektor Pertanian hingga tumbuh pada posisi minus.



Sasaran 11

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat

Pada Tahun 2024 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kediri yakni 144.61 meningkat dari 128.08 pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun, maka ketersediaan pangan masih surplus sebesar 74,20 kg/kapita/tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercapainya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Ketahanan Pangan terbangun melalui 3 (tiga) pilar, yaitu ketersediaan pangan (food availability), keterjangkauan pangan (food accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan (food utilization). Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan. Pilar akses atau keterjangkauan pangan pada tingkat rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah dan sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses atas pangan menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan apabila rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan akses fisik, ekonomi atau sosial. Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk mengkonsumsi pangan dan tubuh dapat menyerap dan metabolisme zat gizi dengan baik. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan,

pengolahan, penyiapan dan pemenuhan persyaratan keamanan makanan dan minuman. Pemanfaatan pangan juga berkaitan dengan kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan status gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kualitas pemanfaatan pangan rumah tangga.

Ketersediaan pangan utama menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat pengembangan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat harus dilaksanakan lebih massif, terutama yang berdampak langsung kepada tersedianya dan kemudahan akses pangan masyarakat.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Kediri.
2. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
3. Pola konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Masih ditemukan pangan segar tidak aman yang yang beredar di Masyarakat.

Perencanaan

Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebesar 146,10 kg/kapita/tahun. Sedangkan target akhir periode RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 149,04 kg/kapita/tahun.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penggalian potensi di wilayah rentan rawan pangan untuk dapat dikembangkan sehingga pencegahan kerawanan pangan lebih efektif, terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
2. Penguatan stabilitas harga dan peningkatan akses pangan masyarakat melalui pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/penggilingan dan konsumen, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, koordinasi lintas sektor, pengembangan kelembagaan cadangan pangan (lumbung pangan masyarakat), pengembangan dan peningkatan kapasitas pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) melalui Pasar Mitra Tani (PMT).
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan melalui program IBU ASUH STUNTING yakni kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan disertai monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya pendukung pencegahan stunting serta solusi pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga yang beraneka ragam serta bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan di tingkat rumah tangga.

4. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat dalam konsumsi pangan berbahan baku lokal non beras serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk memproduksi pangan olahan non beras.
5. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan dan pangan segar di kalangan petani dan pelaku usaha pangan serta peningkatan jaminan mutu dan daya saing produk melalui fasilitasi sertifikasi Prima untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta rekomendasi ijin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

Hasil Kinerja

Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebanyak 146,10 kg/kapita/tahun. Pada akhir tahun 2024 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 146,44 kg/kapita/tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 100,24% (kategori Sangat Baik).

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	146.1	146.44	100.23%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) / Jumlah penduduk	246.679,39 kg / 1.684.454 jiwa	146,44 kg/kapita/tahun	Data Ketersediaan Pangan Beras Tahun 2024

Tabel Pengukuran Hasil Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024

DATA KETERSEDIAAN PANGAN BERAS TAHUN 2024

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Produksi Gabah	299.617,17	Ton
2	Produksi Beras (1*0,65)	194.751,16	Ton
3	Jumlah Penduduk 2024	1.684.454	jiwa
4	Perkiraan Beras keluar	29.212,67	Ton
5	Perkiraan Beras Masuk	21.422,63	Ton
6	Beras Bantuan Pangan Bapanas 2024 9 kali 130.092 KPM @10 kg	11.708,28	Ton
8	Stok Beras Penggilingan	34.010,00	Ton
9	Stok Bulog	14.000,00	Ton
10	Tingkat konsumsi / kapita	72,24	kg/kap/th
11	Ketersediaan Beras Produksi Sendiri	115,62	kg/kap/th
12	Jumlah ketersediaan beras total (2+5+6+8+9-4)	246.679,39	Ton
	Ketersediaan Pangan Utama Beras (12*1000/3)	**146,44**	**kg/kap/tahun**

Sumber: Data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	149.04	146.44	98.26%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	4,090,217,400.00	4,071,769,350.00	99.55%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	100.23%	99.55%	0.68%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
144.58	117.48	128.08	146.44

Dari data diatas didapati adanya penurunan signifikan tahun 2022 dan terjadinya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Perkembangan data yang diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

Kabupaten Kediri	Daerah Lain	Provinsi Jawa Timur	Nasional
146.44 kg/kapita/tahun	No Data	126.99 kg/kapita/tahun	No Data

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih di atas proyeksi capaian Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 126,99 kg/kapita/tahun. Adapun dibandingkan dengan capaian nasional, saat laporan ini disusun belum diperoleh angka data ketersediaan pangan nasional sehingga tidak dapat disandingkan dengan capaian ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri.

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut;

Pihak Instansi Vertikal

1. Kementerian Pertanian, menunjang pencapaian kinerja dengan memberikan dana DAK Fisik untuk infrastruktur pertanian (RJIT,JUT dan ITD) serta DAN Non Fisik untuk operasional BPP dan peningkatan SDM petani dan petugas.
2. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas,

Stakeholder, Pihak Swasta dan Masyarakat

1. Perusahaan Pupuk Indonesia, menunjang pencapaian kinerja dalam menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani untuk budidaya tanaman, baik pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Distributor pupuk dan kios, menunjang pencapaian kinerja dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani
3. Kelompok tani, menunjang pencapaian kinerja dalam melaksanakan program – program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	100.00%	Sangat Mendukung
	Skor Pola Pangan Harapan	95	91.2	96.00%	Mendukung
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan desa rentan pangan	1 Peta	1 Peta	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	79%	100%	126.58%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut;

1. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar).
2. Adanya kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog bagi penduduk Kabupaten Kediri juga mempengaruhi meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri.
3. Berkembangnya usaha penggilingan di Kabupaten Kediri dapat mengungkit jumlah ketersediaan pangan.
4. Mitigasi daerah rentan pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

5. Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan kualitas sumberdaya lahan dan air yang masih dapat dikembangkan.
6. Adanya potensi bahan pangan lokal yang beraneka ragam.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut:

1. Ancaman krisis pangan global/ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti: alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan utama.
2. Ketersediaan pangan utama sangat bergantung pada angka produksi. Sedangkan produksi gabah masih sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas yang memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga berpotensi menyebabkan produksi gabah berkurang.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut:

1. Memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar).
2. Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan instansi terkait baik Badan Pangan Nasional maupun Bulog terkait stok serta perumusan kebijakan terkait stok pangan.
3. Dari sisi konsumsi pangan, konsumsi akan beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayayakan di pekarangan. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani sehingga diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya protein hewani dalam pemenuhan gizi. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

Ketersediaan pangan utama tahun 2024 berhasil mencapai target dan meningkat dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/tahun, maka ketersediaan pangan masih surplus sebesar 74,20 kg/kapita/tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri.



Sasaran 12

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Tukar Petani yang merujuk dari Laporan Penyusunan Nilai Tukar Petani Tahun 2024 yakni 104.69 mengalami peningkatan dari 104.44 pada tahun 2023. Nilai Tukar Petani tertinggi terdapat di Kecamatan Mojo dengan Nilai Tukar Petani sebesar 107.78 dan Nilai Tukar Petani terendah berada di Kecamatan Tarokan dengan Nilai Tukar Petani sebesar 102.89.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat.

Sebagai penyedia pangan serta lapangan pekerjaan, pertanian yang merupakan salah satu sektor vital dalam menghadapi perkembangan bertambahnya populasi manusia, terutama dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi pertanian di Indonesia memiliki permasalahan serius antara lain terkait lahan, irigasi, benih, pupuk, alat mesin pertanian, penyuluh lapangan (sumber daya petani), tenaga kerja, hingga permasalahan tata niaga pertanian.

Menurut Kementerian Pertanian, petani adalah pelaku utama pembangunan. Dalam hal ini, petani memiliki peran yang besar terhadap penyediaan pangan yang berperan penting sebagai kebutuhan primer. Kementerian Pertanian sendiri juga mencanangkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Merujuk kajian dari Kementerian Pertanian terdapat beberapa hal yang menjadi kunci dalam menningkatkan kesejahteraan petani dengan pendekatan kesisteman (systemic approach) dengan parameter sebagai berikut;

1. Merevisi regulasi yang menghambat
2. Membangun infrastruktur
3. Mekanisasi pertanian
4. Perbaikan teknis produksi Pendampingan dan penguatan SDM
5. Penanganan pasca panen
6. Serta pengendalian harga

Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan petani melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui penetapan pengaturan tata ruang, terutama pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, penyediaan benih unggul yang berkualitas, penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan, meminimalkan impor hasil pertanian, dan harga hasil pertanian lebih ditingkatkan.

Masyarakat Kabupaten Kediri mayoritas masih bekerja di sektor agrikultur. Sekitar 17% masyarakat Kabupaten Kediri bekerja dengan waktu penuh di sektor tersebut, ditambah dengan masyarakat lain yang bekerja paruh waktu.. Migrasi profesi dari sektor pertanian akhir-akhir ini meningkat. Selain itu, tidak banyak anak muda di usia produktif yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah inovasi teknologi di bidang pertanian. Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan alat mesin pertanian, dan pemupukan. Bibit unggul merupakan bibit yang memiliki mutu terjamin sehingga dapat menjamin keberhasilan usaha tani. Alat dan mesin pertanian dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mengolah lahan pertanian. Pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada tanaman guna meningkatkan produksi.

Melihat hal diatas serta menurunnya tren dalam pembangunan sektor pertanian secara langsung disebabkan oleh banyak hal. Terutama hal-hal yang menyangkut kebutuhan petani secara umum. Tingkat perekonomian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kediri menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Inovasi di bidang pertanian yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah DITO (Desa Inovasi Tani Organik). Bupati Kediri, Mas Dhito menyampaikan, pertanian organik memiliki nilai ekonomi jauh menguntungkan dibandingkan pertanian konvensional. Sebab, dengan tani organik biaya produksi dapat ditekan karena petani tidak lagi bergantung dengan pupuk kimia. Selain itu pula harga jual produksi tani organik lebih tinggi daripada harga jual produksi tani konvensional.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melihat kesejahteraan petani adalah hal yang wajib untuk diperhatikan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan sebagai indikator kesejahteraan, dimana perhitungan NTP dihitung dengan indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dikeluarkan oleh petani.

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian dalam arti luas tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti padi dan jagung, tetapi juga mencakup hortikultura dan perkebunan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator kontribusi sub sektor pertanian, hortikultura dan Perkebunan terhadap PDRB serta tingkat pembangunan kawasan pertanian, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Kediri. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu ukuran kesejahteraan petani.

Permasalahan

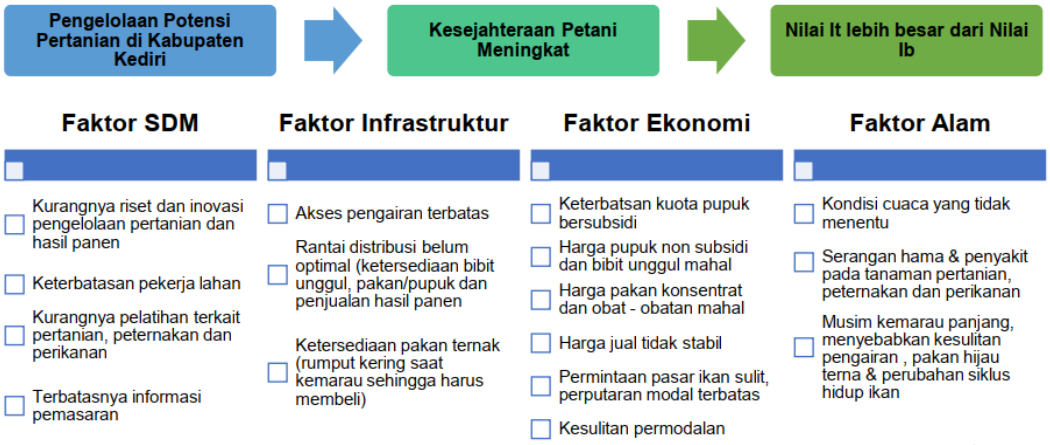
Merujuk data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Terjadinya anomali iklim, memberi pengaruh negatif yaitu tidak adanya kepastian ketersediaan air dan munculnya berbagai macam OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan positif bagi tanaman yaitu musim kering yang cukup panjang membuat rasio bunga menjadi buah lebih tinggi untuk beberapa tanaman buah – buahan.
2. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

3. Perubahan pemanfaatan lahan ke sub sektor lainnya (pemukiman dan lain – lain)
4. Tingkat Kesuburan Lahan yang menurun akibat pemakaian pupuk kimia yang terus menerus dan berlebihan.
5. Pengaruh harga komoditas di pasaran
6. Terjadinya bencana alam (Kekeringan / Banjir)
7. Kurang tersedianya Sarana Dan Prasarana Pertanian
8. Semakin terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi pupuk. (diisi permasalahan sasaran yang diampu) (dapat mengacu pada Renstra/RPJMD anda)

Sedang merujuk pada Laporan Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) disebutkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Peraga Penjelasan Permasalahan hasil Analisa dari Tim Penyusun NTP Kabupaten Kediri



Sumber: Laporan Akhir Penilaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri 2024 (Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya)

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJMD adalah 104. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perikanan bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan SDM petugas dengan pengiriman pelatihan ke Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dan bekerjasama dengan Perhiptani;
2. Pemberian bantuan pestisida kepada kelompok tani melalui petugas Dipertabun dan pelaksanaan Gerdal OPT tanaman secara terpadu dan serempak
3. Membangun/ merehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), Irigasi Air Tanah Dangkal (ITD) dengan sumur submersible untuk mencukupi kebutuhan air disaat musim kemarau.
4. Kegiatan memanfaatkan pekarangan (P2L/ Pertanian Pangan Lestari) dan Gemar Tabur (Gerakan Menanam Tanaman sayur dan Buah di Pekarangan)
5. Pelatihan, pendampingan dan sosialisasi pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik
6. Fasilitasi pemasaran, pelatihan GHP dan antisipasi dampak perubahan iklim
7. Pemberian bantuan pompa air dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan membangun ITD di beberapa titik lokasi
8. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani/ JUT)

9. Pelatihan, pendampingan dan sosialisasi pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB.
2. Adanya kegiatan pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan)
3. Adanya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar)
4. Adanya penguatan kelembagaan melalui kegiatan workshop kelembagaan perikanan
5. Adanya kegiatan bimbingan teknis tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Tukar Petani yang merujuk dari Laporan Penyusunan Nilai Tukar Petani Tahun 2024, dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.44	104.69	100.24%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

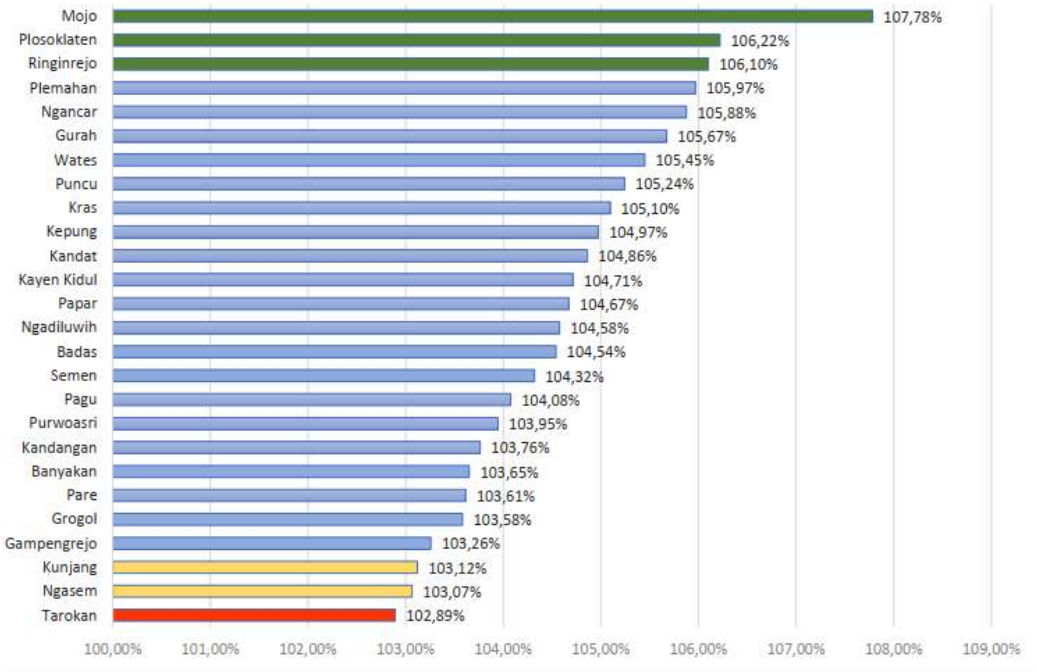
Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
	Metodologi Pengukuran dilaksanakan dengan metode survei *purposive sampling* terhadap 852 Petani dan Pedagang /Penyedia Jasa di beberapa sampel pasar di Kabupaten Kediri;	104.69	Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024 - Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya

Tabel Pengukuran Hasil Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri Tahun 2024

No	Subsektor	Nilai Tukar Petani
	Semua Subsektor Kab. Kediri	
1	**Nilai Tukar Petani**	**104,69**
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	123,23
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	117,70
	Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,89
	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	114,66

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri 2024 (Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya)

Peraga Grafik Pesebaran Nilai Tukar Petani per-Kecamatan di Kabupaten Kediri



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri 2024 (Bappeda Kabupaten Kediri dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya)

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	104.69	99.70%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	66,375,730,892.00	64,616,329,418.00	97.35%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100.62%	97.35%	3.27%	Efisien

Benchmarking

Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
104.65	111.96	116.79

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk pada data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut;
Pihak Instansi Vertikal

1. Kementerian Pertanian, menunjang pencapaian kinerja dengan memberikan dana DAK Fisik untuk infrastruktur pertanian (RJIT,JUT dan ITD) serta DAN Non Fisik untuk operasional BPP dan peningkatan SDM petani dan petugas.
2. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, menunjang pencapaian kinerja dalam meningkatkan SDM petani dan petugas,

Stakeholder, Pihak Swasta dan Masyarakat

1. Perusahaan Pupuk Indonesia, menunjang pencapaian kinerja dalam menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani untuk budidaya tanaman, baik pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Distributor pupuk dan kios, menunjang pencapaian kinerja dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani
3. Kelompok tani, menunjang pencapaian kinerja dalam melaksanakan program – program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Merujuk penjelasan dari Dinas Perikanan, pihak yang terlibat adalah Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, BPS, APCK, KKC, KBC, Pokdakan, dan masyarakat pembudidaya ikan secara umum

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok tani yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
	Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	82.21%	82.21%	100%	Sangat Mendukung
	Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	60	60	100.00%	Sangat Mendukung
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jaringan Irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik	74%	74%	100%	Sangat Mendukung
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulagngan bencana pertanian (Serangan OPT)	100%	98%	98%	Sangat Mendukung
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembesaran (ton)	24565	24687	100.50%	Sangat Mendukung
	Ikan Hias (ribu ekor)	387636	388412	100.20%	Sangat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
					Mendukung
	Benih (juta ekor)	21437	21544	100.50%	Sangat Mendukung
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	47	47	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi dari pimpinan yang berjalan dengan baik;
2. Didukung oleh 197 ASN (PNS dan PPPK);
3. Adanya kebijakan dari Bupati menambah tunjangan TPP bagi ASN sehingga ASN lebih bersemangat dalam bekerja;
4. Mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Perikanan adalah Kualitas Sumberdaya air yang memang cocok untuk usaha perikanan utamanya pembenihan di wilayah kecamatan Pare dan sekitarnya.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. Fasilitas penunjang pekerjaan kantor maupun dilapangan yang terbatas;
2. Masih ada pegawai yang kurang memahami tugas dan prosedur kerja;
3. Adanya kebijakan dari Bupati menambah tunjangan TPP bagi ASN sehingga ASN lebih bersemangat dalam bekerja;
4. Mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin, dan ikan hias)
2. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan
3. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
4. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal
5. Belum optimalnya promosi produk perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal
6. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
7. Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan
8. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait packaging yang benar dan menarik
9. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan
10. Rendahnya tingkat konsumsi ikan
11. Terbatasnya diversifikasi olahan perikanan

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai berikut:

1. memfasilitasi kebutuhan penunjang pekerjaan kantor maupun di lapangan secara bertahap;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pegawai secara periodik agar kinerja lebih optimal dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) untuk meningkatkan SDM pertanian;
3. Mengusulkan kepada pemerintah Kab. Kediri agar kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan bidang pertanian lebih diprioritaskan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dipertabun yang telah dilaksanakan di masyarakat secara periodik;

Merujuk penyampaian Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya perbanyakan induk ikan yang berkualitas (lele sangkuriang dan nila sultana)
2. Meningkatkan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan dan bimbingan teknis
3. Terus menggalakkan upaya promosi produk perikanan baik offline maupun online
4. Membentuk asosiasi untuk mempermudah kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
5. Melaksanakan bimtek mutu dan keamanan pangan bagi kelompok pengolah dan pemasar perikanan (poklahsar)
6. Mengusulkan kepada DKP Jawa Timur agar mendapat fasilitasi sertifikasi keamanan pangan
7. Menggalakkan Makin Kece Sekali (Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi)
8. Melaksanakan kegiatan Cooking Class olahan perikanan
9. Lebih menggalakkan kegiatan yang berwawasan agribisnis dengan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan sekaligus juga dapat meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan
10. Memfasilitasi kelompok dengan Perbankan (BPD, BRI, Bank Daerah) untuk memperoleh modal dan penguatan modal kelompok
11. Kegiatan yang dilakukan tidak berhenti dalam satu tahun namun berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.



Gambar Jembatan Jong Biru yang telah diselesaikan pada tahun 2024 menghubungkan kawasan timur dan barat Sungai Brantas di Desa Jong Biru, Kecamatan Gampengrejo (Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kediri via Wikipedia)

Tujuan 7

Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Pada Tahun 2024, Merujuk Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastrutkur, Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri yakni 69.84 meningkat dari 66.82 pada tahun 2023. Kontribusi nilai terbesar ada pada sektor Air Bersih dengan Nilai sebesar 92.17 dan kontribusi nilai terendah ada pada sektor Persampahan dengan Nilai 41.91.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui Wikipedia Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Merujuk Kementerian Keuangan, Pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Bagi Indonesia, infrastruktur bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Banyak studi dan diskusi yang menyimpulkan demikian. Mantan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan, infrastruktur yang minim merupakan salah satu dari tiga penyebab mengapa Negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi negara maju. Oleh karena itu, merupakan satu keharusan bagi pemerintah di Negara berkembang untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun

infrastruktur. Tanpa komitmen yang kuat, Negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan.

Perkembangan pembangunan yang pesat menjadikan tingginya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab pada peningkatan kualitas hidup masyarakat terkait pada aksesibilitas layanan infrastruktur daerah. Dalam hal ini diperlukan kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri untuk mengevaluasi target dan capaian pelayanan infastruktur di daerah.

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. IKLI menjadi alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni: ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility) dan penyerapan tenaga kerja (job creation), dan kontribusi terhadap perekonomian.

Permasalahan

Merujuk penjelasan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), disebutkan beberapa permasalahan dalam pembangunan guna menurunnya kesenjangan antar wilayah sebagai berikut;

1. Permasalahan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan
    a. Belum terpenuhinya infrastruktur jalan yang dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki.
    b. Belum adanya ketaatan pengguna jalan dengan mentaati batas tonase jalan
2. Permasalahan Infrastruktur Bidang Air Bersih
    a. Akses Air Bersih yang Belum Merata
    b. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi
    c. Kualitas Air yang Tidak Konsisten
3. Permasalahan Infrastruktur Bidang Irigasi
    a. Kondisi Jaringan Irigasi yang Kurang Optimal: Sebagian jaringan irigasi mengalami kerusakan atau sedimentasi, mengakibatkan distribusi air ke lahan pertanian tidak merata dan efisien.
    b. Kurangnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi: Minimnya upaya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jaringan irigasi menyebabkan penurunan fungsi dan efisiensi sistem irigasi.
    c. Keterbatasan Sumber Daya Air: Pada musim kemarau, ketersediaan air untuk irigasi menurun drastis, mempengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
4. Permasalahan Infrastruktur Bidang Kawasan perumahan dan kawasan permukiman
    a. Keterbatasan Penyediaan Rumah Layak Huni: Masih terdapat masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak, baik dari segi konstruksi maupun fasilitas dasar.
    b. Permukiman Kumuh: Beberapa area permukiman berkembang menjadi kawasan kumuh akibat kepadatan penduduk, kurangnya sanitasi, dan minimnya fasilitas umum.
    c. Pengelolaan Tata Ruang yang Kurang Optimal: Perencanaan dan pengelolaan tata ruang permukiman belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan mitigasi bencana.
5. Permasalahan Infrastruktur Bidang Ruang Terbuka Hijau
    a. Terjadi konversi besar-besaran RTH ke fungsi lain dalam 5 tahun terakhir.
    b. Berkurangnya luas RTH mengancam keseimbangan ekologis dan keanekaragaman hayati.
    c. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam menjaga fungsi RTH.
    d. Tekanan pembangunan dan kebutuhan lahan permukiman mempercepat alih fungsi.
6. Permasalahan Infrastruktur Bidang Persampahan
    a. Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Terintegrasi: Pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien.
    b. Keterbatasan Fasilitas Pengolahan Sampah: Jumlah dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta fasilitas daur ulang masih belum mencukupi kebutuhan.

c. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan dan pengurangan sampah, masih perlu ditingkatkan.

7. Permasalahan Infrastruktur Bidang Perhubungan
   a. Transportasi Umum yang Terbatas: Layanan transportasi umum belum menjangkau seluruh wilayah dan frekuensinya masih rendah, menyulitkan mobilitas masyarakat.
   b. Kemacetan Lalu Lintas: Pada titik-titik tertentu, terutama di area perkotaan, terjadi kemacetan akibat volume kendaraan yang tinggi dan manajemen lalu lintas yang kurang optimal.

Perencanaan

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dapat digunakan sebagai evaluasi dari kinerja unit layanan infrastruktur. Target dan capaian kinerja termuat di dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

No	Tahun	Target (%)	Capaian (%)
1	2021	66.45	66.65
2	2022	66.90	66.82
3	2023	67.50	66.82
4	2024	68.10	69,84
5	2025	68.70	
6	2026	69.30	

Uraian di atas menjadi landasan kuat pentingnya upaya untuk mengukur kepuasan layanan infrastruktur agar mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan mengetahui umpan balik dari masyarakat dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan layanan infrastruktur ke depan yang lebih berkualitas dan merata. Target utamanya adalah menyusun evaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Atas dasar itulah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja penyediaan layanan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung dirasakan oleh masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan atas penyediaan layanan infrastruktur di Kabupaten Kediri.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

1. Mengidentfikasi dan menggambarkan kondisi riil terkait layanan infrastruktur di Kabupaten Kediri meliputi jalan dan jembatan, transportasi, infrastruktur air bersih dan irigasi, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur ruang public (RTH) , infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur sanitasi dan persampahan;
2. Mengukur angka/capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2025;
3. Menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2024 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan di dokumen perubahan RPMJD Kabupaten Kediri 2021-2026;
4. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan infrastruktur Kabupaten Kediri menurut indikator ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility). penyerapan tenaga kerja (job creation), dan kontribusi terhadap perekonomian yang terjadi pada pengukuran capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri;
5. Mengidentifikasi dan menganalisis prioritas atribut-atribut pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri;
6. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan hasil penelitian.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68.1	69.84	102.56%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Metode Survei dengan Skala Likert dengan menghitung Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) ***Bobot nilai rata − rata tertimbang*** *= jumlah bobot* = 1 = *N* *jumlah unsur X* Keterangan: N= bobot nilai per unsur Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut. ***IKP*** *= total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang* *total unsur yang terisi*	Sebagaimana terlampir dibawah	69.84	Laporan Akhir Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Tabel Pengukuran Hasil

Jalan dan Jembatan	88,08
Air Bersih	92,17
Irigasi	59,51
Perumahan dan Permukiman	82,5
RTH	44,36
Persampahan	41,91
Perhubungan	80,31
Rata-rata	**69,84**

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan IKLI Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	69.3	69.84	100.78%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Analisa Keterlibatan Pihak Lain

Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November Kampus Sukolilo Surabaya selaku Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri, perangkat daerah terkait yang diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Kediri sebagai responden.

Faktor-faktor Penunjang

Merujuk data dari Bappeda disebutkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a. Kompetensi dan Profesionalisme SDM
        i. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi infrastruktur.
        ii. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan efektivitas layanan.
    b. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas
        i. Adanya regulasi yang mendukung penyelenggaraan layanan infrastruktur secara transparan dan berkelanjutan.
        ii. Prosedur kerja yang jelas dan efisien dalam pengelolaan layanan publik.
    c. Dukungan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Efektif
        i. Pengalokasian anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur.
        ii. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap program pembangunan.
    d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi
        i. Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan infrastruktur seperti e-KIR, monitoring kondisi jalan, dan pemetaan kebutuhan infrastruktur.
        ii. Inovasi dalam metode pembangunan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
2. Faktor Eksternal
    a. Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder
        i. Sinergitas dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur.
        ii. Kemitraan dengan investor dalam penyediaan infrastruktur strategis melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
    b. Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat
        i. Adanya mekanisme umpan balik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan infrastruktur.
        ii. Kepuasan masyarakat yang meningkat seiring dengan pelayanan infrastruktur yang lebih baik.
    c. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat
        i. Kebijakan nasional yang sejalan dengan pembangunan daerah, seperti program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur.
        ii. Peraturan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk infrastruktur.
    d. Kondisi Geografis dan Ketersediaan Sumber Daya Alam
        i. Wilayah yang mendukung pengembangan infrastruktur dengan ketersediaan bahan baku dan akses yang memadai.
        ii. Pemanfaatan potensi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Bappeda disebutkan sebagai berikut:

1. Bidang Irigasi
    1. Kurang meratanya penyediaan irigasi di kawasan Timur Sungai Brantas, seperti Kecamatan Papar, Gurah, dan Ngadiluwih.
    2. Penyediaan diesel diperlukan pada saat musim kemarau di Kecamatan Kecamatan Papar, Ngadiluwih, Grogol, Mojo, dan Gurah
    3. Mayoritas penyediaan diesel irigasi disewakan sebesar Rp. 20.000 per jam
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    1. Saat ini sudah terdapat setara 2.484 Ha RTH (dengan menggunakan perhitungan IHBI) di Kabupaten Kediri dari total 5.537,80 Ha yang seharusnya tersedia (ketercapaian 44,87%).
    2. Nilai kepuasan RTH adalah 3,94 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 4,57.
    3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut pengguna RTH adalah penerangan (lampu taman), pengelolaan parkir (parkir masih terbatas), pengelolaan sampah (pemisahan sampah organik dan anorganik), dan penataan RTH yang memungkinkan area RTH menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat sekitar (contohnya ada area untuk berjualan)
3. Persampahan
    1. Tidak ada proses pemilahan di rumah tangga, sampah dipilah di TPS3R
    2. Sebagian masyarakat tidak menyalurkan sampah ke TPS, melainkan melakukan pembakaran atau menyetor sampah ke bank sampah atau menjual sampah jenis dus ke pengepulan
    3. Sampah rumah tangga di Kecamatan Grogol, Gurah, dan Wates tidak diangkut setiap hari, melainkan diangkut 2-3 kali seminggu, sehingga sebagian rumah tangga menyalurkan sampahnya langsung ke TPS/ TPS3R
4. Perumahan dan Permukiman
    1. Nilai kinerja bidang perumahan dan permukiman memiliki kategori baik sekali yakni mencapai 82,50. Sudah dilakukan penanganan luasan permukiman kumuh seluas 85,75 Ha dari total luasan kumuh 132,99 Ha, sehingga capaian luasan permukiman yang tertangani yakni mencapai 64,48%. Masih terdapat 35,52% luasan permukiman kumuh yang perlu ditangani di Kabupaten Kediri
    2. Nilai kepuasan bidang perhubungan adalah 3,96 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 4,84.
    3. Hal yang perlu ditingkatkan menurut warga adalah distribusi bantuan RTLH seharusnya lebih merata dan tepat sasaran, sebab masih terdapat beberapa rumah tidak layak yang memerlukan bantuan RTLH namun belum mendapatkannya
5. Jalan dan Jembatan
    1. 88,09% panjang jalan Kabupaten Kediri sudah dalam kondisi baik atau mantap
    2. Nilai kepuasan bidang jalan dan jembatan adalah 4,12 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 4,66.
    3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) perlu adanya perbaikan permukaan jalan yang rusak dan berlubang karena dilalui kendaraan berat; dan beberapa ruas jalan dirasa masih memiliki lebar yang kurang terutama jika dilalui oleh dua arah kendaraan secara bersamaan.
6. Perhubungan
    1. Nilai kinerja bidang perhubungan memiliki kategori baik sekali yakni mencapai 80,31. Berikut indikator yang menyumbang ketercapaian kinerja bidang perhubungan: (a) Ketercapaian angkutan yang memenuhi standar keselamatan (Uji Kir) sudah mencapai 95,50%; (b) Ketersediaan rambu dan fasilitas pelengkap jalan baru mencapai 65,12%
    2. Nilai kepuasan bidang perhubungan adalah 4,79 dari nilai maksimal 5 dan nilai harapan adalah 5,00.

3. Hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) Perlu dilakukan penambahan rambu jalan, penertiban marka jalan dan perbaikan lampu lalu lintas yang rusak; (b) Perlu adanya penambahan lampu lalu lintas di jalur cepat; (c) Server uji kendaraan sering mengalami masalah dan hambatan

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari Bappeda disebutkan sebagai berikut:

1. Bidang Irigasi
    a. Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah:
    b. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di wilayah-wilayah sentra produksi pertanian
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    a. Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat
3. Persampahan
    a. Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah;
    b. Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri;
    c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
4. Perumahan dan Permukiman
    a. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan:
    b. Pembangunan rumah layak huni
5. Jalan dan Jembatan
    a. Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah:
    b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran
6. Perhubungan
    a. Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah:
    b. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
    c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
    d. Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor



Gambar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berdiskusi dengan kontraktor tentang pembangunan Stadion Gelora Dhaha Jayati di Kecamatan Tarokan (Sumber: Dinas Kominfo)

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah

Pada Tahun 2024, Realisasi Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik sebesar 87.00%, Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 80.79%, Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata ruang 100.00%, Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum 86.06%, dan Persentase Rumah Layak Huni 53,55%.

Ekspektasi masyarakat akan infrastruktur yang berkualitas kini menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kediri. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur yang dapat diandalkan kini menjadi dambaan bagi masyarakat. Karena dalam proses perekonomian pula, infrastruktur menjadi hal dasar yang harus dipenuhi sebelum berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.

Upaya menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan pemerataan di masing-masing kecamatan dengan proporsi yang telah diperhitungkan. Seperti kawasan-kawasan jalan dengan jeglongan sewu (ribuan lubang jalan) secara langsung berusaha diperbaiki. Selama ini, banyak jalanan di Kabupaten Kediri dalam kondisi buruk dikarenakan masih tingginya kesenjangan pembangunan. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan optimal.

Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lain yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan Infrastruktur ini juga mempengaruhi produksi, inflasi, dan investasi. Menurut Kementerian PUPR infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena demikian pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Sebagaimana dalam beberapa dekade terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas PUPR disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa kegiatan penanangan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan Kabupaten;
2. Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/talud yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak optimal
3. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan.

Merujuk data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman disebutkan sebagai berikut;

1. Updating data air minum yang belum optimal
2. Akses sumber air minum dengan pemukiman masyarakat yang jauh
3. Kualitas Air Minum yang belum seluruhnya baik
4. Digitalisasi data rumah yang belum optimal
5. Masih keluarga yang tidak mampu membangun rumah layak huni karena penghasilan rendah

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target dibagi atas beberapa hal sebagai berikut;

1. Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik
2. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
3. Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang
4. Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum
5. Persentase Rumah Layak Huni

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

Merujuk data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kolaborasi penanganan pemasalahan air minum dengan pemerintah desa maupun PDAM
2. Memanfaatkan sumber pendanaan lain selain APBD seperti DAK Air Minum dan Dana Insentif Fiskal
3. Memanfaatkan program BSPS dari pemerintah pusat
4. Peningkatan program pembangunan RTLH

Hasil Kinerja

Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80.50%	87.00%	108.07%	Sangat Baik
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	70.50%	80.79%	114.60%	Sangat Baik
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75%	100.00%	133.33%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)
	Cakupan Desa atau	86%	86.08%	100.09%	Sangat Baik

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum				
	Persentase Rumah Layak Huni	49.67%	53.55%	107.81%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik/Total Panjang Jalan Kabupatenx100%	1065.01 : 1224.2 x 100%	87,00	Data Survei Kondisi Jalan bidang PT
Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik /Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten x 100%	141.246,12 / 174.829 x 100%	80.79	Data dari Bidang OP
Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diterbitkan / Jumlah Peraturan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan	3/3 x 100%	100%	Data dari Bidang Penataan Ruang
Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM kabupaten dibagi jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten dikali 100%	481314/559128 x 100%	86.06%	Hasil Data diolah Dinas Perkim
Jumlah kumulatif unit rumah yang ditangani dibagi jumlah total rencana unit rumah yang akan ditangani dikali 100%	8985/16779 x 100%	53.55%	Hasil Data diolah Dinas Perkim

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	89.69%	87.00%	97.00%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Persentase Panjang	100.00%	80.79%	80.79%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik				
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	71.42%	100.00%	140.02%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	93.15%	86.08%	92.41%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Persentase Rumah Layak Huni	82.51%	53.55%	64.90%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	97,901,983,165.00	94,277,649,241.00	96.30%	Zona Hijau
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik				
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang				
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum				
	Persentase Rumah Layak Huni				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	97.58%	96.30%	4.90%	Efisien
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	93.93%			
	Cakupan Penyelesaian	100.00%			

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
	Peraturan Tata Ruang				
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	100.10%			
	Persentase Rumah Layak Huni	114.74%			

Pembandingan/Benchmarking

Indikator	2022	2023	2024
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	87,99	79.08%	87.00%
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,68	69.18%	80.79%
Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	50	62.50%	100.00%
Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	85,23%	86%	86.08%
Persentase Rumah Layak Huni	29,95%	41.14%	53.55%

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk data dari DPUPR disebutkan sebagai berikut;

1. Bappeda
2. BPKAD
3. UKPBJ
4. Inspektorat
5. Penyedia Jasa
6. Pejabat Pengadaan

Merujuk data Dinas Perkim disebutkan sebagai berikut;

1. Kementerian PUPR
2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Timur
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas)
4. KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Desa

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1,091.50	1,065.01	97.57%	Mendukung
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	150,370.42	141,246.12	93.93%	Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diselesaikan	3	3	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	86%	86.06%	100.10%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	72.22%	72.22%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	18.67	41.11	220.21%	Sangat Mendukung
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin	49.67%	53.55%	114.74%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100%	100%	100%	Sangat Mendukung
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari PUPR adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya anggaran yang cukup;
2. Koordinasi Lintas Sektor yang Lancar;
3. Cuaca yang Mendukung;
4. Tim Kerja yang Kompak dan Penyedia Jasa yang Rekomended.

Merujuk data Dinas Perkim adalah sebagai berikut;

1. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang memprioritaskan urusan pelayanan kebutuhan dasar bidang air minum, sanitasi dan perumahan
2. Harmonisasi yang baik antar stakeholder dalam penanganan permasalahan air minum, sanitasi dan rumah tidak layak huni

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari PUPR adalah sebagai berikut;

1. Banyaknya Usulan Rehab atau Pembangunan Infrastrutkur yang bukan kewenangan Kabupaten
2. Beberapa Infrastruktur terbangun tidak tepat rencana umur karena belum ada bangunan pelengkapnya seperti talud dan drainase

Merujuk Dinas Perkim adalah sebagai berikut;

1. Updating data air minum,sanitasi dan perumahan yang belum optimal
2. Belum memadainya Sistem Informasi yang akurat dan sistematis
3. Berkurangnya fungsi SPAM akibat kurangnya pemeliharaan oleh masyarakat

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari PUPR adalah sebagai berikut;

1. Usulan-usulan rehab/pembangunan diluar kewenangan Kabupaten dengan kondisi rusak berat/urgent untuk segera dibuatkan Nota Dinas kepada Bupati Kediri;
2. Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan dengan Kebutuhan Bangunan Pelengkapnya.

Merujuk data dari Dinas Perkim adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kolaborasi dengan PDAM sebagai BUMD yang melaksanakan fungsi pelayanan air minum
2. Meningkatkan peran swadaya masyarakat untuk melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni di desa
3. Updating data dapat dilaksanakan lebih optimal

Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

1. Peringkat 4 dengan Predikat Baik atas Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dari Gubernur Jawa Timur



Gambar Pelayanan Bajes (Bus Antar Jemput Sekolah) di SDN Bulusari 3 dan SMPN Grogol 3 Kabupaten Kediri (Sumber: Dinas Kominfo)

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Pada Tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Perhubungan yakni 87.44 mengalami peningkatan dari 86.59 pada Tahun 2023.

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Menurut Kementerian Perhubungan, transportasi pribadi maupun transportasi umum sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Perkembangan transportasi yang cepat ini seyogyanya beriringan dengan peningkatan pelayanan transportasi. Hal ini membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan transportasi.

Transportasi dewasa ini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, ekspektasi dan tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi daerah semakin tinggi. Tuntutan terkait pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah di Kabupaten Kediri semakin tinggi. Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan sarana infrastruktur daerah adalah hal yang wajib untuk diperhatikan.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Perhubungan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM pada unit pelayanan.
2. Teknologi alat penguji pada pelayanan uji berkala sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini
3. Kurang pahamnya Masyarakat dalam penggunaan aplikasi layanan PKB

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 adalah 86,70 dan Target pada akhir Renstra/RPJMD di Tahun 2026 ada pada angka 86,92.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk dari Dinas Perhubungan, dalam Upaya pencapaian kinerja pelayanan Transportasi daerah didukung oleh anggaran pada Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 855.134.124,- dengan realisasi anggaran sebesar 98,36 dan di dukung oleh aplikasi e sukma Jatim dari Pemprov Jatim yang mendukung ketercapaian hasil survey Kepuasan Masyarakat secara online dengan hasil 87,44 indeks

Hasil Kinerja

Hasil capaian kinerja IKM pada Tahun 2024 dalam kategori Tercapai, karena besaran capaian nya ada pada angka 100,85%

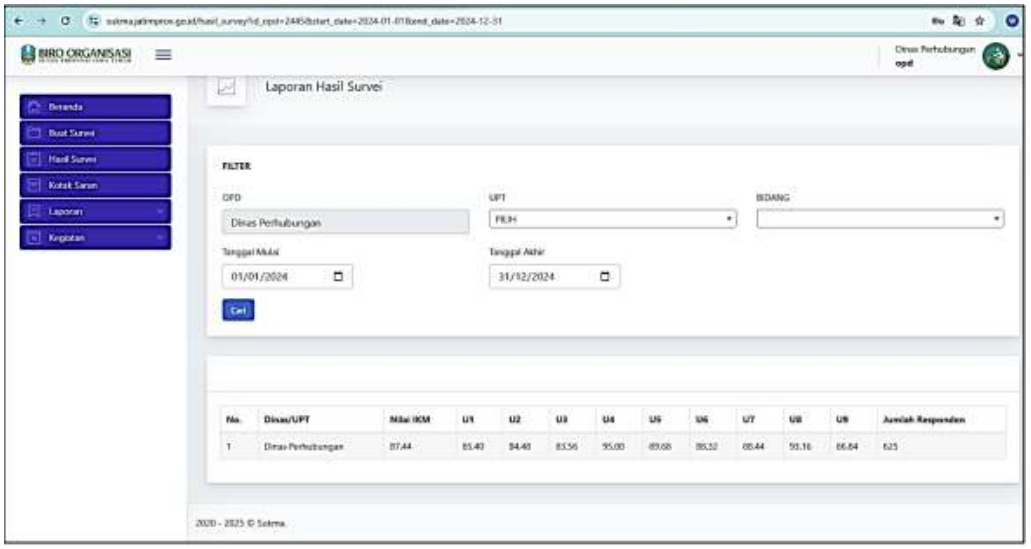
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

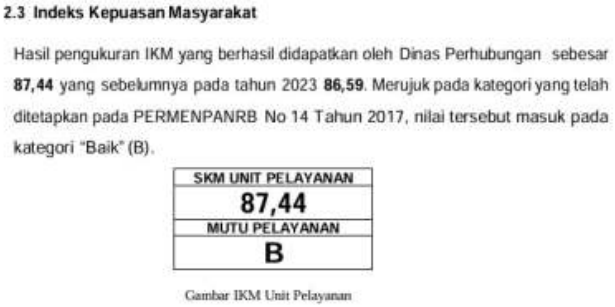
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.59	87.44	100.98%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur dalam e-Sukma Jatim	Diukur dalam e-Sukma Jatim	87.44	Hasil Resmi e-Sukma Jatim

Gambar Tangkapan Layar e-Sukma Jatim Nilai IKM Unit Layanan Perhubungan





2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil pengukuran IKM yang berhasil didapatkan oleh Dinas Perhubungan sebesar **87,44** yang sebelumnya pada tahun 2023 **86,59**. Merujuk pada kategori yang telah ditetapkan pada PERMENPANRB No 14 Tahun 2017, nilai tersebut masuk pada kategori "Baik" (B).

SKM UNIT PELAYANAN
87,44
MUTU PELAYANAN
B

Gambar IKM Unit Pelayanan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.25	87.44	101.38%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	855,134,124.00	841,095,680.00	98.36%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	100.85%	98.36%	2.49%	Efisien

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Indikator	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86	86.59	87.44

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
87.44	91.46	No Data

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan PKB	21	21	100%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari Dinas Perhubungan, Sistem yang sudah berkembang dan terintegrasi.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari Dinas Perhubungan, Keterbatasan Masyarakat Pengguna Layanan dalam Memahami Sistem Aplikasi Layanan PKB.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari Dinas Perhubungan, Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Terkait Sistem Pelayanan PKB dan Aplikasi Survei Kepuasan Layanan.



Tujuan 8

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah

Merujuk data dari Emrizal, Akademisi dari Universitas Gadjah Mada dijelaskan bahwa daya saing destinasi merupakan faktor penting yang secara positif berpengaruh terhadap pertumbuhan kunjungan(market share) dan pengeluaran wisatawan. Penelitian iniberfokus pada relasi antara tipologi psychographic wisatawan dengan sepuluh faktor daya saing destinasi pariwisata regional yang diadaptasi dari faktor daya saing model World Economic Forum (WEF). Teradaptasinya faktor-faktor daya saing destinasi pariwisata regional (provinsi) berbasis demand;

Prioritas terhadap faktor-faktor daya saing destinasi pariwisata regional adalah bervariasi antar tipe psychographic wisatawan. Tipe psychocentric cendrung lebih mengutamakan faktor citra baik destinasi (image), keamanan, alam, aksesibilitas dan biaya, sedangkan tipe allocentric lebih cendrung memberi prioritas pada budaya, alam, keragaman pilihan aktivitas, masyarakat lokal dan lingkungan. Namun demikian, faktor alam dan biaya perjalanan (cost) dinilai sama-sama penting (setara) oleh semua tipe wisatawan.Dilihat berdasarkan pola hubungannya, disimpulkan bahwa terdapat relasi dinamis antara tipologi wisatawan dengan faktor-faktor daya saing destinasi pariwisata regional. Sumatera Utara saat ini lebih kompetitif terhadap pasar kelompok pro-allocentric.

Merujuk data dari BPS, dijelaskan bahwa PDRB sektor akomodasi dan makan minum adalah produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan dan penyediaan makanan dan minuman. PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9.79	9.7	99.08%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPS	PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum / PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum Tahun Sebelumnya x 100%	9.7	Berita Resmi Statistik

Gambar Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) dalam Hotel Berbintang di Kabupaten Kediri



Sumber: BRS No. 2/09/3506/TH.V 01 September 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	5.04	9.7	192.46%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata

Pada tahun 2024 presentase pertumbuhan pad pariwisata melampaui target yaitu 10,95%, data tersebut diambilkan dari data perbandingan total PAD Pariwisata yang diterima tahun 2024 yakni 3.805.247.000,00 dengan total PAD Pariwisata yang diterima yakni 3.429.548.000,00.

Adanya pariwisata dengan kearifan lokal tidak hanya menarik wisatawan karena destinasinya saja. Melainkan juga dengan kearifan budaya lokal yang dapat membangkitkan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Sebenarnya, Indonesia sudah lama mengembangkan seni budaya dengan kearifan lokal dalam berbagai event dan festival yang dapat menarik wisatawan.

Merujuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijelaskan bahwa optimalisasi pariwisata sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Meninjau penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara peran strategis pariwisata dalam perekonomian diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (The World's Largest Industry), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan daerah, devisa negara, persentase PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata dijelaskan sebagai lokomotif perkembangan perekonomian pasca Covid-19 di berbagai tempat di seluruh dunia.

Selain hal diatas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan tentang empat pilar fokus yang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun empat pilar tersebut adalah;

1. Pengelolaan bisnis pariwisata yang berkelanjutan dengan kenyamanan wisatawan,
2. Partisipasi ekonomi masyarakat berkelanjutan jangka panjang,
3. Keberlanjutan budaya yang harus selalu dikembangkan, diadaptasi dengan teknologi dan dijaga,
4. Serta aspek dampak pariwisata terhadap lingkungan.

Tingginya antusias masyarakat akan wisata yang berkualitas menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Antusias yang tinggi di masa-masa modern ini akibat munculnya sosial media, menarik perhatian banyak pihak untuk datang dan berwisata pada tempat-tempat tersebut. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya agar antusiasme masyarakat tersebut tidak menghilang namun dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kediri.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata (promosi masih bersifat parsial) dan belum adanya acuan analisa pasar yang komperhensif, dan belum optimalnya dan pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Kediri.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJMD adalah 104. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Merujuk penjelasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Direct Promotion keluar provinsi bekerja sama dengan para jasa usaha pariwisata di Kabupaten Kediri
2. Memasang iklan terkait pariwisata di Kabupaten Kediri
3. Pembukaan Kawasan Wisata Corah yang sempat ditutup dikarenakan pandemi Covid-19
4. Menggunakan platform Media Sosial untuk mempromosikan kawasan wisata di Kabupaten Kediri

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024 presentase pertumbuhan pad pariwisata melampaui target yaitu 10,95%, data tersebut diambilkan dari data perbandingan total PAD Pariwisata yang diterima tahun 2024 yakni 3.805.247.000,00 dengan total PAD Pariwisata yang diterima yakni 3.429.548.000,00.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	5%	10.95%	219.00%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Persentase Pertumbuhan PAD Pariwisata	PAD Tahun n - PAD tahun n-1 / PAD Tahun n-1 x 100%	3.805.247.000,00 - 3.429.548.000,00 / 3.429.568.000,00 x 100%	Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9%	10.95%	121.67%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	15,789,352,019.00	15,362,048,485.00	97.29%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	219.00%	97.29%	121.71%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

Indikator	2022	2023	2024
Pertumbuhan PAD Pariwisata	94.59%	70.74%	10.95%

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
10.95%	No Data	No Data

Pihak-pihak yang Terkait

Disparbud Kabupaten Kediri bekerja sama dengan OPD terkait dalam kegiatan pertumbuhan pad pariwisata

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	10%	10.46%	104.60%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	0.08	2.752	3440.00%	Sangat Mendukung
Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1	1	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan dari Disparbud, ketercapaian target terjadi karena Pembukaan kembali wisata corah yang sempat ditutup dikarenakan Covid-19

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Disparbud, hambatan-hambatan kinerja adalah belum optimalnya informasi dan pemasaran pariwisata secara global, dan masih terbatasnya kerjasama antar daerah di bidang pariwisata.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Disparbud dijelaskan bahwa meningkatkan kunjungan wisata daerah baik wisatawan nusantara dan mancanegara, adanya dukungan stakeholders dari berbagai daerah Kabupaten/Kota



Gambar Masyarakat Kabupaten Kediri menanam pohon di kawasan lereng Gunung Kelud Kecamatan Ngancar (Sumber: Dinas Kominfo)

Tujuan 8
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

Merujuk Kementerian LHK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH menggabungkan beberapa parameter lingkungan hidup seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, dan kebersihan lingkungan, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.42	70.49	109.42%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)	IKLH = (0,376 x 62,97) + (0,405 x 94,31) + (0,219 x 39,34)	70.49	1. Formula Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Data Perhitungan Berdasarkan Report IKLH 2024

Gambar Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber: Kementerian LHK melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65	70.49	108.45%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui



Sasaran Strategis 16

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Pada Tahun 2024 realisasi Indeks Kualitas Air adalah 62.97 mengalami stagnansi dengan tahun 2023 dengan realisasi Indeks Kualitas Air adalah 67.92. Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) 2024 adalah 94.31 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2023 sebesar 82.16. Realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024 adalah 39.34 dibandingkan dengan realisasi IKL tahun 2023 sebesar 40.49.

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Merujuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lingkungan yang lestari penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan generasi selanjutnya. Agar tetap mendapatkan hidup layak, salah satu yang harus diupayakan generasi kini yakni merawat lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Utamanya dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Untuk urusan penanganan isu perubahan iklim, tergambar salah satunya pada inisiasi pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat yang membantu tugas Bupati Kabupaten Kediri berkewajiban untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dala dokumen perencanaan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Kediri yaitu Misi Ketujuh yaitu Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana. Tujuan dari Misi tersebut adalah Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Untuk mewujudkan Misi Ketujuh, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan indikator kinerja :

1. Indeks Kualitas air
2. Indeks Kualitas udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Lingkungan Hidup disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatnya beban pencemaran karena meningkatnya laju pembangunan.
2. Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran.
3. Terjadinya fenomena perubahan iklim.

4. Fasilitas pengurangan sampah belum optimal
5. Sarana prasarana pengelolaan persampahan masih kurang

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024 sebagai berikut;

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Target 2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	62,97	62,87
Indeks Kualitas Udara (IKU)	77,68	86,12
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	37,42	40,49

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan dan startegi untuk mewujudkan target sasaran strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan usaha terhadap dokumen Lingkungan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran melalui sosialisasi ramah lingkungan dengan sasaran Masyarakat desa serta bimtek pengelolaan limbah dengan sasaran palaku usaha
3. Konservasi sumber daya air melalui penanaman bibit di daerah tangkapan air dan daerah rawan longsor.
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui Bimtek dan sosialisasi pengelolaan sampah dengan sasaran Bank sampah, Calon Pengelola TPS3R dan Aparat Desa.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHKP dengan Revitalisasi Taman Kawasan SLG dan Jalur Hijau Soekarno - Hatta

Hasil Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja 2024 bahwa kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai dengan penjelasan sebagai berikut;

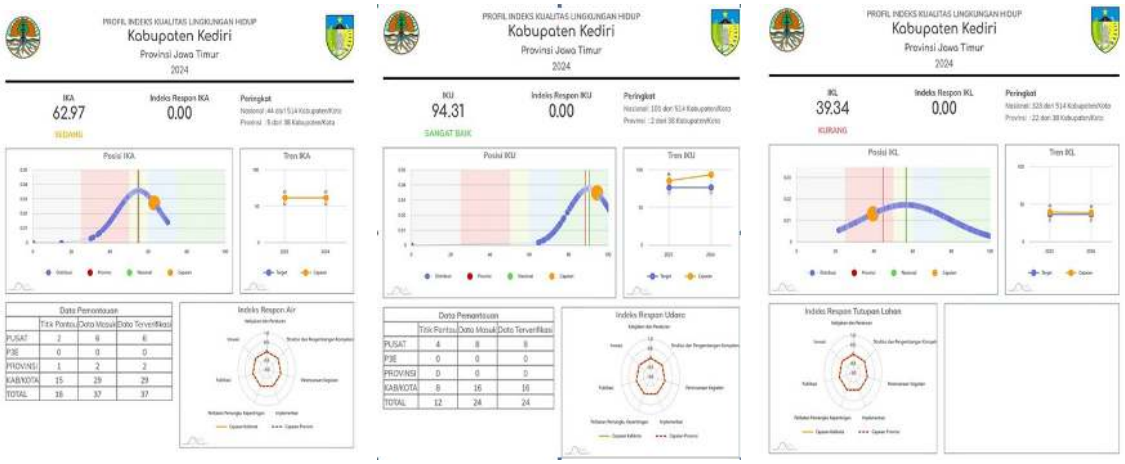
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.87	62.97	100.16%	Sangat Baik
	IKU	86.12	94.31	109.51%	Sangat Baik
	IKL	40.49	39.34	97.16%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Formula Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengukuran dilaksanakan oleh Kementerian LHK	Hasil Perhitungan disampaikan dalam gambar berikut:	Report Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2024

Gambar Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Tahun 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri (2024)

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	62.97	100.00%	Target Akhir RPJMD telah tercapai
	IKU	77.68	94.31	121.41%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui
	IKL	37.42	39.34	105.13%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,242,680,278.00	34,686,776,701.00	88.39%	Zona Hijau
	Indeks Kualitas Udara (IKU)				
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)				

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	102.28%	88.39%	13.89	Efisien
	Indeks Kualitas Udara (IKU)				
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)				

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

	2021	2022	2023	2024
IKA				
IKU				
IKL				

Perbandingan Kinerja

Capaian IKLH Kabupaten Kediri masih dibawah nasional dan provinsi karena untuk perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota dan nasional dilakukan dengan formula yang berbeda, untuk provinsi memasukkan indeks kualitas air laut, sedangkan untuk nasional selain memasukkan indeks kualitas air laut juga memasukkan indeks kualitas lahan gambut. Untuk Capaian Indeks kualitas air, Kabupaten Kediri diatas nasional maupun provinsi hal ini dikarenakan di kabupaten kediri masih banyak sumber air, embung dan sungai dengan kualitas air yang baik. Untuk kualitas lahan kabupaten kediri masih dibawah provinsi dikarenakan di Kabupaten Kediri tidak mempunyai hutan yang luas.

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

1. Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Kediri berada Peringkat 44 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia
2. Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kediri berada Peringkat 101 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia
3. Nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Kediri berada pada peringkat 328 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia

Instansi/Level	IKLH	IKA	IKU	IKL
Nasional	73,55	54,75	90,18	62,01
Provinsi	71,14	54,75	88,09	49,3
Kab. Kediri	70,49	62,97	94,31	39,34
Kota Kediri	65,26	62	88,95	27,07
Kab. Jombang	64,88	54	86,04	44,43
Kab. Tulung Agung	66,48	50	91,42	48,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

Pihak-pihak yang Terkait

Dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program kegiatan urusan lingkungan hidup ada beberapa pihak yang terlibat baik instansi vertical, SKPD terkait maupun kelompok Masyarakat, antara lain kelompok pengelola TPS3R, Bank sampah, Pegiat lingkungan dan sekolah adiwiyata.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	83%	83.33%	100.00%	Sangat Mendukung

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	78.57%	66.67%	84.85%	Mendukung
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	0.045	0.0364	80.89%	Sangat Mendukung
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	274	274	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	72%	88.89%	123.46%	Sangat Mendukung
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	50%	0	0	Kurang Mendukung
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	24.02%	71.13%	296.13%	Sangat Mendukung
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	4	1	25.00%	Kurang Mendukung
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	87.50%	100%	296.13%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	75.67%	31.67%	25.00%	Kurang Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan dari DLH, Secara umum, faktor-faktor penunjang pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri adalah dengan kuatnya kolaborasi dan sinergi antar sektor, baik itu sektor pemerintahan, sektor swasta, lapisan masyarakat, sekolahan, serta sektor-sektor lainnya yang mendukung pengupayaan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri. Selain itu, kuatnya dukungan masyarakat terutama dari lapisan LSM pecinta alam dan lingkungan dalam ikut serta mendukung melalui kegiatan-kegiatan penghijauan, menanam pohon di pekarangan, dsb.

Upaya perbaikan kualitas udara dan peningkatan vegetasi melalui kegiatan penanaman pohon kakija, selain itu pula peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan pengawasan konservasi sera pengawasan dan penataan industri yang dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut menunjang meningkatnya kenaikan kualitas udara dengan peningkatan vegetasi baik di kawasan perkotaan melalui kegiatan penanaman kakija, peningkatan RTHKP dan kegiatan konservasi.

Faktor-faktor Penyebab

Merujuk penjelasan dari DLH, Secara umum pula, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri terbatas pada kurangnya kesepahaman dan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan dapat melanjutkan kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Penurunan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan adanya keterbatasan pengawasan terhadap industri, terutama industri kecil.

Selain demikian, terdapatnya aliran Sungai Brantas yang membawa cemaran aliran air dari daerah-daerah hulu mulai dari kawasan Batu, Malang, Blitar, Tulungagung hingga ke Kediri. Tidak dapat dipungkiri bahwa cemaran-cemaran tersebut turut memengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air yang diukur oleh Kementerian KLHK dengan sampel air dari Sungai Brantas.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari DLH, Mengoptimalkan pengawasan terhadap usaha kegiatan, Peningkatan Upaya pemantauan lingkungan dengan perbaikan sarpras pemantauan lingkungan, mendorong penerbitan perkada Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan ruang public berupa taman kota



Gambar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berada di lokasi bencana banjir pada malam hari (Sumber: Dinas Kominfo)

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 yang diambilkan dari Surat BPBD Provinsi Jawa Timur adalah 97.89 lebih baik daripada realisasi tahun sebelumnya sebesar 104.53 pada tahun 2023.

Sesuai dengan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Merujuk data kajian BNPB, kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004 dan lainnya seperti Gunung Kelud tahun 2014. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.
Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sinergitas antar unsur-unsur masyarakat dalam wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kebencanaan di Kabupaten Kediri saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal tersebut terjadi

karena Kabupaten Kediri memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi, mulai dari bencana gunung meletus, tanah longsor, serta bencana-bencana lainnya.

Permasalahan

Merujuk data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebutkan adalah masing belum optimalnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang sesuai Standar Kebutuhan Unit Kerja.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Indeks Resiko Bencana (IRB) mengalami penajaman dari yang awalnya ditargetkan 120,54 sesuai dengan Renstra BPBD ditingkatkan menjadi 97.59 sebagaimana termaktub pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial serta bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas terhadap unsur organisasi melalui Pembinaan, Pendampingan, dan Evaluasi atas kinerja.
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah melalui reviu, monitoring dan evaluasi.
3. Penyusunan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penguatan keterlibatan masyarakat, pengelolaan data serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
4. Penggunaan sumber daya yang efisien untuk menjalankan program-program mitigasi dan tanggap darurat secara efektif.

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Resiko Bencana yang diambilkan dari Surat BPBD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

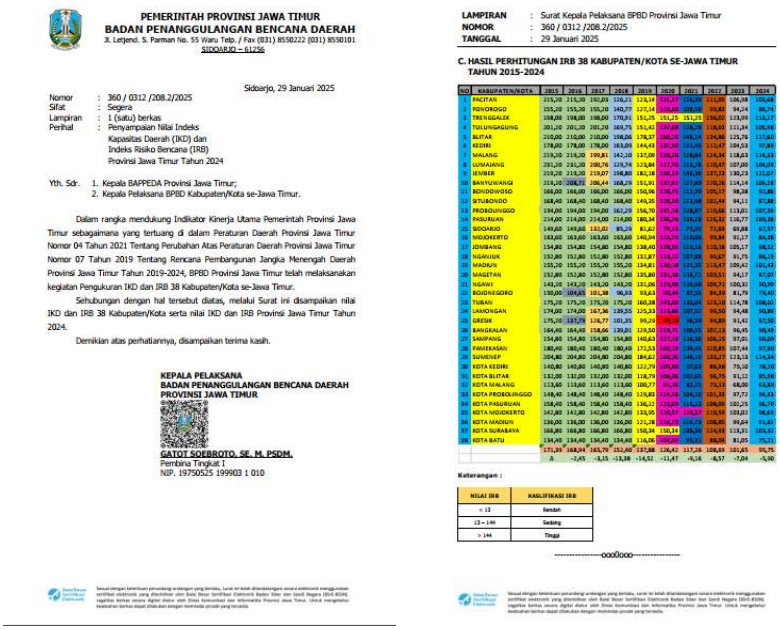
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	83	97.89	82.06%	Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Diukur oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dengan Verifikasi dari BNPB	Indikator dihitung secara tahunan dengan metode pengukuran yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB	97.89	Surat BPBD Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2025 nomor 360/0312/208.2/2025

Gambar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Nilai IRB Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Waru Telp. / Fax (031) 8550222 (031) 8550101
SIDOARJO – 61256

Sidoarjo, 29 Januari 2025

Nomor : 360 / 0312 /208.2/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Yth. Sdr. 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan Pengukuran IKD dan IRB 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui Surat ini disampaikan nilai IKD dan IRB 38 Kabupaten/Kota serta nilai IKD dan IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

GATOT SOEBROTO, SE, M. PSDM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750525 199903 1 010

LAMPIRAN : Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 360 / 0312 /208.2/2025
TANGGAL : 29 Januari 2025

C. HASIL PERHITUNGAN IRB 38 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR
TAHUN 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	215,20	215,20	192,03	126,21	123,14	121,27	119,39	111,09	106,08	103,68
2	PONOROGO	155,20	155,20	155,20	140,77	127,14	123,60	120,06	99,83	94,24	89,74
3	TRENGGALEK	198,00	198,00	198,00	170,01	151,75	151,75	146,03	123,99	113,19	113,19
4	TULUNGAGUNG	201,20	201,20	201,20	169,75	151,42	147,68	143,78	119,03	111,34	105,98
5	BLITAR	210,00	210,00	210,00	198,06	178,27	180,13	186,14	134,86	125,76	117,80
6	KEDIRI	178,00	178,00	178,00	163,09	144,43	137,30	131,19	112,47	104,53	97,89
7	MALANG	219,20	219,20	199,81	142,18	137,00	130,70	128,64	124,34	118,63	114,33
8	LUMAJANG	231,20	231,20	208,76	129,74	123,84	117,73	113,78	110,43	107,00	104,03
9	JEMBER	219,20	219,20	219,07	198,80	181,18	166,19	146,35	137,73	130,23	122,07
10	BANYUWANGI	219,20	208,71	208,44	168,29	151,91	147,61	127,80	120,06	114,14	108,28
11	BONDOWOSO	168,00	168,00	168,00	166,00	150,56	148,75	113,00	109,17	98,38	91,86
12	SITUBONDO	168,40	168,40	168,40	168,40	149,35	128,39	113,68	102,44	94,11	87,88
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	167,29	156,70	141,16	128,87	119,66	113,01	107,99
14	PASURUAN	214,00	214,00	214,00	214,00	180,34	156,26	139,16	126,51	116,77	109,18
15	SIDOARJO	149,60	149,60	133,02	85,29	81,67	79,15	76,71	73,60	69,88	67,57
16	MOJOKERTO	163,60	163,60	163,60	140,94	133,79	119,06	99,84	93,17	86,18	
17	JOMBANG	154,80	154,80	154,80	154,80	138,40	128,53	119,18	110,18	105,17	98,52
18	NGANJUK	152,80	152,80	152,80	152,80	132,87	118,02	107,08	99,87	91,76	86,13
19	MADIUN	155,20	155,20	155,20	154,81	130,58	121,95	113,47	109,42	101,43	
20	MAGETAN	152,80	152,80	152,80	152,80	135,80	131,28	118,72	109,51	94,17	87,07
21	NGAWI	143,20	143,20	143,20	143,20	131,06	119,98	110,68	109,71	100,32	90,98
22	BOJONEGORO	150,00	104,65	101,38	96,93	93,83	90,44	87,55	84,39	81,79	79,45
23	TUBAN	175,20	175,20	175,20	175,20	160,38	149,69	143,04	133,31	114,78	108,61
24	LAMONGAN	174,00	174,00	167,36	139,55	125,33	119,86	107,52	99,50	94,48	90,88
25	GRESIK	175,20	137,78	128,77	101,35	99,29	96,50	94,38	94,89	93,42	87,50
26	BANGKALAN	164,40	164,40	158,66	139,01	124,50	118,71	108,15	102,18	96,45	90,49
27	SAMPANG	154,80	154,80	154,80	154,80	140,63	127,19	116,30	106,15	97,01	90,89
28	PAMEKASAN	180,40	180,40	180,40	180,40	172,53	160,19	130,95	120,85	107,44	97,90
29	SUMENEP	204,80	204,80	204,80	204,80	184,62	166,35	148,13	130,27	123,13	114,34
30	KOTA KEDIRI	140,80	140,80	140,80	140,80	122,79	109,69	97,63	86,98	79,10	78,20
31	KOTA BLITAR	132,00	132,00	132,00	132,00	118,79	108,66	101,65	96,75	93,12	85,98
32	KOTA MALANG	113,60	113,60	113,60	113,60	100,77	91,26	82,71	79,18	68,00	63,80
33	KOTA PROBOLINGGO	148,40	148,40	148,40	148,40	129,82	114,16	104,10	101,31	97,72	94,33
34	KOTA PASURUAN	158,40	158,40	158,40	158,40	136,22	128,69	114,16	106,08	102,25	96,00
35	KOTA MOJOKERTO	142,80	142,80	142,80	142,80	133,95	120,57	110,57	106,55	103,01	98,69
36	KOTA MADIUN	136,00	136,00	136,00	126,00	121,78	108,72	104,73	100,85	99,64	91,61
37	KOTA SURABAYA	168,80	168,80	168,80	168,80	150,34	150,14	138,16	124,93	113,31	103,32
38	KOTA BATU	134,40	134,40	134,40	134,40	116,06	104,45	95,22	88,08	81,05	75,21
		171,39	168,64	163,79	152,40	137,88	128,42	117,26	108,69	101,65	95,75
		Δ	-2,65	-4,15	-11,38	-14,52	-11,47	-9,16	-8,57	-7,04	-5,90

Keterangan :

NILAI IRB	KASLIFIKASI IRB
< 13	Rendah
13 – 144	Sedang
> 144	Tinggi

----------oooOooo----------

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	116.32	97.89	115.84%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	5,338,031,327.00	4,119,363,699.00	77.17%	Zona Kuning

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	99.69%	77.17%	22.52%	Tidak Efektif

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	131.50	121.46	112.47	104.53	97.89
Indeks Ketahanan Daerah	0.50	0.54	0.59	0.63	0.67

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Indeks Resiko Bencana Tahun 2024

Tabel Perbandingan Indeks Resiko Bencana

Wilayah	Indeks Resiko Bencana	Keterangan	Rujukan Data
Provinsi Jawa Timur	95.75	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2025 nomor 360/0312/208.2/2025
Kabupaten Ngawi	90.99	Lebih Baik dari Kabupaten Kediri	
Kabupaten Tuban	108.02	Kabupaten Kediri Lebih Baik	

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk penjelasan dari BPBD adalah sebagai berikut;

1. Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam menunjang pencapaian kinerja BPBD dan Dinas Perkim melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam penanganan dampak akibat bencana BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait perbaikan fasilitas umum seperti jembatan rusak, jalan longsor, tanggul sungai longsor, normalisasi sungai dan sebagainya.
3. Dinas Sosial, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana serta penyediaan dapur umum di pengungsian akibat bencana.
4. Pemerintah Desa dan Kecamatan, BPBD beserta Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan berkoordinasi dalam hal penanganan dan rencana tindak lanjut di wilayah terdampak bencana, mendampingi pelaksanakan assessment serta memberikan aksesjalannya proses penanganan dampak bencana
5. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Kementerian PUPR , BPBD bersinergi dengan BBWS mengingat di wilayah Kabupaten Kediri terdapat aliran hulu sungai Brantas yang menjadi kewenangan BBWS Brantas. Pada saat terjadi bencana di sepanjang aliran sungai, BPBD berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam pelaksanaan assessment dan rencana penanganan dampak akibat bencana.
6. Perum Jasa Tirta I (PJT I), BPBD juga berkolaborasi dengan PJT I dalam penanganan tanggul longsor serta kegiatan normalisasi sungai. Kolaborasi ini dilaksanakan untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga ekosistem sungai agar tetap bersih dan sehat.
7. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dukungan FPRB yaitu dalam mengurangi risiko terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Kediri, berkoordinasi dengan BPBD dalam memperkuat sistem ketangguhan dalam menghadapi bencana, mengadakan pertemuan forum lintas sektor dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana, serta bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
8. TNI / Polri, dalam penanganan bencana BPBD Kabupaten Kediri juga didukung oleh personil TNI / Polri.
9. LSM, Ormas, Forum Relawan juga berperan dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	100%	97.22%	97.22%	Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk pada LKjIP BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disampaikan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Terlaksananya manajemen kinerja internal dengan memaksimalkan ketersedian jumlah pegawai terhadap beban kerja.
2. Mengupayakan dengan maksimal kompetensi aparatur untuk mendukung terlaksananya program kegiatan.
3. Memaksimalkan ketersediaan anggaran untuk mendukung terlaksananya program kegiatan.
4. Memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk pada LKjIP BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disampaikan beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Belum idealnya jumlah aparatur dengan beban kerja.
2. Belum idealnya kompetensi ijazah dengan posisi / pekerjaan yang diampu
3. Capaian serapan anggaran yang masih dibawah 80 % yaitu sebesar 77,17 % dikarenakan tidak terlaksananya perubahan tipologi perangkat daerah dari tipe B ke tipe A sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang sudah dianggarkan tidak bisa terserap maksimal
4. Belum maksimalnya kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada LKjIP BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disampaikan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengusulan jumlah pegawai pada penambahan usulan ASN di BPBD
2. Penganggaran diklat teknis / peningkatan kapasitas kepada karyawan
3. Memaksimalkan kinerja dan optimalisasi serapan anggaran serta pertanggungjawaban laporan kinerja dan keuangan yang efisien.
4. Mengoptimalkan himbauan kepada masyarakat terkait upaya penanggulangan bencana melalui media sosial, sosialisasi, serta pertemuan lintas sektor.

Apresiasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan Penghargaan dalam Bidang Kebencanaan Sebagai Berikut:

1. Juara 3 Lomba Pendirian Tenda dalam Rangka Kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Timur Tahun 2024



Gambar Bupati Kediri bersama dengan Ketua TP PKK Kabupaten Kediri dalam pembukaan event Batik di Kawasan Simpang Lima Gumul

Tujuan 10

Meningkatkan Potensi Seni dan Budaya Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah

Merujuk pada Kumparan yang mengacu pada keterangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan daerah adalah wilayah atau kawasan. Kebudayaan daerah mencakup aspek-aspek unik dari kehidupan masyarakat setempat. Dapat juga menjadi cerminan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berdasarkan buku Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya, Tedi Sutardi, (2003), terdapat beberapa elemen penting dalam kebudayaan daerah. Elemen-elemen tersebut ada Bahasa dan dialek, adat dan tradisi, seni dan kerajinan tradisional, arsitektur rumah dan tata pemukiman, pakaian adat, makanan dan kuliner, norma dan sistem nilai. Kabupaten Kediri telah memprioritaskan pengembangan Seni Budaya dengan hasil kinerja sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89	60	67.42%	Cukup Baik
	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98.11%	98.21%	100.10%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	(50%x106)+(50%*14)	60	Data Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan/ Jumlah seni budaya yang ada x 100%	55 / 56 x 100%	98.21%	Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	99	60	60.61%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai
	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	90%	98.21%	109.12%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui



Gambar Bupati Kediri memamerkan Batik dalam event Kediri Batik di Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri (Sumber: Dinas Kominfo)

Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Daerah

Pada tahun 2024 Presentase Cakupan Event skala kabupaten Tercapai sebesar 56,65% dengan sebanyak 183 event Budaya Skala Kabupaten yang diikuti/diselenggarakan dan 323 event Budaya dari desa sampai Kabupaten. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi Cakipan Event Budaya Skala Kabupaten yakni 35.86% pada Tahun 2023.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melihat momentum kebangkitan ekonomi dan mengedepankan pelestarian tradisi lokal serta lingkungan. Fungsi dari pelestarian budaya lokal adalah sebagai identitas lokal.

Selain itu pula, Kemenparekraf mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) berbasis budaya dan kearifan lokal untuk membangkitkan perekonomian di sektor parekraf pascapandemi. Karena pada kenyataannya, perekonomian dari sektor kepariwisataan kini tengah menjadi potensi terutama dalam kondisi pasca pandemi Covid-19.

Pengembangan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dukungan dan sinergi berbagai pihak yakni pemerintah, pengusaha, pengelola objek wisata, masyarakat, media hingga kampus. Sinergi harus terus diperkuat mengingat keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, selalu diperlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutkan permasalahan adalah Masih terbatasnya sarana-prasarana seni budaya daerah, dan Belum adanya gedung kesenian /pertunjukan seni yang representatif

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Pelestarian Seni Budaya Daerah dengan indikator Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten dalam RPJMD 8% mengalami penajaman menjadi 35.86% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Mengikuti event yang ada di Kabupaten Kediri;
2. Mendampingi event yang berkaitan dengan promosi pariwisata dan kebudayaan;

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100% dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35.68%	56.65%	158.77%	Sangat Baik (Diatas Ekspektasi)

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Event Seni Budaya Skala Kabupaten yang diikuti/diselenggarakan / Event Seni Budaya dari Desa sampai Kabupaten x 100%	183 event / 323 event x 100%	56.65%	Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	10%	56.65%	566.50%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	6,943,567,833.00	6,877,835,399.00	99.05%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	158.77%	99.05%	59.72%	Efisien

Pihak-pihak yang Terkait

Disparbud Kabupaten Kediri bekerjasama dengan OPD, seniman dan pihak yang terkait dalam kegiatan pertumbuhan PAD pariwisata.

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan grup kesenian yang diberdayakan	20%	82.82%	414.10%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	36%	21.73%	60.36%	Cukup Mendukung
	Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	20%	50%	250.00%	Sangat Mendukung
Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarpras museum yang dipelihara	100%	100%	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Banyaknya jenis seni budaya, organisasi seni / seniman di Kabupaten Kediri;
2. Banyaknya jenis seni budaya, organisasi seni / seniman di Kabupaten Kediri;

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk penjelasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana-prasarana seni budaya daerah;
2. Belum adanya gedung kesenian / pertunjukan seni yang representatif

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mempromosikan budaya kabupaten kediri melalui event di tingkat provinsi dan nasional;
2. Adanya kebijakan pembangunan kebudayaan dari pemerintah dalam rangka melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan seni budaya daerah

Apresiasi dan Penghargaan Kinerja

Merujuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijelaskan apresiasi dilaksanakan dengan Gelar Seni Budaya Daerah di UPT Taman Budaya Surabaya



Gambar Atlit Kabupaten Kediri mengikuti Kejuaraan Provinsi (Sumber Dinas Kominfo)

Sasaran Strategis 19

Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran pemuda dan menyongsong bonus demografi Kabupaten Kediri, para pemuda harus memiliki dampak dan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut berusaha diupayakan agar fenomena bonus demografi di Indonesia utamanya di Kabupaten Kediri dapat terlaksana dengan baik, dimana para pemuda menjadi produktif dan bukannya membebani pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan terdapatnya tiga lapisan yang digunakan untuk mendukung pembangunan pemuda, yakni:

1. Lapisan Pengembangan individu, yang dipetakan dalam domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan. Pada lapisan ini Pembangunan pemuda memastikan terpenuhinya layanan dasar pada pemuda untuk memastikan produktivitasnya.
2. Lapisan Pengembangan Penghidupan dan Kesejahteraan, dimana pemuda diharapkan mendapat akses terhadap pekerjaan yang lebih baik sehingga terpenuhi penghidupan yang sejahtera. Pada lapisan pengembangan penghidupan dan kesejahteraan dipetakan dalam domain lapangan dan kesempatan kerja.
3. Lapisan partisipasi dalam bidang kehidupan, pemuda diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam RPJMD adalah 104. Target sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perikanan bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

Hasil Kinerja

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Keluarga Sejahtera yang diambilkan dari Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi INkelud terdapat 454.395 Keluarga yang masuk dalam Kategori Kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus/Jumlah Keluarga. Data keluarga yang berjumlah 454.395 tersebut dibagi dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kediri yakni 504.603 dan dikalikan 100% dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	90%	65.28%	72.53%	Cukup Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah prestasi yang dihasilkan dibagi jumlah yang mengikuti event dikali 100%	75 penerima beasiswa berani/115 atlet yang dikirim*100%	65,28	RPJMD

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	100%	65.28%	65.28%	Target Akhir RPJMD Belum Tercapai

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	1,491,924,200.00	1,336,260,550.00	89.57%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	72.53%	89.57%	-17.03%	Tidak Efektif (Kinerja <100%)

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk dari Penjelasan Disdik, pihak yang terkait adalah Dinas Pendidikan dan KONI Kabupaten Kediri

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	53,00%	60,00%	113,21%	Sangat Mendukung
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	70,00%	68,00%	97,14%	Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk penjelasan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya program dan anggaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi dan pelatihan atlet
2. Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat digunakan untuk pelatihan dan kompetisi serta pemanfaatan fasilitas sekolah dan komunitas untuk mendukung pengembangan bakat pemuda di bidang olahraga
3. Semangat dan motivasi tinggi dari pemuda serta atlet untuk berprestasi di tingkat lokal, nasional dan internasional

Faktor-faktor Penyebab

Merujuk penjelasan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas olahraga dan peralatan olahraga yang belum merata di beberapa wilayah di Kabupaten Kediri
2. Kurangnya ajang kompetisi olahraga dan kepemudaan di tingkat daerah

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk penjelasan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur, fasilitas olahraga dan pengadaan peralatan olahraga yang merata di wilayah Kabupaten Kediri
2. Mengadakan dan menyelenggarakan turnamen dan festival kepemudaan dan olahraga di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.



Gambar Pelantikan Kepala Desa di Pendopo Panjalu Jayati Kabupaten Kediri (Sumber Dinas Kominfo)

Tujuan 11

Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa

Merujuk penjelasan dari Amazihono, dkk. dalam Jurnal on Education 'Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Desa Berdaya Saing berdasarkan Undang-Undang Desa." Daya saing desa merupakan kemampuan suatu desa untuk bersaing dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Ini melibatkan berbagai faktor, mulai dari kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, hingga inovasi dan kreativitas masyarakat.

Faktor lainnya kenapa desa harus berdaya saing adalah karena perkembangan teknologi. Desa harus melek terhadap teknologi, kalau tidak desa akan kena imbas disrupsi digital. Desa harus berdaya dengan mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi, serta meningkatkan akses Informasi karena Informasi menjadi sangat penting. Desa yang memiliki akses informasi yang baik akan lebih mudah mengembangkan diri.

Masalah faktor lainnya adalah masalah urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan banyak penduduk desa merantau ke kota. Desa perlu menciptakan lapangan kerja agar penduduk tidak terus bermigrasi Dampak urbanisasi ini akan menyebabkan perubahan struktur penduduk, artinya desa akan ditinggalkan generasi muda akan mengalami penurunan produktivitas.

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75	0.78	104.00%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	(50%x106)+(50%*14)	60	Data Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75	0.78	104.00%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui



Gambar Bupati Kediri memberikan penghargaan kepada Desa Bedug di Kawasan Simpang Lima Gumul (Sumber Kominfo)

Sasaran Strategis 20

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1) desa memiliki tujuan dalam rangka pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Kementerian Desa dan PTT meninjau bahwa implementasi UU Desa secara umum telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dengan penggunaan tiga persen Dana Desa untuk operasional pemerintahan desa dan juga hingga penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global.

Selain daripada amanat regulasi diatas, peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi sangat penting. meningkatnya angka urbanisasi, pergeseran penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kediri saja, banyak tempat kini sedang mengalami hal tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa dari periode ke periode pemerintahan hingga saat ini ternyata belum sepenuhnya berjalan optimal untuk membebaskan masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Lahirnya UU tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa. Melalui kewenangan ini, desa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai perwujudan kemandirian desa. Oleh sebab itu, salah satu misi Kabupaten Kediri adalah mengoptimalkan agar Masyarakat dan desa bisa mengelola potensi yang ada guna menciptakan desa yang mandiri.

Permasalahan

Merujuk data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disebutkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut;

1. Kurang sinkronisasinya pedoman yang menjadi acuan pencapaian indikator sasaran yang akan dicapai;
2. Kurang berperannya lembaga ekonomi desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi desa belum optimal;
5. Kurang adanya sinergitas program yang ada di pemerintah dan desa;

6. Kemampuan sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengelolaan pemerintaan desa baik dari segi aparatur pemerintah dan masyarakat.

Perencanaan

Pada tahun 2024 ini, target Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan dari IDM dalam RPJMD adalah 54,81%. Target tersebut mengalami penajaman pada Tahun 2024, sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri tahun 2024 target 84,55%.

Upaya-upaya Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, bersama dengan dinas-dinas lain adalah sebagai berikut;

1. Koordinasi secara berkala baik secara horizontal dengan internal pemerintah daerah dan secara vertikal dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai panduan pencapaian indikator sasaran;
2. Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes, BUMDESMA dan pasar desa;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga kemasyarakatan desa, seperti pendamping desa, PKK, Karang Taruna dan Posyandu;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi desa melalui pendampingan, pelatihan, dan perluasan jaringan untuk akses permodalan dan pasar;
5. Sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di pemerintah dan desa;
6. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa baik dari aparatur pemerintah desa dan Masyarakat.

Hasil Kinerja

Menurut data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat dengan target 310 desa, realisasi 258 desa dan capaian 83%;
2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target jumlah desa mandiri 16 desa, realisasi 87 desa dan capaian 544% serta target jumlah desa maju 170 desa, realisasi 236 desa dan capaian 139%;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga desa dengan target 87%, realisasi 84% dan capaian 97%;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan target 89%, realisasi 89% dan capaian 100%.

Uraian diatas disampaikan dengan teknis perhitungan sebagai berikut;

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	84.55%	94.46%	111.72%	Sangat Baik

Keandalan Data Kinerja

Formula	Perhitungan	Hasil Perhitungan	Dasar Perhitungan
Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju di Kabupaten Kediri / Jumlah Desa x 100%	87 + 236 / 343 =	94.46%	Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2025

Gambar Perbandingan Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Tahun 2024

STATUS DESA	Rata-Rata Nasional	Provinsi Jatim	Kabupaten Kediri	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Jombang
Desa Mandiri	17.203	4.019	87	130	78	184
Desa Maju	23.063	2.924	236	116	175	118
Desa Berkembang	24.532	778	20	11	11	
Desa Tertinggal	6.100					
Desa Sangat Tertinggal	4.363					
Desa Tidak Memenuhi Kriteria	4					
JUMLAH TOTAL	75.265	7.721	343	257	264	302

Sumber: LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri 2024

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	68.80%	94.46%	137.30%	Target Akhir RPJMD telah terlampaui

Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	17,012,033,080.00	16,137,059,528.00	94.86%	Zona Hijau

Analisa Efisiensi

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Analisa Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	111.72%	94.86%	16.86%	Efisien

Pembandingan/Benchmarking

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Kediri dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut;

2021	2022	2023	2024
Belum ada Data	63.56	84.55	94.17

Dari data diatas didapati adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan signifikan tersebut akan dijadikan bahan dalam melakukan perencanaan tahun berikutnya.

Perbandingan Kinerja

Dari data yang dihimpun oleh didapati data Realisasi Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut;

Kabupaten Kediri	Daerah Lain/Kota Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional
94,17%	No Data	89,92%	53,30%

Gambar Perbandingan Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Tahun 2024

STATUS DESA	Rata-Rata Nasional	Provinsi Jatim	Kabupaten Kediri	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Jombang
Desa Mandiri	17.203	4.019	87	130	78	184
Desa Maju	23.063	2.924	236	116	175	118
Desa Berkembang	24.532	778	20	11	11	
Desa Tertinggal	6.100					
Desa Sangat Tertinggal	4.363					
Desa Tidak Memenuhi Kriteria	4					
JUMLAH TOTAL	**75.265**	**7.721**	**343**	**257**	**264**	**302**

Sumber: LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri 2024

Pihak-pihak yang Terkait

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri, berperan dalam hal menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi dari kinerja yang ditargetkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Pemerintah Pusat, berperan dalam hal koordinasi dan memberikan arah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Perguruan Tinggi, berperan dalam hal penyediaan data dan rekomendasi kebijakan atas hasil kinerja yang ditargetkan;
4. Swasta, berperan dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan;
5. Masyarakat berperan sebagai sasaran dari pelaksanaan program yang disusun

Program Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan anar desa dan pihak ketiga	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam menjalankan manajermen pemerintahan	343	343	100.00%	Sangat Mendukung
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	343	343	100.00%	Sangat Mendukung

Faktor-faktor Pendukung

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Komitmen dan tanggungjawab kepala daerah;
2. Intensifnya koordinasi dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kediri.

Faktor-faktor Penghambat

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Kebijakan yang tumpah tindih antara pusat dan daerah;
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian desa belum optimal;
3. Kurangnya jaringan kerjasama dalam hal pengelolaan potensi desa.

Rencana Tindak Lanjut

Merujuk data dari DPMPD, disampaikan sebagai berikut;

1. Melakukan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan secara berkala dan berkelanjutan;
2. Penguatan kapasitas pemerintahan desa baik aparatur pemerintah dan masyarakat serta fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa;
3. Optimalisasi perluasan jaringan dalam hal pengelolaan potensi desa melalui peran lembaga desa dalam pembangunan seperti pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa.



Bab IV
Penutup

Tahun 2024 ini, perjalanan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam berkinerja kepada masyarakat telah usai. Rencana-rencana yang telah ditetapkan telah berupaya penuh untuk kami penuhi. Dengan mengendepankan sistem akuntabilitas kami berupaya bekerja untuk memberikan dampak kinerja yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) yang langsung berdampak kepada masyarakat luas telah dapat tercapai cukup baik. Hampir keseluruhan indikator kinerja utama yang menjadi tujuan dan sasaran Bupati Kediri telah tercapai. Capaian ini diharapkan dapat digunakan untuk melaksanakan kinerja dengan baik dan optimal. Dengan anggaran sebesar Rp3,1 Triliun yang menjadi amanah bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyelenggarakan pemerintahan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tata Kelola Manajemen Pemerintahan pada kenyataannya masih perlu menjadi perhatian. Sistem Tata Kelola Pemerintahan berbasis SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh Kementerian PANRB belum secara optimal diterapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pendekatan-pendekatan perbaikan tata-kelola pemerintahan dengan berbagai macam metode akan kami upayakan di tahun 2025 mendatang. Upaya-upaya pendekatan yang strategis dan berdampak luas akan menjadi tujuan utama bagi kami. Upaya delayering performance, refinement IKU, serta tindakan-tindakan lain serta mengupayakan optimalisasi dokumentasi monitoring dan evaluasi serta pengawalan kinerja akan kami bubuhkan dalam Rencana Kerja Pengembangan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2024.